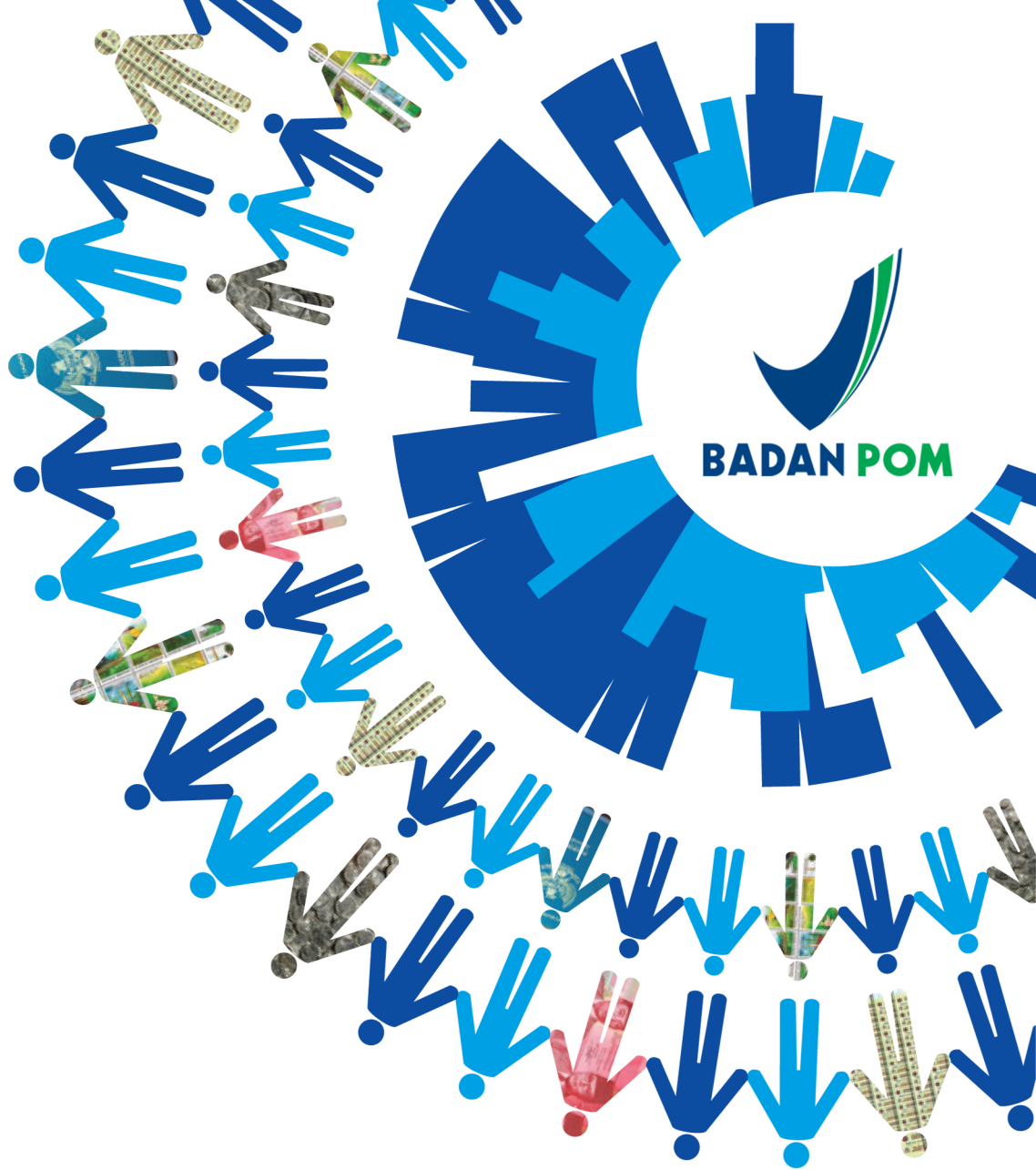




ASIAN GAMES | 2018
Jakarta Palembang



LAPORAN KINERJA 2017

Balai Besar POM di Palembang

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR LAMPIRAN	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GRAFIK	iv
KATA PENGANTAR	1
RINGKASAN EKSEKUTIF	2
BAB I. PENDAHULUAN	5
1.1 GAMBARAN UMUM ORGANISASI	5
1.2 STRUKTUR ORGANISASI	6
1.3 ASPEK STRATEGIS ORGANISASI	9
1.4 ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS	9
1.5 ISU STRATEGIS	13
BAB II. PERENCANAAN KINERJA	15
2.1 RENCANA STRATEGIS	15
2.2 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017	21
2.3 KRITERIA PENCAPAIAN INDIKATOR	23
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	25
3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	27
3.2 REALISASI ANGGARAN	72
3.3 ANALISIS EFISIENSI KEGIATAN	74
BAB IV. PENUTUP	78

DAFTAR LAMPIRAN

- LAMPIRAN 1** MATRIKS KINERJA DARI RENSTRA
- LAMPIRAN 2** FORMULIR RENCANA KINERJA
- LAMPIRAN 3** FORMULIR PENGUKURAN KINERJA
- LAMPIRAN 4** FORMULIR PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN
- LAMPIRAN 5** FORMULIR PENGUKURAN EFEKTIFITAS KEGIATAN
- LAMPIRAN 6** REKAPITULASI HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Kabupaten/Kota Propinsi Sumatera Selatan	11
Tabel 2.	Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja BBPOM di Palembang Periode 2015-2019	19
Tabel 3.	Program/Kegiatan Strategis, Sasaran Program/kegiatan dan Indikator BBPOM di Palembang	20
Tabel 4.	Perjanjian Kinerja BBPOM di Palembang 2017	21
Tabel 5.	Rencana Aksi Perjanjian Kinerja BBPOM di Palembang 2017	23
Tabel 6.	Kriteria Penilaian Capaian Kinerja	24
Tabel 7.	Indikator Kinerja Eselon 3 Bidang Pemdik (Seksi Pemeriksaan dan Seksi Penyidikan)	26
Tabel 8.	Indikator Kinerja Eselon 3 Bidang Pengujian (Teranokoko, Pangan dan Mikrobiologi)	26
Tabel 9.	Indikator Kinerja Eselon 3 Bidang Serlik (Seksi Layanan Informasi Konsumen dan Seksi Sertifikasi)	27
Tabel 10.	Indikator Kinerja Eselon 4 Sub Bagian Tata Usaha	27
Tabel 11.	Capaian Kinerja Sasaran Strategis dari BBPOM di Palembang selama tahun 2017	28
Tabel 12.	Perbandingan antara target dan realisasi Indikator Kinerja Utama Tahun 2017	28
Tabel 13.	Perbandingan antara capaian & sasaran strategis BBPOM di Palembang dan BBPOM di Medan	29
Tabel 14.	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan SS1 Tahun 2017	41
Tabel 15.	Jumlah Sarana Produksi Obat dan Makanan di Wilayah Pengawasan BBPOM di Palembang Tahun 2017	47
Tabel 16.	Jumlah Sarana Distribusi Obat dan Makanan di Wilayah Pengawasan BBPOM di Palembang	53
Tabel 17.	Jumlah Pelanggaran Tindak Pidana di Bidang Obat dan Makanan pada Tahun 2016	56
Tabel 18.	Capaian Indikator Kinerja SS2 tahun 2017	59
Tabel 19.	Perbandingan antara target dan realisasi Indikator Kinerja SS2 tahun 2017	59
Tabel 20.	Perbandingan antara realisasi Indikator Kinerja SS2 tahun 2017 dengan baseline (2014)	60

Tabel 21. Perbandingan antara realisasi Indikator Kinerja SS2 tahun 2017 dengan Rencana Tahun Akhir RPJM (2019)	60
Tabel 22. Realisasi Tingkat Kepuasan Masyarakat 2014, 2015,2016 & 2017 serta target 2017 dari Renstra 2019	63
Tabel 23. Jumlah Kab/Kota 2014, 2015,2016 & 2017 serta target 2017 dan 2019	64
Tabel 24. Capaian realisasi indikator sasaran kegiatan dari SS2 terhadap target tahun 2017	64
Tabel 25. Realisasi Jumlah Layanan Publik 2014, 2015, 2016 & 2017 serta target 2017 dan Renstra 2019	65
Tabel 26. Realisasi Jumlah Komunitas yang diberdayakan tahun 2014, 2015,2016 & 2017 serta target 2017 dan Renstra 2019	67
Tabel 27. Pencapaian Indikator Kinerja SS3 terhadap target tahun 2016	68
Tabel 28. Perbandingan antara realisasi indikator SS3 terhadap Target RPJM 2019	69
Tabel 29. Capaian realisasi indikator kinerja sasaran kegiatan SS3 terhadap target 2017	70
Tabel 30. Rincian Anggaran dan realisasi BBPOM di Palembang tahun 2017	72
Tabel 31. Profil Anggaran DIPA BBPOM di Palembang tahun 2015-2017	72
Tabel 32. Realisasi Anggaran berdasarkan Sasaran Strategis	73
Tabel 33. Efisiensi Capaian Kegiatan Sasaran Strategis BBPOM di Palembang	75
Tabel 34. Kegiatan tahun 2016 yang tidak Efisien	75

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi BBPOM di Palembang	6
Gambar 2. Peta Provinsi Sumatera Selatan	12
Gambar 3. Penindakan Pabrik AMDK	57
Gambar 4. Capaian Jumlah Kabupaten/Kota Tahun 2017	63
Gambar 5. Capaian Jumlah Layanan Publik Tahun 2017	65
Gambar 6. Capaian Jumlah Komunitas yang diberdayakan Tahun 2017	67

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. Perbandingan Realisasi dan Target Obat MS Tahun 2017	29
Grafik 2. Perbandingan Realisasi dan Target Obat MS 2017 Renstra	29
Grafik 3. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Obat MS 2017 Tahun dengan Tahun 2014, 2015, dan 2016	30
Grafik 4. Perbandingan Capaian Kinerja 2017 Obat MS terhadap Target Tahun 2019	30
Grafik 5. Capaian Kinerja 2017 Obat MS BBPOM di Palembang dengan BBPOM di Medan	30
Grafik 6. Perbandingan Realisasi dan Target Kosmetik MS Tahun 2017	30
Grafik 7. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Kosmetik MS Tahun 2014, 2015, 2016 dan 2017	32
Grafik 8. Perbandingan Capaian Kinerja 2017 Kosmetik MS terhadap Target Tahun 2019	33
Grafik 9. Perbandingan Capaian Kosmetik MS 2017 BBPOM di Palembang dengan BBPOM di Medan	33
Grafik 10. Perbandingan Realisasi dan Target OT MS Tahun 2017	34
Grafik 11. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja OT MS Tahun 2014, 2015, dan 2016	34
Grafik 12. Perbandingan Capaian Kinerja 2017 OT MS terhadap Target Tahun 2019	35
Grafik 13. Perbandingan Capaian OT MS 2017 terhadap target 2017 Renstra	35
Grafik 14. Perbandingan realisasi Persentase OT MS 2017 BBPOM di Palembang dengan BBPOM di Medan	35
Grafik 15. Perbandingan Realisasi dan Target Persentase Suplemen Kesehatan yang MS Tahun 2017	36
Grafik 16. Perbandingan Realisasi Kinerja 2017 Suplemen Kesehatan MS Tahun 2014, 2015, dan 2016	37
Grafik 17. Perbandingan Persentase Suplemen Kesehatan 2017 terhadap Target Tahun 2019	37
Grafik 18. Perbandingan Persentase Suplemen Kesehatan 2017 BBPOM di Palembang dengan BBPOM di Medan	37

Grafik 19. Perbandingan Realisasi dan Target 2017 Persentase Makanan yang MS	38
Grafik 20. Perbandingan Realisasi Persentase Makanan yang MS 2017 dengan Tahun 2014, 2015, dan 2016	39
Grafik 21. Perbandingan Capaian Persentase Makanan yang MS 2017 terhadap Target Tahun 2019	39
Grafik 22. Perbandingan Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat 2017 BBPOM di Palembang dengan BBPOM di Medan	40
Grafik 23. Sampel yang diuji dengan parameter uji kritis tahun 2017 BBPOM di Palembang	42
Grafik 24. Perbandingan realisasi sampel yang diuji dengan parameter uji kritis tahun 2017 terhadap realisasi tahun 2014, 2015, dan 2016	43
Grafik 25. Sampel yang diuji dengan Parameter Uji Kritis Tahun 2017 terhadap Perjanjian Kinerja 2017 dan Renstra (2015-2019)	43
Grafik 26. Perbandingan realisasi sampel yang diuji dengan Parameter Uji Kritis antara BBPOM di Palembang dengan BBPOM di Medan	44
Grafik 27. Persentase Capaian Sampling Produk Obat di Sektor Publik terhadap target tahun 2017	45
Grafik 28. Perbandingan Capaian Sampling Produk Obat di Sektor Publik BBPOM di Palembang dengan BBPOM di Medan	46
Grafik 29. Persentase Capaian Pemeriksaan Sarana Produksi 2017 terhadap target tahun 2017	48
Grafik 30. Realisasi Persentase Cakupan Pemeriksaan Sarana Produksi tahun 2014,2015,2016 dan 2017	48
Grafik 31. Realisasi Persentase Cakupan Pemsar Produksi tahun 2017 BBPOM di Palembang dengan BBPOM di Medan	48
Grafik 32. Realisasi Pemsar Distribusi Obat tahun 2017	50
Grafik 33. Realisasi Pemsar Distribusi Obat Tradisional tahun 2017	51
Grafik 34. Realisasi Pemsar Distribusi Suplemen Kesehatan tahun 2017	51
Grafik 35. Realisasi Pemsar Distribusi Kosmetik tahun 2017	52
Grafik 36. Realisasi Pemsar Distribusi Makanan tahun 2017	52
Grafik 37. Realisasi Pemsar Distribusi Bahan Berbahaya tahun 2017	53
Grafik 38. Realisasi Persentase Cakupan Pemsar Distribusi OMKA 2014, 2015, 2016 dan 2017	54
Grafik 39. Perbandingan Realisasi Persentase Pemsar Distribusi BBPOM di Palembang dengan BBPOM di Medan	54

Grafik 40. Realisasi Jumlah Perkara realisasi tahun 2014,2015,2016 dan 2017	57
Grafik 41. Perbandingan Target dan Realisasi Jumlah Perkara BBPOM di Palembang dengan BBPOM di Medan	58
Grafik 42. Perbandingan realisasi Tingkat Kepuasan Masyarakat BBPOM di Palembang dengan BBPOM di Medan	61
Grafik 43. Perbandingan Jumlah Kabupaten/Kota yang memeberikan Komitmen untuk Pelaksanaan Regulasi OMKA	61
Grafik 44. Tingkat Kepuasan Masyarakat Tahun 2017	62
Grafik 45. Perbandingan Jumlah Layanan Publik BBPOM di Palembang dengan BBPOM di Medan	65
Grafik 46. Perbandingan Jumlah Komunitas yang diberdayakan BBPOM di Palembang dengan BBPOM di Medan	67
Grafik 47. Perbandingan Nilai SAKIP BBPOM di Palembang dengan BBPOM di Medan 2017	69
Grafik 48. Perbandingan Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana sesuai Standar BBPOM di Palembang dengan BBPOM di Medan 2017	70
Grafik 49. Perbandingan Realisasi Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi yang dilaporkan tepat BBPOM di Palembang dengan BBPOM di Medan 2017	71

KATA PENGANTAR



Laporan Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang (BBPOM di Palembang) tahun 2017 disusun dalam rangka menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang dikenal dengan *Good governance* dan *Clean government*. Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tanggal 20 November 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015.

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban Balai Besar POM di Palembang kepada masyarakat dan *stakeholders* dalam mencapai tujuan/ sasaran strategis sebagai **Unit Pelaksana Teknis** BPOM. Laporan Kinerja tahun 2017 merupakan laporan tahun KETIGA dari Renstra keempat BPOM Tahun 2015 – 2019. Disamping sebagai sarana evaluasi atas pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran strategis, pembuatan laporan ini juga sebagai upaya memperbaiki dokumen perencanaan dan pelaksanaan program/ kegiatan tahun selanjutnya, serta penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan guna meningkatkan kinerja untuk tahun-tahun mendatang.

Balai Besar POM di Palembang sudah berupaya kuat meningkatkan kinerja pengawasan dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat dari Obat dan Makanan yang beresiko terhadap kesehatan. Upaya tersebut tercermin dari program dan kegiatan yang seluruhnya mendukung sasaran yang ditetapkan.

Kendala utama di tahun kedua Renstra ini adalah meningkatnya beban kerja serta bertambah luas dan kompleksnya permasalahan pengawasan Obat dan Makanan, sehingga perlu diimbangi dengan penguatan sumber daya manusia yang kompeten dan profesional serta sarana dan prasarana yang memadai, khususnya penguatan laboratorium dan teknologi informasi.

Akhirnya diharapkan Laporan Kinerja yang telah tersusun ini dapat menjadi pertanggungjawaban bagi BBPOM di Palembang dan memberikan kontribusi bagi peningkatan kinerja organisasi dimasa mendatang.

Palembang, Februari 2018

Kepala Balai Besar Pengawas Obat
Dan Makanan di Palembang



Dra. Setia Murni, Apt

NIP. 19580817 198703 2 001

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Balai Besar POM di Palembang Tahun 2017 merupakan informasi tentang Pengukuran Kinerja dan Pengukuran Efektifitas Kegiatan selama tahun 2017. Pengukuran ini menyajikan capaian Perjanjian Kinerja tahun 2017 yang telah ditetapkan sebelumnya yang sesuai dengan Rencana Strategis 2015-2019 Balai Besar POM di Palembang dan Reviu Renstra 2016 serta Petunjuk Operasional Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2017.

Selama tahun 2017, Balai Besar POM di Palembang harus mencapai 3 sasaran yang telah ditetapkan. Pencapaian sasaran tersebut diwujudkan melalui program pengawasan obat dan makanan di Balai Besar POM di Palembang. Berdasarkan pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja yang telah dilakukan secara mandiri, diperoleh gambaran sebagai berikut:

- 1) Dari 3 (tiga) sasaran strategis yang ingin diwujudkan pada tahun 2017, Balai Besar POM di Palembang berhasil dicapai kriteria BAIK.
- 2) Dari 3 (tiga) Sasaran Strategis yang ditargetkan :
 - a. Sasaran Strategis target pertama mencapai kriteria CUKUP. Hasil tersebut didapat dari capaian 5 (lima) indikator yang seluruh indikator dengan kriteria Cukup.
 - b. Sasaran Strategis kedua mencapai kriteria CUKUP, tercapai 1 (satu) indikator kriteria Cukup dan 1 (satu) indikator kriteria Baik.
 - c. Sasaran Strategis ketiga mencapai kriteria CUKUP dari 1 (satu) indikator kegiatan.
- 3) Dari 3 (tiga) Sasaran Strategis yang ditargetkan terdapat Sasaran Kegiatan sebagai berikut :
 - a. Sasaran Strategis 1 (satu) memiliki 4 (empat) Sasaran Kegiatan dengan 5 (lima) indikator capaian dengan hasil memuaskan yaitu: 2 (dua) indikator dengan kriteria Memuaskan, 2 (dua) indikator dengan kriteria Baik dan 1(satu) indikator dengan kriteria Cukup.
 - b. Sasaran Strategis 2 (dua) memiliki 1 (satu) Sasaran kegiatan dengan 2 (dua) indikator dengan rata-rata kriteria Memuaskan terdiri atas 2 indikator Memuaskan.
 - c. Sasaran Strategis 3 (tiga) terbagi menjadi 2 (dua) Sasaran kegiatan dengan 2 (dua) indikator dengan capaian rata-rata Baik dan kedua indikator masing-masing dengan kriteria Baik.
- 4) Pencapaian sasaran kegiatan tersebut diwujudkan melalui pengawasan obat dan makanan di Balai Besar POM di Palembang diwujudkan melalui 16 kegiatan yang terdiri dari 154 subkegiatan pengawasan obat dan makanan di Balai Besar POM di Palembang. Sub kegiatan yang telah berhasil dilaksanakan sebanyak 143 sub kegiatan (92,86%) dan tidak dilaksanakan 11 (7,14%) sub kegiatan. Dari 143 subkegiatan yang telah dilaksanakan tersebut setelah dianalisis dan dievaluasi terdapat 131 (91,61%) subkegiatan yang efisien, 5

(3,50%) subkegiatan tidak efisien, 7 (4,89%) subkegiatan yang tidak dapat dihitung efisiensinya karena 5 sub kegiatan menggunakan dana pusat tanpa mencairkan DIPA Balai Besar POM di Palembang dan 2 subkegiatan menggunakan dana subkegiatan lain pada satu kegiatan yang sama.

Secara garis besar pelaksanaan aspek keuangan ini telah dilaksanakan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas keuangan secara lengkap dan rinci, dipertanggungjawabkan melalui Laporan Realisasi Anggaran Balai Besar POM di Palembang tahun 2017.

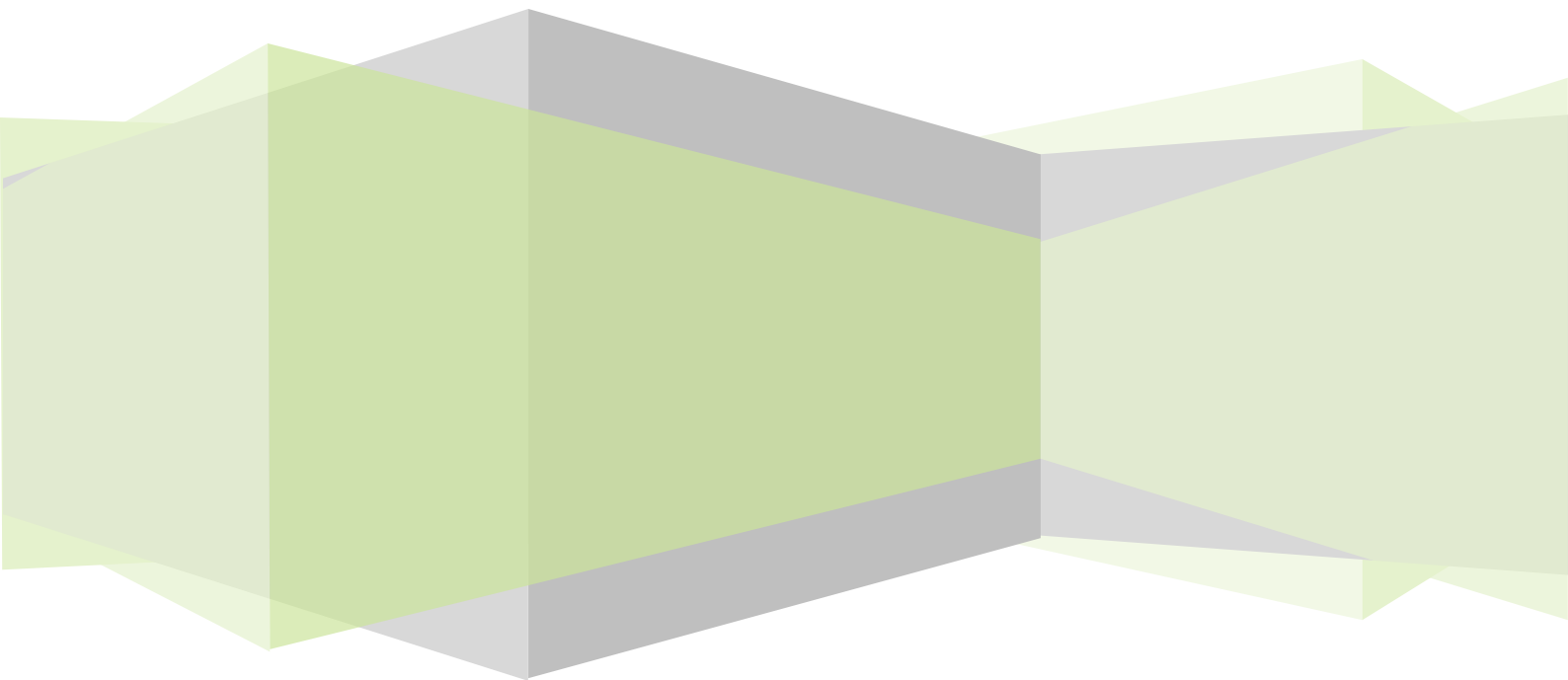
Kendala-kendala yang dihadapi atas sasaran yang belum tercapai dan kegiatan yang belum efisien, adalah sebagai berikut :

1. Masih kurangnya koordinasi dengan kegiatan pusat seperti : Pelatihan fasilitator pasar aman dari bahan berbahaya (Kegiatan Pusat), Peningkatan kompetensi ASN dan Perkuatan bimtek monev, tidak dilaksanakan karena menunggu undangan dari Pusat. Besar POM Di Palembang seharusnya pada triwulan ke-3 dapat dilakukan revisi anggaran karena pada Triwulan IV sudah ada aturan dari KPPN yang menyatakan tidak boleh melakukan revisi anggaran mulai bulan Oktober 2017.
2. Tidak terlaksananya Monitoring dan evaluasi - balai : kegiatan Komunitas yang diberdayakan (Kegiatan Balai)
3. Tidak terlaksananya Perjalanan monitoring kepala balai ke wilayah kerja (Kegiatan Balai)
4. Tidak terlaksananya Reformasi Birokrasi (Kegiatan Balai).
5. Tidak terlaksananya Penggalangan Komitmen terkait revolusi mental.(Kegiatan Balai).
6. Tidak terlaksananya Peningkatan Kompetensi Penyidikan PPNS Balai Besar/Balai POM. (Kegiatan Balai).
7. Tidak terlaksananya Evaluasi Implementasi SPIP. (Kegiatan Balai)
8. Tidak terlaksananya Pemantauan SPIP satker/unit mandiri. (Kegiatan Balai)
9. Tidak terlaksananya Survei indeks kepuasan masyarakat. (Kegiatan Balai).
10. Masih kurangnya koordinasi antara pengawasan *pre* dan *post market*, sehingga pembinaan ke masyarakat dalam rangka pengawasan obat dan makanan tidak optimal.
11. Masih kurangnya jumlah sarana dan prasarana pendukung pengawasan obat dan makanan, mengingat semakin tingginya tuntutan pengawasan kedepan.
12. Masih kurangnya SDM (Sumber Daya Manusia) baik dalam hal jumlah maupun kompetensi di bidang masing-masing.
13. Tidak terlaksananya kegiatan sosialisasi penguatan pengawasan dan akuntabilitas BPOM.

Langkah-langkah antisipatif agar memenuhi target tahun berikutnya, adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan revisi anggaran pada triwulan ke-3 apabila terdapat kegiatan yang tidak dilaksanakan oleh pusat, karena pada tahun 2017 ini pada Triwulan IV anggaran tidak dapat lagi direvisi.
- b. Melaksanakan kegiatan yang tidak terlaksana pada tahun sebelumnya apabila dengan kajian bahwa kegiatan tersebut masih dibutuhkan oleh balai.
- c. Meningkatkan koordinasi antara pengawasan *pre* dan *post market*, sehingga pembinaan ke masyarakat dalam rangka pengawasan obat dan makanan menjadi lebih optimal.
- d. Menambah sarana dan prasarana yang mendukung pengawasan obat dan makanan, seperti pengadaan alat-alat laboratorium, suku cadang, *glassware*, *furniture* pemenuhan infrastruktur, alat komunikasi, komputer dan lain sebagainya.
- e. Meningkatkan kompetensi SDM untuk meningkatkan cakupan kinerja dan sistem pengawasan.
- f. Meningkatkan koordinasi terkait pelaksanaan kegiatan antara pusat dan balai.
- g. Melakukan review kembali terkait target yang telah ditetapkan disesuaikan dengan kondisi terkini yang ada di masyarakat dimana semakin antusiasnya komunitas masyarakat terhadap penyebaran informasi dan KIE oleh Badan POM.

BAB I PENDAHULUAN



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum Organisasi

Berdasarkan Peraturan Kepala BPOM Nomor 14 Tahun 2014, Balai Besar POM di Palembang (BBPOM di Palembang) adalah salah satu Unit Pelaksana Teknis Badan POM tipe A yang memiliki wilayah kerja seluruh wilayah administrasi Provinsi Sumatera Selatan.

BBPOM di Palembang mempunyai tugas dan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

Tugas :

melaksanakan kebijakan di bidang pengawasan obat dan makanan, yang meliputi pengawasan atas produk terapeutik, narkotika, psikotropika, zat adiktif, obat tradisional, kosmetik, produk komplemen serta pengawasan atas keamanan pangan dan bahan berbahaya.

FUNGSI :

1. Penyusunan rencana dan program pengawasan obat dan makanan;
2. Pelaksanaan pemeriksaan secara laboratorium, pengujian dan penilaian mutu produk terapeutik, narkotika, psikotropika zat adiktif, obat tradisional, kosmetik, produk komplemen, pangan dan bahan berbahaya;
3. Pelaksanaan pemeriksaan laboratorium, pengujian dan penilaian mutu produk secara mikrobiologi;
4. Pelaksanaan pemeriksaan setempat, pengambilan contoh dan pemeriksaan sarana produksi dan distribusi;
5. Investigasi dan penyidikan pada kasus pelanggaran hukum;
6. Pelaksanaan sertifikasi produk, sarana produksi dan distribusi tertentu yang ditetapkan oleh Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;
7. Pelaksanaan kegiatan layanan informasi konsumen;
8. Evaluasi dan penyusunan laporan pengujian obat dan makanan;
9. Pelaksanaan urusan tata usaha dan kerumahtanggaan; dan
10. Pelaksanaan tugas lain yang ditetapkan oleh Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sesuai dengan bidang tugasnya

1.2. Struktur Organisasi

Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut, BBPOM di Palembang dibentuk dengan struktur organisasi sebagai berikut:



Gambar 1. Struktur Organisasi BBPOM di Palembang

Masing-masing Bidang, Seksi dan Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas dan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

Bidang pengujian Produk Terapeutik, Narkotika, Psikotropika, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen

Tugas :

Melaksanakan penyusunan rencana dan program serta evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan pemeriksaan secara laboratorium pengujian dan penilaian mutu di bidang produk terapeutik, narkotika, psikotropika, obat tradisional, kosmetik dan produk komplemen

Bidang Pengujian Pangan dan Bahan Berbahaya

Tugas :

Melaksanakan penyusunan rencana dan program serta evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan pemeriksaan secara laboratorium, pengujian dan penilaian mutu di bidang pangan dan bahan berbahaya

Bidang Pengujian Mikrobiologi

Tugas :

Melaksanakan penyusunan rencana dan program serta evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan pemeriksaan secara laboratorium, pengujian dan penilaian mutu secara mikrobiologi

Bidang Pemeriksaan dan Penyidikan

Tugas :

Melaksanakan penyusunan rencana dan program serta evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan pemeriksaan setempat, pengambilan contoh untuk pengujian, pemeriksaan sarana produksi, distribusi dan pelayanan kesehatan serta penyidikan kasus pelanggaran hukum dibidang produk terapeutik, narkotika, psikotropika, zat adiktif lain, obat tradisional, kosmetik, produk komplemen, pangan dan bahan berbahaya

Fungsi :

1. Penyusunan rencana dan program pemeriksaan dan penyidikan obat dan makanan.
2. Pelaksanaan pemeriksaan setempat, pengambilan contoh dan pemeriksaan sarana produksi, distribusi dan instansi kesehatan di bidang produk terapeutik, narkotika, psikotropika dan zat adiktif lain, obat tradisional, kosmetika dan produk komplemen.
3. Pelaksanaan pemeriksaan setempat, pengambilan contoh dan pemeriksaan sarana produksi dan distribusi dibidang pangan dan bahan berbahaya.
4. Pelaksanaan penyidikan kasus pelanggaran hukum
5. Evaluasi dan penyusunan laporan pemeriksaan dan penyidikan obat dan makanan

Seksi Pemeriksaan

Tugas :

Melakukan pemeriksaan setempat, pengambilan contoh untuk pengujian, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi produk terapeutik, narkotika, psikotropika dan zat adiktif lain, obat tradisional, kosmetika, produk komplemen, pangan dan bahan berbahaya

Seksi Penyidikan

Tugas :

Melakukan penyidikan terhadap kasus pelanggaran hukum di bidang terapeutik, narkotika, psikotropika dan zat adiktif lain, obat tradisional, kosmetika, produk komplemen, pangan dan bahan berbahaya

Bidang Sertifikasi dan Layanan Informasi Konsumen

Tugas :

Melaksanakan penyusunan rencana dan program serta evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan sertifikasi produk, sarana distribusi dan distribusi tertentu dan layanan informasi konsumen

Fungsi :

1. Penyusunan rencana dan program sertifikasi produk dan layanan informasi konsumen.
2. Pelaksanaan sertifikasi produk, sarana produksi dan distribusi tertentu
3. Pelaksanaan layanan informasi untuk konsumen.
4. Evaluasi dan penyusunan laporan sertifikasi produk dan layanan informasi konsumen

Seksi Sertifikasi

Tugas :

Melakukan sertifikasi produk, sarana produksi dan distribusi tertentu

Seksi Layanan Informasi Konsumen

Tugas :

Melakukan layanan informasi konsumen

Sub Bagian Tata Usaha**Tugas :**

Memberikan pelayanan teknis dan administrasi di lingkungan BBPOM di Palembang

Kelompok Jabatan Fungsional**Tugas :**

Melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

1.3. Aspek Strategis Organisasi

BBPOM di Palembang mempunyai posisi yang strategis berkaitan dengan tugas utama pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat di bidang obat dan makanan. Produk-produk ini merupakan kebutuhan dasar manusia tetapi sekaligus juga beresiko memberi dampak buruk bagi kesehatan dan keselamatan masyarakat apabila tidak dikelola dengan benar, dipergunakan secara tidak tepat atau disalahgunakan. Karena itu perlu dilakukan pengaturan dan pengawasan yang baik (*Good regulatory practice*) agar keamanan, manfaat dan mutu produk-produk tersebut dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam penyelenggaraan pengawasan tersebut BBPOM di Palembang sebagai UPT BPOM perlu menjaga keseimbangan kepentingan antara perlindungan masyarakat /konsumen, perluasan akses produk bagi masyarakat luas dengan kepentingan strategis lainnya yang berkaitan dengan perekonomian nasional dan pendayagunaan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

1.4. Analisis Lingkungan Strategis**Internal**

Kantor BBPOM di Palembang berdiri di atas tanah seluas 2.892 m² yang berlokasi di Jl. Pangeran Ratu Kelurahan 15 Ulu Kecamatan Jakabaring Kota Palembang. BBPOM di Palembang menempati bangunan dengan berlantai tiga seluas 4.100 m², dimana pembangunan gedung laboratorium baru telah selesai di tahun 2015 lalu dan laboratorium Mikrobiologi dan Pangan telah pindah dari gedung lama ke gedung yang baru begitu pula

aula kantor yang sebelumnya berada dilantai satu gedung lama telah pindah ke gedung baru dengan posisi dilantai dua.

Tanah tempat berdirinya kantor BBPOM di Palembang yang dibangun tahun 2004 milik Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang telah dihibahkan ke BBPOM di Palembang sesuai dengan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor:772/KPTS/BKAD/2017 tanggal 11 Desember 2017 tentang Hibah Tanah Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Yang terletak di Jalan Pangeran Ratu Jakabaring Palembang untuk Kantor Badan Pengawas Obat dan Makanan Palembang . BBPOM di Palembang belum memiliki rumah

untuk Kepala Kantor, dan sampai saat ini masih menempati rumah sewa di Jl. Manunggal RT:037 RW:13 Kelurahan 30 Ilir Kecamatan Ilir Barat II Kota Palembang. Sumber penerangan yang digunakan Gedung BBPOM di Palembang adalah PLN dan Generator. Sarana komunikasi yang dipakai pada gedung BBPOM di Palembang telepon, faksimil, VoIP dan email.

Sumber air yang digunakan di BBPOM di Palembang pada saat ini adalah air PAM (PDAM Tirta Musi) dengan pemakaian rata-rata 270 m³ per bulan. Kendaraan roda empat di BBPOM di Palembang berjumlah 12 buah dan 3 diantaranya adalah mobil laboratorium keliling.

Sumber Daya Manusia

Balai Besar POM Di Palembang per 31 Desember 2017 memiliki 76 orang pegawai yang terdiri dari 9 orang pejabat struktural, 44 orang pejabat fungsional PFM, fungsional tertentu 5 orang (2 orang analis kepegawaian, 1 pranata komputer, 1 arsiparis, 1 perencana) dan 18 orang fungsional umum.

Pada tahun 2017 terdapat 4 pegawai yang memasuki masa pensiun, yaitu Dra. Devy Lidiarty, Apt, Herlina Pardede, Drs. Arnold Sianipar,Apt., M.Pharm dan Nikson Silitonga, dan terdapat 1 orang yang pensiun dini, yaitu Idham Rianom, S.Sos. Ada juga pegawai Balai Besar POM di Palembang yang pindah tugas ke Balai POM Di Jambi yaitu Baby Amelia Lembek, A.Md, dan terdapat Pegawai yang promosi jabatan menjadi Kepala Balai POM di Bengkulu yaitu, Drs. Burhanuddin Gumay, Apt, MM.

Jumlah Peralatan Utama Laboratorium Pengujian

BBPOM di Palembang hingga akhir tahun 2017 memiliki peralatan laboratorium pengujian 333 item yang berfungsi baik/terkalibrasi dari total 380 item.

Anggaran

Sumber anggaran pelaksanaan program dan kegiatan BBPOM Di Palembang berasal dari APBN sesuai DIPA BBPOM di Palembang tahun 2016 nomor DIPA SP DIPA 063-01.2.432841/2017 tanggal 07 Desember 2016. Anggaran Program Pengawasan Obat dan Makanan BBPOM di Palembang, terdiri atas :

Rupiah Murni	: Rp. 21.939.243.000
PNBP	: Rp. 1.150.000.000
T o t a l	: Rp. 23.089.243.000

Dengan realisasi anggaran 2017:

Rupiah Murni	:Rp. 20.058.340.000
PNBP	:Rp. 1.084.494.425,-
T o t a l	:Rp. 21.143.240.765,-

Di samping itu Balai Besar POM Di Palembang menerima pendapatan dari PNBP (Pendapatan Negara Bukan Pajak) sejumlah Rp. 82.640.000,- yang berasal dari pengujian 262 item sampel, 67 pelayanan sertifikasi.

Eksternal

BBPOMdi Palembang merupakan Unit Pelaksana Teknis BPOM sesuai Peraturan Kepala BPOM No. 14 Tahun 2014 dengan wilayah kerja adalah sebanyak 17 Kabupaten/ Kota terdiri dari 4 (empat) kota dan 13 (tiga belas) kabupaten yang meliputi 232 kecamatan dengan penyebaran sebagai berikut:

I. KOTA		Ibukota	Jumlah Kecamatan
1.	Palembang	Palembang	16
2.	Prabumulih	Prabumulih	6
3.	Pagaralam	Pagaralam	5
4.	Lubuk Linggau	Lubuk Linggau	8
II. KABUPATEN		Ibukota	Jumlah Kecamatan
1.	Ogan Ilir	Indralaya	16
2.	Ogan Komering Ilir	Kayu Agung	18

3.	Ogan Komering Ulu	Baturaja	12
4.	OKU Selatan	Muara Dua	19
5.	OKU Timur	Martapura	20
6.	Empat Lawang	Tebing Tinggi	9
7.	Lahat	Lahat	22
8.	Muara Enim	Muara Enim	20
9.	Musi Rawas	Muara Beliti	14
10.	Musi Banyu Asin	Sekayu	14
11.	Banyuasin	Pangkalan Balai	17
12.	Penukal Abab Pematang Ilir	Talang Ubi	5
13.	Musi Rawas Utara	Muara Rupit	7

Tabel 1. Kabupaten/ Kota di Propinsi Sumatera Selatan



Gambar 2. Propinsi Sumatera Selatan

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan di bidang pengawasan obat dan makanan dan pengalaman pada tahun-tahun sebelumnya, berikut ini disampaikan beberapa isu strategis yang berdaya ungkit tinggi terhadap pencapaian misi Balai Besar POM di Palembang, antara lain :

- **Di bidang pengawasan Obat;** upaya pemberantasan obat palsu dan pendistribusian obat keras di sarana yang tidak berhak dan tanpa kewenangan seperti di toko obat menjadi prioritas, mengingat produk obat memiliki resiko tinggi dan sangat berdampak bagi kesehatan manusia. Disamping itu pada Tahun 2017 juga merebak kasus PCC

(Paracetamol, Carisoprodol dan Caffein) dan penyalahgunaan Obat-obat tertentu serta prekursor.

- **Di bidang pengawasan Pangan;** Balai Besar POM di Palembang juga terus memperkuat jejaring surveilan keamanan pangan dengan *stakeholder* terkait serta melakukan evaluasi untuk mengkaji paparan bahan tambahan pangan terhadap pangan terutama untuk pangan jajanan anak sekolah yang beredar di Provinsi Sumatera Selatan.

Kerja sama lintas sektor amat penting dalam pengawasan terhadap distributor/pengecer bahan berbahaya untuk mengendalikan penggunaan formalin, boraks, zat warna yang bukan untuk makanan dan bahan tambahan lain dalam produk pangan. Program sertifikasi dan layanan informasi konsumen juga penting untuk memberikan informasi dan edukasi pada masyarakat mengenai pentingnya pengawasan keamanan pangan.

Pengawasan pangan secara langsung ke distributor pangan dan retail pangan juga aktif dilakukan dalam pengawasan penyimpangan pada penerapan Cara Ritel Pangan yang Baik dan Produk Pangan tanpa izin edar, pangan rusak kemasan, tidak memenuhi ketentuan label/penandaan, izin miras dan sebagainya.

- **Di bidang pengawasan Obat Tradisional;** pengawasan perlu ditingkatkan terutama pada obat tradisional impor dan tidak terdaftar. Disamping itu, mengingat masih banyaknya obat tradisional yang mengandung bahan kimia obat, maka Balai Besar POM di Palembang perlu tetap melanjutkan upaya pembinaan dan penegakan hukum terhadap industri yang melanggar.
- **Di bidang pengawasan Kosmetika,** masih ditemukannya kosmetika tidak terdaftar dan mengandung bahan berbahaya, serta dengan adanya registrasi secara notifikasi menuntut Balai Besar POM di Palembang untuk lebih fokus dalam pengawasan produk tersebut.

1.5 Isu Strategis

Penggunaan Bahan Tambahan Pangan yang dilarang seperti Formalin sebagai pengawet pada tahu dan mie basah masih banyak ditemukan di Propinsi Sumatera Selatan. Tingginya *demand* akan mie basah dan tahu sebagai bahan baku pembuatan makanan tradisional Propinsi Sumatera Selatan yakni mpek-mpek tahu, model dan rujak mie membuat sebagian produsen tergiur untuk memproduksi dalam jumlah besar dan menggunakan Formalin sebagai pengawet agar produk bisa bertahan lama walaupun didistribusikan ke seluruh Kabupaten/Kota di Propinsi Sumatera Selatan.

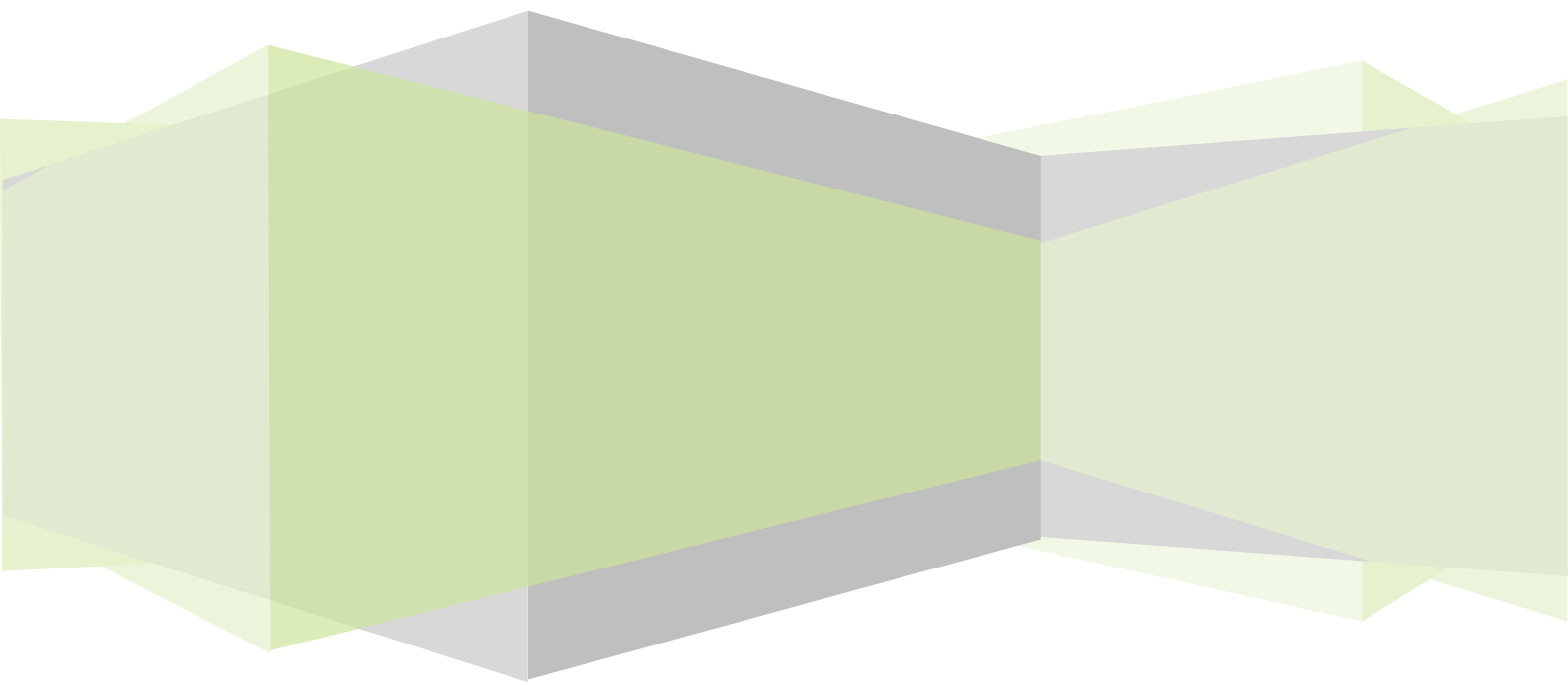
Penggunaan Bahan Berbahaya dalam pangan disinyalir karena kurangnya kepedulian masyarakat terhadap keamanan pangan, terutama masyarakat golongan ekonomi menengah

kebawah. Disamping itu mudahnya akses untuk memperoleh Bahan Berbahaya tersebut juga disebut-sebut menjadi penyebab maraknya penyalahgunaan Bahan Berbahaya tersebut pada produk Pangan. Tidak cukup sampai disitu saja, keefektifan fungsi dari Bahan Berbahaya tersebut untuk menghasilkan efek yang diinginkan dalam pangan serta dampak kesehatan yang tidak langsung dirasakan menambah panjang alasan pelaku usaha untuk tetap menggunakan Bahan Berbahaya tersebut pada produk yang mereka hasilkan.

Keamanan Pangan merupakan syarat penting yang harus mendapat perhatian, terutama untuk pangan yang hendak dikonsumsi oleh semua lapisan masyarakat. Pelaku Usaha sebagai produsen pangan terutama Industri Rumah Tangga wajib memahami prinsip-prinsip Keamanan Pangan (Hygiene Sanitasi dan Penggunaan Bahan Tambahan Pangan yang benar) sehingga produk yang beredar memenuhi standar mutu dan keamanan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah. Permasalahan Keamanan Pangan serta potensi risiko dapat terjadi di setiap mata rantai pangan, sehingga perlu upaya-upaya secara komprehensif dan terus-menerus yang bertujuan agar pangan yang di konsumsi tetap aman dan bermutu.

Untuk itu perlu dilakukan kemitraan dan advokasi antara Balai Besar POM di Palembang dengan Lintas Sektor terkait maupun dengan SKPD Pemerintah Propinsi, dan Pemerintah Kabupaten/ Kota di Provinsi Sumatera Selatan. Advokasi terutama terhadap pentingnya Keamanan Pangan dalam rangka melindungi masyarakat dari pangan yang beresiko terhadap kesehatan serta meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat.

BAB II PERENCANAAN KINERJA



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS TAHUN 2015 - 2019

Penyusunan Renstra Balai Besar POM di Palembang telah mengacu pada Renstra BPOM tahun 2015 – 2019 yaitu terkait dengan Pengawasan Obat dan Makanan di Balai/Balai Besar POM.

Sasaran strategis ini disusun berdasarkan visi dan misi yang ingin dicapai BBPOM di Palembang, dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya serta infrastruktur yang dimiliki BBPOM di Palembang. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun (2015-2019) ke depan diharapkan BBPOM di Palembang akan dapat mencapai 3 (tiga) sasaran strategis. Sasaran strategis untuk Balai Besar POM di Palembang sebagai salah satu UPT dari BPOM sebagai berikut :

Sasaran Strategis 1: Menguatnya Sistem Pengawasan Obat & Makanan

Sistem pengawasan Obat dan Makanan yang diselenggarakan oleh BPOM merupakan suatu proses yang komprehensif dan bersifat *full spectrum*, mencakup pengawasan *pre-market* dan *post-market*. Sistem itu terdiri dari: **Pertama**, standarisasi yang merupakan fungsi penyusunan standar, regulasi, dan kebijakan terkait dengan pengawasan Obat dan Makanan. **Kedua**, penilaian (*pre-market evaluation*) yang merupakan evaluasi produk sebelum memperoleh nomor ijin edar dan akhirnya dapat diproduksi dan

diedarkan kepada konsumen. **Ketiga**, adalah pengawasan setelah beredar (*post-market control*) yang dilakukan dengan melakukan sampling produk Obat dan Makanan yang beredar, serta pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan. **Keempat**, pengujian laboratorium. Produk yang disampling berdasarkan risiko kemudian diuji melalui laboratorium guna mengetahui apakah Obat dan Makanan tersebut telah memenuhi syarat keamanan, khasiat/manfaat dan mutu. Hasil uji

laboratorium ini merupakan dasar ilmiah yang digunakan sebagai dasar dalam menentukan produk yang tidak memenuhi syarat dan kemudian akan ditarik dari peredaran. **Kelima**, adalah penegakan hukum di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Dalam bisnis Obat dan Makanan yang relatif menjanjikan keuntungan yang besar, rentan terhadap pelanggaran dari pelaku usaha. Untuk itu diperlukan adanya suatu penegakan hukum apabila terjadi pelanggaran terkait Obat dan Makanan.

Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka indikator sasaran

strategis ini pada Balai Besar POM di Palembang yang juga merupakan Indikator Kinerja Utama adalah sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama (Indikator Kinerja SS1):

1. Persentase obat yang memenuhi syarat 96,5% pada akhir tahun 2019.
2. Persentase obat tradisional yang memenuhi syarat 91,2% pada akhir tahun 2019.
3. Persentase kosmetik yang memenuhi syarat 98,4% pada akhir tahun 2019.
4. Persentase suplemen kesehatan yang memenuhi syarat 99,2% pada akhir tahun 2019.
5. Persentase makanan yang memenuhi syarat 93,35% pada akhir tahun 2019.

Definisi operasional yang merupakan cara perhitungan dari masing-masing indikator diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

Definisi Operasional Obat Yang Memenuhi Syarat :

- a. Obat yang mendapatkan NIE dari Badan POM.
- b. Yang dimaksud dengan obat adalah obat bebas, obat bebas terbatas, obat wajib apotek, obat keras, psikotropika dan narkotika (tidak termasuk OT)
- c. Obat Memenuhi Syarat (MS) ditetapkan melalui uji laboratorium.
- d. Kategori obat yang disampling sesuai dengan pedoman sampling Obat dan Makanan.
- e. Jumlah produk obat TMS dihitung berdasarkan satuan bets.

Definisi Operasional Obat Tradisional Yang Memenuhi Syarat:

- a. Obat Tradisional yang mendapatkan NIE dari Badan POM.
- b. Obat Tradisional (OT) yang memenuhi syarat ditetapkan melalui pengujian laboratorium.
- c. Kategori Obat Tradisional yang diuji sesuai dengan pedoman sampling Obat dan Makanan.

Definisi Operasional Kosmetik yang Memenuhi Syarat:

- a. Kosmetik yang mendapatkan notifikasi dari BPOM
- b. Kosmetik yang memenuhi syarat ditetapkan melalui pengujian laboratorium.
- c. Kategori kosmetik yang diuji sesuai dengan pedoman sampling Obat dan Makanan.

Defenisi Operasional Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Syarat:

- a. Suplemen Kesehatan (SK) yang mendapatkan NIE dari BPOM.
- b. Suplemen Kesehatan (SK) yang memenuhi syarat ditetapkan melalui pengujian laboratorium.
- c. Kategori suplemen kesehatan yang diuji sesuai dengan pedoman sampling Obat dan Makanan.

Defenisi Operasional Makanan yang Memenuhi Syarat:

- a. Makanan adalah pangan olahan yang mendapatkan NIE dari Badan POM.
- b. Makanan MS ditetapkan melalui uji laboratorium.
- c. Kategori pangan yang diuji sesuai dengan pedoman sampling Obat dan Makanan.

**Sasaran Strategis 2: :
Meningkatnya kemandirian pelaku usaha,
kemitraan dengan pemangku kepentingan,
dan partisipasi masyarakat.**

Sasaran strategis ini berupaya untuk mengakomodasi kegiatan yang mendukung pada peningkatan daya saing, yaitu melalui jaminan mutu Obat dan Makanan. Pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan harus didukung dalam menghadapi tantangan perdagangan bebas. Salah satunya adalah dengan memberikan dukungan *regulatory* (sistem pengawasan) kepada pelaku usaha dengan intensif. Sementara terkait dengan faktor lain yang menjadi variabel penentu dalam meningkatkan kemudahan usaha, adalah daya saing. Produk yang mendapatkan kemudahan dalam berusaha akan mampu mempunyai daya

saing baik di pasar regional maupun global.

Untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis ini, maka indikator sasaran strategis ini pada Balai Besar POM di Palembang sebagai berikut:

1. Tingkat kepuasan Masyarakat, dengan target pada akhir tahun 2019.
2. Jumlah Kabupaten/Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan, dengan target 17 Kabupaten/Kota pada akhir tahun 2019.

Tingkat kepuasan masyarakat :

Tingkat kepuasan masyarakat adalah tolak ukur untuk menilai kualitas pelayanan yang diperoleh dari hasil survey kepuasan masyarakat

Tatacara pelaksanaan survey mengacu pada pedoman yang disiapkan inspektorat Badan Pengawas Obat dan Makanan mengacu pada pedoman terkini (PermenPAN No. 16 Tahun 2014 c.

Target dinyatakan dalam angka.

Jumlah Kabupaten/Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan :

- a. Komitmen untuk pelaksanaan adalah Perjanjian (keterikatan) Kota/Kab untuk melakukan pelaksanaan pengawasan obat, kosmetik, obat tradisional, pangan dan bahan berbahaya yang sering disalahgunakan dalam pangan, baik yang dilakukan secara mandiri dan atau terpadu melalui pengawasan/pemeriksaan, advokasi/penyuluhan, pembentukan tim terpadu, pertemuan dan kegiatan lainnya yang dapat memperkuat pengawasan
- b. Alokasi anggaran adalah alokasi anggaran daerah baik yang berupa APBD Kab/Kota dan sumber pendapatan yang sah dan tidak mengikat, yang dikelola oleh SKPD terkait

Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya Kualitas Kapasitas Kelembagaan BPOM

Untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis ini, maka indikator sasaran strategis ini pada Balai Besar POM di Palembang adalah:

1. Nilai SAKIP Balai Besar POM di Palembang dari BPOM, dengan target A pada akhir tahun 2019.

Defenisi operasional :

Nilai SAKIP diukur berdasarkan hasil penilaian SAKIP yang dilakukan oleh APIP Badan POM

Adapun ringkasan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Balai Besar POM di Palembang periode 2015-2019 sesuai dengan penjelasan di atas, adalah sebagai berikut :

Tabel 2. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Balai Besar POM di Palembang periode 2015-2019

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA
Obat dan Makanan Aman Meningkatkan Kesehatan Masyarakat dan Daya Saing Bangsa	Meningkatkan sistem pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko untuk melindungi masyarakat	Meningkatnya jaminan produk Obat dan Makanan aman	Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase obat yang memenuhi syarat*); 2. Persentase obat Tradisional yang memenuhi syarat*); 3. Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat*); 4. Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat*); 5. Persentase makanan yang memenuhi syarat*).
	Mendorong kemandirian pelaku usaha dalam memberikan jaminan keamanan Obat dan Makanan serta memperkuat kemitraan dengan pemangku kepentingan.	Meningkatnya daya saing Obat dan Makanan di pasar lokal dan global dengan menjamin mutu dan mendukung inovasi	Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkat Kepuasan masyarakat; 2. Jumlah Kabupaten/ Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan
	Meningkatkan kapasitas kelembagaan BPOM		Meningkatnya Kualitas Kapasitas Kelembagaan BPOM	1. Capaian pelaksanaan Nilai SAKIP Balai Besar POM di Palembang dari BPOM.

*) Indikator Kinerja Utama BBPOM di Palembang

Tabel 3. Program/Kegiatan Strategis, Sasaran Program/Kegiatan, dan Indikator Balai Besar POM di Palembang

PROGRAM	SASARAN PROGRAM	KEGIATAN STRATEGIS	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR
PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	Menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan	Pengawasan Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Palembang	<ol style="list-style-type: none"> Meningkatnya kualitas sampling dan pengujian terhadap produk obat dan makanan yang beredar Meningkatnya kualitas sarana produksi yang memenuhi standar Meningkatnya kualitas sarana distribusi yang memenuhi standar Meningkatnya hasil tindak lanjut penyidikan terhadap Pelanggaran Obat dan Makanan 	<ol style="list-style-type: none"> Jumlah sample yang diuji menggunakan parameter kritis Pemenuhan target sampling produk Obat di sektor public (IFK) Persentase cakupan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan Persentase cakupan pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan Jumlah Perkara di bidang Obat dan Makanan
	Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat		Meningkatnya kerjasama, komunikasi, informasi dan edukasi	<ol style="list-style-type: none"> Jumlah layanan publik Jumlah komunitas yang diberdayakan
	Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan Balai BPOM		<ol style="list-style-type: none"> Pengadaan Sarana dan Prasarana yang Terkait Pengawasan Obat dan Makanan 	<ol style="list-style-type: none"> Persentase pemenuhan sarana dan prasarana sesuai standar Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu

Dari indikator kinerja tersebut di atas, ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) BBPOM di Palembang adalah :

1. Persentase obat yang memenuhi syarat.
2. Persentase obat tradisional yang memenuhi syarat .
3. Persentase kosmetik yang memenuhi syarat.
4. Persentase suplemen kesehatan yang memenuhi syarat ..
5. Persentase makanan yang memenuhi syarat.

2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2017

Sesuai dengan Peraturan Menteri PAN dan RB nomor 53 tahun 2014, maka Balai Besar POM di Palembang sebagai unit kerja Eselon II wajib menyusun Perjanjian Kinerja yang merupakan komitmen Kepala Balai Besar POM di Palembang sebagai Pelaksana Pengawas Obat dan Makanan di Provinsi Sumatera Selatan dengan Kepala Badan POM RI dengan tetap meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur. Perjanjian Kinerja Balai Besar POM di Palembang Tahun 2017 dituangkan dalam Pernyataan Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi Kinerja per triwulan. Perjanjian Kinerja Tahun 2017 dilakukan perubahan indikator sesuai dengan surat review indikator yang telah dikirimkan oleh BBPOM di Palembang ke Rorenku pada tahun 2016. (terlampir). Hal ini terjadi karena melihat tren pencapaian pada tahun sebelumnya beberapa pencapaian indikator kinerja utama sudah melampaui target nilai pada akhir RPJMN (2019). Namun data dari review indikator tidak serta merta menjadi acuan yang berlaku seterusnya, karena akan dilakukan pengkajian kembali pada saat penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2018.

Adapun Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Balai Besar POM di Palembang akan disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 4. Perjanjian Kinerja BBPOM di Palembang 2017

Sasaran Program/Kegiatan		Indikator Kinerja		Target
(1)		(2)		(3)
1.	Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan	1.	Persentase Obat yang memenuhi syarat	97,23%
		2.	Persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat	89,49%
		3.	Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat	98,85%
		4.	Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat	98,40%
		5.	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	92,95%
2.	Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasimasyarakat.	1.	Tingkat Kepuasan Masyarakat	84,00%
		2.	Jumlah Kabupaten / Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan	17
3.	Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan BPOM	Nilai SAKIP BBPOM di Palembang oleh Badan POM RI		BB
Menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan				
1	Meningkatnya kualitas sampling dan pengujian terhadap produk Obat dan Makanan yang beredar	1.	Jumlah sampel yang diuji menggunakan parameter kritis	2500
		2.	Pemenuhan target sampling produk obat di sektor publik (IFK)	100,00%
2	Meningkatnya kualitas sarana produksi yang memenuhi standar	Persentase cakupan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan		13,40%
3	Meningkatnya kualitas sarana distribusi yang memenuhi standard	Persentase cakupan pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan		33,19%

4	Meningkatnya hasil tindak lanjut penyidikan terhadap Pelanggaran Obat dan Makanan	Jumlah perkara di bidang Obat dan Makanan	10
Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat			
1	Meningkatnya kerjasama, komunikasi, informasi dan edukasi	1 Jumlah layanan publik BBPOM di Palembang	310
		2 Jumlah komunitas yang diberdayakan	17
Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan BBPOM di Palembang			
1	Pengadaan Sarana dan Prasarana yang Terkait Pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan sarana prasarana sesuai standar	85,00%
2	Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, Keuangan dan Evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	10

Tabel 5. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) Tahun 2017:

NO	SASARAN STRATEGIS/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	TARGET (Kumulatif)				REALISASI				KET
				TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	
1	Menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan	1. Persentase Obat yang memenuhi syarat	97,23%	100%	99,10%	98,20%	97,23%					
		2. Persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat	89,49%	90%	89,49%	89,00%	89,49%					
		3. Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat	98,85%	100%	99,53%	99,06%	98,85%					
		4. Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat	98,40%	100%	99,47%	98,94%	98,40%					
		5. Persentase Makanan yang memenuhi syarat	92,95%	94,00%	93,65%	93,30%	92,95%					
2	Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat	1. Tingkat Kepuasan Masyarakat	84%				84%					
		2. Jumlah Kabupaten/Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan	17	4	8	12	17					
	Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan BPOM	Nilai SAKIP dari BPOM	BB				BB					
Menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan												
1	Meningkatnya kualitas sampling dan pengujian terhadap produk obat dan makanan yang beredar	Jumlah sampel yang diuji menggunakan parameter kritis	2500	447	1021	1590	1.827					
		Pemenuhan target sampling produk obat di sektor publik (IFK)	100%	35%	70%	90%	100%					

2	Meningkatnya kualitas sarana produksi yang memenuhi standar	Persentase cakupan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan	13,40%	1,00%	5,13%	9,26%	13,40%						
3	Meningkatnya kualitas sarana distribusi yang memenuhi standard	Persentase cakupan pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan	33,19%	8,00%	16,39%	24,78%	33,19%						
4	Meningkatnya hasil tindaklanjut penyidikan terhadap Pelanggaran Obat dan Makanan	Jumlah perkara di bidang Obat dan Makanan	10	2	5	8	10						
Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat													
1	Meningkatnya kerjasama, komunikasi, informasi dan edukasi	1. Jumlah layanan publik BB/BPOM	310	65	166	231	310						
		2. Jumlah komunitas yang diberdayakan	17	3	8	14	17						
Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan Balai BPOM													
1	Pengadaan Sarana dan Prasarana yang Terkait Pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan sarana prasarana sesuai standar	85%	82%	83%	84%	85%						
2	Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, Keuangan dan Evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	10	3	5	8	10						

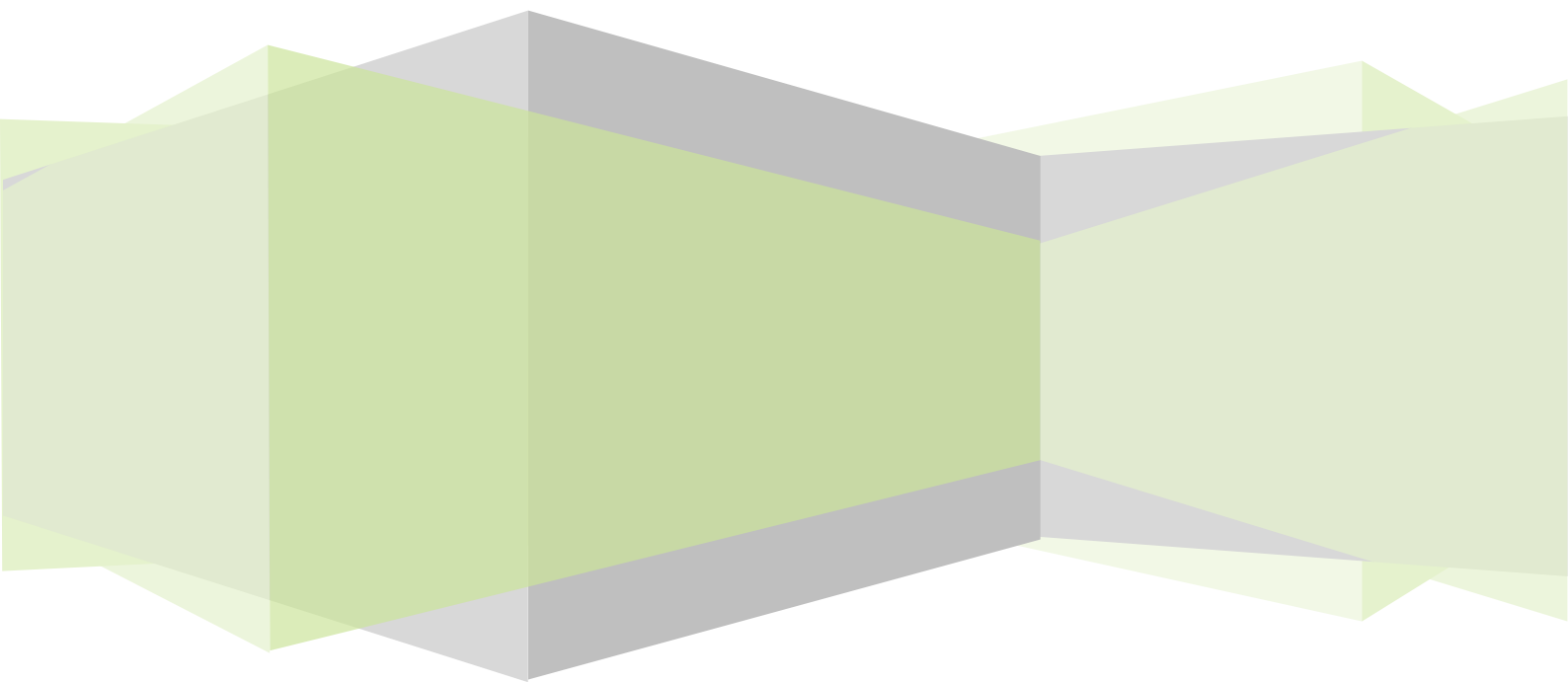
2.3. Kriteria Pencapaian Indikator

Kriteria penilaian capaian kinerja yang digunakan dalam laporan kinerja ini adalah sebagai berikut:

Tabel 6. Kriteria Penilaian Capaian Kinerja

Kriteria	Capaian Target Indikator
Memuaskan	$100% < \chi \leq 125%$
Baik	100%
Cukup	$75% \leq \chi < 100%$
Kurang	$\chi < 75%$
Tidak dapat disimpulkan	$\chi > 125%$

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Sasaran Strategis BBPOM di Palembang yang merupakan penjabaran dari misi dan tujuan strategis yang telah ditetapkan menggambarkan sesuatu yang hendak dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dan dialokasikan menjadi target sasaran tahunan melalui program dan kegiatan yang dilakukan. Pengukuran kinerja tahun 2017 dilakukan dengan cara membandingkan target kinerja dan realisasi kinerja setiap indikator dari sasaran strategis dan sasaran kegiatan sesuai Perjanjian Kinerja tahun 2017 dan Petunjuk Operasional Kegiatan tahun 2017 (terkait anggaran), serta membandingkan capaian kinerja dengan Balai lain. Realisasi kinerja dihitung berdasarkan definisi operasional setiap indikator yang ditetapkan pada saat perencanaan kinerja pada Renstra 2015-2019. Selanjutnya dihitung persentase capaian kinerja untuk masing – masing indikator .

Sebagaimana telah diuraikan dalam Bab II, dalam Renstra Balai Besar POM di Palembang tahun 2015-2019 ditetapkan 3 sasaran strategis dan 7 sasaran kegiatan untuk mencapai tujuan strategis sesuai dengan visi BPOM 2015-2019 “Obat dan Makanan Aman Meningkatkan Kesehatan Masyarakat dan Daya Saing Bangsa”. Untuk mengukur capaian ke 3 sasaran tersebut, ditetapkan 8 indikator sasaran strategis dan 9 indikator sasaran kegiatan. Indikator Kinerja BBPOM di Palembang sudah diturunkan menjadi indikator Eselon III dan Eselon IV (sesuai surat Plt.Kepala BBPOM di Palembang Nomor : OR.04.214.06.16.1293 tanggal 10 Juni 2016).

- Sasaran 1 yaitu : Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan memiliki 5 indikator sasaran strategis dan 4 sasaran kegiatan dengan 5 indikator ,
- Sasaran 2 yaitu : Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat memiliki 2 indikator sasaran strategis dan 1 sasaran kegiatan dengan 2 indikator
- Sasaran 3 yaitu : Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan BBPOM di Palembang memiliki 1 indikator sasaran strategis dan 2 sasaran kegiatan dengan 2 indikator

INDIKATOR KINERJA ESELON III
Bidang Pemdik (Seksi Pemeriksaan dan Seksi Penyidikan)
Balai Besar POM Di Palembang

Strategic Objective	KPI
Menguatnya sistem pengawasan obat dan makanan	Persentase obat yang memenuhi syarat
	Persentase obat Tradisional yang memenuhi syarat
	Persentase kosmetik yang memenuhi syarat
	Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat
	Persentase Makanan yang memenuhi syarat
Meningkatnya kualitas sampling dan pengujian terhadap produk Obat dan makanan yang beredar	Pemenuhan target sampling produk Obat di sektor publik (IFK)
Meningkatnya kualitas sarana produksi yang memenuhi standar	Persentase cakupan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan
Meningkatnya kualitas sarana distribusi yang memenuhi standar	Persentase cakupan pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan
Meningkatnya tindak lanjut penyidikan terhadap pelanggaran obat dan makanan	Jumlah perkara dibidang obat dan makanan

Tabel 7. Indikator Eselon 3 Bidang Pemdik dan Eselon IV Seksi Pemeriksaan dan Penyidikan

INDIKATOR KINERJA ESELON III
Bidang Pengujian (Teranokoko, Pangan dan Mikrobiologi)
Balai Besar POM Di Palembang

Strategic Objective	KPI
Menguatnya sistem pengawasan obat dan makanan	Persentase obat yang memenuhi syarat
	Persentase obat Tradisional yang memenuhi syarat
	Persentase kosmetik yang memenuhi syarat
	Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat
	Persentase Makanan yang memenuhi syarat
Meningkatnya kualitas sampling dan pengujian terhadap produk Obat dan makanan yang beredar	Jumlah sampel yang diuji menggunakan parameter kritis

Tabel 8. Indikator Eselon 3 Bidang Pengujian (Teranokoko, Pangan & Mikrobiologi)

**INDIKATOR KINERJA ESELON III dan IV Bidang Serlik
Balai Besar POM Di Palembang**

Strategic Objective	KPI
Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat	Tingkat Kepuasan Masyarakat
	Jumlah Kabupaten/Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan obat dan makanan
Meningkatnya kerjasama, komunikasi, informasi dan edukasi	Jumlah Layanan publik BB/BPOM
	Jumlah komunitas yang diberdayakan

Tabel 9. Indikator Kinerja Eselon 3 Bidang Serlik dan Eselon 4 Seksi Layanan Informasi Konsumen dan Seksi Sertifikasi

**INDIKATOR KINERJA ESELON IV Sub Bag. Tata Usaha
Balai Besar POM Di Palembang**

Strategic Objective	KPI
Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan BPOM	Nilai SAKIP Balai Besar POM di Palembang dari BPOM
Pengadaan Sarana dan Prasarana yang Terkait Pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan sarana prasarana sesuai standar
Penyusunan perencanaan, Penganggaran Keuangan dan Evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu.

Tabel 10. Indikator Kinerja Eselon 4 Sub Bagian Tata Usaha

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Pada bagian Capaian Kinerja Organisasi disajikan hasil pengukuran kinerja dari masing-masing pernyataan kinerja sasaran strategis Balai Besar POM di Palembang guna memberikan gambaran lebih lanjut tentang efisiensi dan efektifitas kegiatan yang dilaksanakan pada tahun berjalan. Analisis capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan realisasi kinerja tahun 2017 terhadap target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dan Rencana Kinerja Tahunan, membandingkan realisasi kinerja dengan dokumen Renstra yang belum direviu, membandingkan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2017 dengan tahun lalu, membandingkan realisasi kinerja tahun 2017 dengan target jangka menengah (2019) yang

terdapat dalam dokumen perencanaan strategis, membandingkan realisasi kinerja BBPOM di Palembang tahun 2017 dengan BBPOM di Medan, analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya serta melakukan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan.

Balai Besar POM di Palembang telah berhasil mencapai 2 sasaran strategis yang telah ditetapkan dan belum berhasil mencapai 1 sasaran strategis seperti tergambar pada tabel 9 dibawah ini.

Sistem pelaporan kinerja yang digunakan Balai Besar POM di Palembang pada tahun 2017 adalah melalui aplikasi online e-performance.pom.go.id yang diinput secara rutin setiap triwulan. Aplikasi penunjang lain adalah Monev DJA (SMART) perbulan, Monev Bappenas (e-Monev PP 39) per triwulan dan Sismon TEPR (Pelaporan Realisasi Barang dan Jasa dari LKPP)

Berikut adalah capaian kinerja dari Balai Besar POM Di Palembang selama tahun 2017:

NO.	SASARAN STRATEGIS	% CAPAIAN	KRITERIA
1.	Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan	97,82%	Cukup
2.	Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat	101,30%	Memuaskan
3.	Meningkatnya Kualitas Kapasitas Kelembagaan BPOM	100,87%	Memuaskan
Rata-rata		100,00%	Baik

Tabel 11. Capaian Kinerja Sasaran Strategis dari BBPOM di Palembang selama Tahun 2017

Berikut adalah capaian indikator Kinerja Utama (IKU) Balai Besar POM di Palembang 2017:

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria Capaian	
Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan	1	Persentase obat yang memenuhi syarat	97,23%	97,09%	99,86%	Cukup
	2	Persentase obat Tradisional yang memenuhi syarat	89,49%	86,22%	96,35%	Cukup
	3	Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat	98,85%	96,30%	97,42%	Cukup
	4	Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat	98,40%	97,71%	99,30%	Cukup
	5	Persentase makanan yang memenuhi syarat	92,95%	89,38%	96,16%	Cukup
	Rata-Rata				97,82%	Cukup

Tabel 12. Perbandingan antara target dan realisasi Indikator kinerja Utama Tahun 2017

Hasil pencapaian sasaran strategis Balai Besar POM di Palembang tahun 2017 tidak berbeda jauh dengan pencapaian BBPOM di Medan. 2 sasaran strategis mencapai hasil yang memuaskan, sedangkan 1 sasaran strategis hasilnya cukup.

NO.	SASARAN STRATEGIS	% CAPAIAN BBPOM DI PALEMBANG	KRITERIA	% CAPAIAN BBPOM DI MEDAN	KRITERIA
1.	Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan	97,82%	Cukup	112,13%	Memuaskan
2.	Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat	101,30%	Memuaskan	102,50%	Memuaskan
3.	Meningkatnya Kualitas Kapasitas Kelembagaan BPOM	100,87%	100,87%	90,47%	Cukup

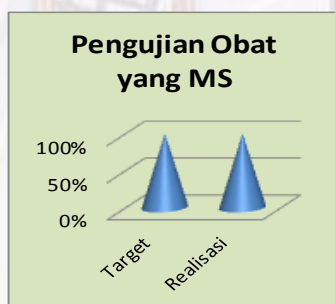
Tabel 13. Capaian Sasaran Strategis BBPOM di Palembang dan BBPOM di Medan Tahun 2017

Analisis Akuntabilitas Kinerja (Penjelasan Capaian Sasaran Strategis) :

Sasaran Strategis 1 : Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan Capaian : Cukup

1. Persentase Obat yang Memenuhi Syarat

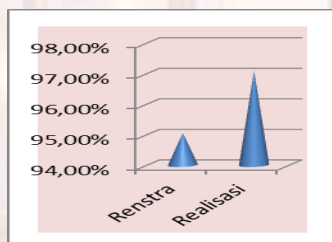
a. Perbandingan Realisasi dan Target di Perjanjian Kinerja 2017



Grafik 1. Perbandingan Realisasi dan Target 2017 Obat MS

Hasil pengujian obat selama tahun 2017 menunjukkan persentase obat yang memenuhi syarat adalah 97,09%, lebih rendah dari angka yang ditargetkan (97,23%) dengan capaian 99,86 % dengan kriteria Cukup. Sampling Obat tahun 2017 sebanyak 516 sampel dan sebanyak 516 sampel diuji dengan menggunakan parameter uji kritis.

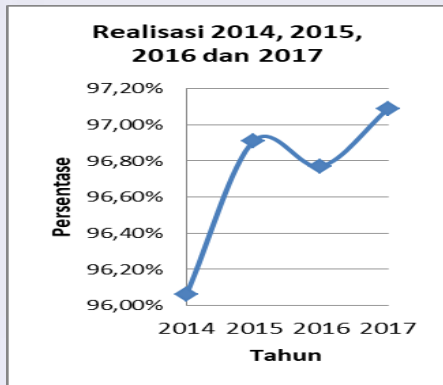
b. Perbandingan Realisasi dan target di Renstra 2015-2019



Grafik 2. Perbandingan Realisasi dan Target 2017 Renstra

Berdasarkan Renstra BBPOM di Palembang 2014-2019 target pencapaian obat yang memenuhi syarat untuk tahun 2017 adalah 96,50%, sedangkan pencapaian tahun 2017 obat yang memenuhi syarat adalah 97,09%, berarti target dari renstra sudah terpenuhi sebesar 101,61%. Target Perjanjian Kinerja 2017 berbeda dengan target Renstra r Kinerja Utama tahun 2016.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja 2017 Obat MS dengan Tahun 2014, 2015 dan 2016



Perbandingan realisasi kinerja tahun 2014, 2015, 2016 dan 2017 diperoleh nilai obat yang memenuhi syarat berturut-turut adalah 96,06%, 96,91%, 96,77% dan 97,09%. Realisasi pada tahun 2017 lebih tinggi dari perolehan 2014 (baseline), 2015 dan 2016. Hal tersebut terjadi karena pengujian pada tahun 2017 sudah mampu secara sepenuhnya melaksanakan pengujian

Grafik 3. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Obat MS 2017 dengan Tahun 2014, 2015, dan 2016

berdasarkan parameter uji kritis.

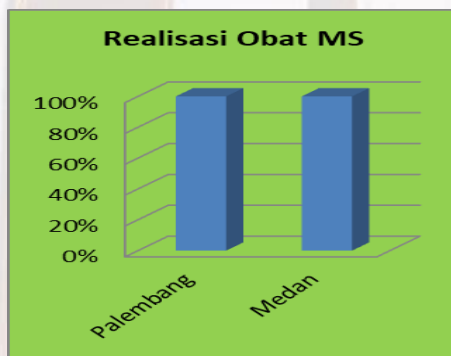
d. Perbandingan capaian kinerja 2017 Obat MS terhadap target tahun 2019



Realisasi kinerja pada tahun 2017 (97,09%) dapat dilihat bahwa telah melampaui target pada tahun 2019 (96,50%). Hasil ini menunjukkan bahwa target 2019 sebagai tahun akhir RPJM 2015-2019 telah terlampaui, dalam hal ini diperlukan revisi terhadap target.

Grafik 4. Perbandingan capaian kinerja 2017 Obat MS terhadap target tahun 2019

e. Perbandingan capaian kinerja 2017 Obat MS BBPOM Di Palembang dengan capaian kinerja Balai Besar POM di Medan



Realisasi kinerja pada tahun 2017 (97,09%) bila dibandingkan dengan BBPOM di Medan yang memiliki realisasi sebesar 99,56%. Persentase obat yang memenuhi syarat BBPOM di Palembang lebih rendah dari BBPOM di Medan kemungkinan disebabkan perbedaan profil obat yang beredar dan kondisi lingkungan strategis dari kedua Balai.

Grafik 5. Capaian kinerja 2017 Obat MS BBPOM di Palembang dengan BBPOM di Medan

f. Analisis faktor pendukung pencapaian indikator kinerja Persentase Obat yang Memenuhi Syarat (MS) dan upaya/ rencana tindak lanjut

Kinerja pengawasan obat di tahun 2017 terhadap perjanjian kinerja 2017 masuk dalam kriteria “Cukup”, hal ini dapat dilihat dari capaian yang didapat di tahun 2017. Ada beberapa faktor yang mendukung pencapaian indikator kinerja di atas, di antaranya :

1. Kepatuhan terhadap pedoman sampling, dimana pelaksanaan sampling dan pengujian yang dilakukan berpedoman pada Pedoman Sampling tahun 2017.
2. Kemampuan uji dan peralatan yang semakin meningkat baik secara kualitas maupun kuantitas.
3. Penyebaran Informasi kepada pelaku usaha di bidang distribusi obat.
4. Dari sisi masyarakat, semakin tinggi sampel Obat yang Memenuhi Syarat maka semakin terpenuhi harapan masyarakat dalam mendapatkan obat yang aman.
5. Terbitnya **Inpres No.3 Tahun 2017** tentang Peningkatan Efektifitas Pengawasan Obat dan Makanan direalisasikan dengan TOT Tenaga Pengawas Sarana Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Kota dan peningkatan koordinasi pengawasan sarana yankes yang semula BPOM melakukan rekomendasi ke Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota saat ini sudah langsung melakukan tindak lanjut pengawasan ke sarana. Hal ini secara tidak langsung lebih efektif dalam pencegahan obat-obat yang tidak memenuhi syarat.
6. Pengujian di BBPOM di Palembang telah dilakukan terhadap parameter kritis.
7. Selanjutnya dengan keluarnya **Peraturan Presiden Nomor:80 Tahun 2017** tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, secara kelembagaan BPOM menjadi semakin kuat dan secara fungsi semakin lengkap sangat mendukung peningkatan pengawasan dan penindakan yang secara tidak langsung berpengaruh kepada beredarnya obat yang tidak memenuhi syarat menjadi turun.
8. Adanya MOU (Nota Kesepakatan) antara BBPOM di Palembang dengan Pemerintah Kabupaten/Kota (Bupati/Walikota) 17 kabupaten Kota di Provinsi Sumatera Selatan selanjutnya menjadi langkah awal komitmen dalam menjalankan fungsi Pengawasan Obat dan Makanan sesuai Inpres Nomor 3 Tahun 2017.

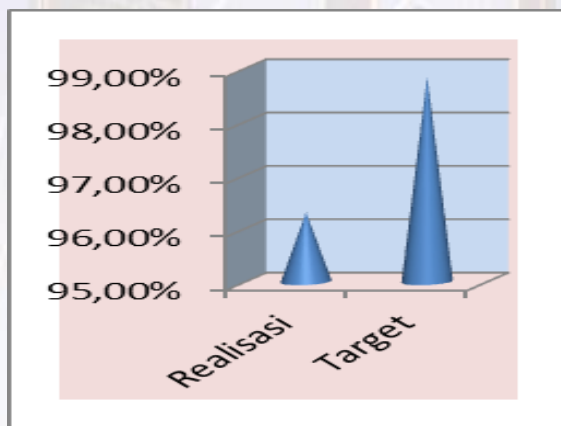
f. Rencana Tindak Lanjut yang akan dilakukan dalam meningkatkan/ mempertahankan capaian kinerja Persentase Obat yang Memenuhi Syarat:

1. Optimalisasi Penerapan Inpres No.3 tahun 2017 serta Perpres No.80 tahun 2017 yang diharapkan nantinya terjadinya pengawasan yang komprehensif dan menyeluruh dari hulu ke hilir dengan harapan semakin sedikitnya peluang beredarnya obat yang tidak memenuhi syarat di masyarakat.

2. Seiring dengan meningkatnya jenis obat yang beredar di pasaran, diperlukan peningkatan kemampuan uji laboratorium yang ditunjang oleh kompetensi penguji melalui pelatihan internal, regional dan internasional.
3. Pemenuhan standar minimum laboratorium teranokoko
4. Untuk memenuhi target Time Line pengujian dibutuhkan ketersediaan suku cadang (seperti : kolom HPLC) yang memadai, peralatan yang optimal dan reagensia yang cukup.
5. Advokasi dan koordinasi dengan lintas sektor terkait perlu diintensifkan terkait pemenuhan standar sarana distribusi obat pada saat pengurusan izin sarana distribusi baru atau perpanjangan izin.
6. KIE kepada masyarakat tentang obat yang aman antara lain cara mendapatkan obat, cara menggunakan obat, cara menyimpan obat dan cara membuang obat (dagusibu) sehingga masyarakat terlindungi dari obat yang beresiko terhadap kesehatan.
7. KIE kepada pelaku usaha di bidang obat lebih sering dilakukan terutama untuk meningkatkan pengetahuan tentang Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB)

2. Persentase Kosmetik yang Memenuhi Syarat

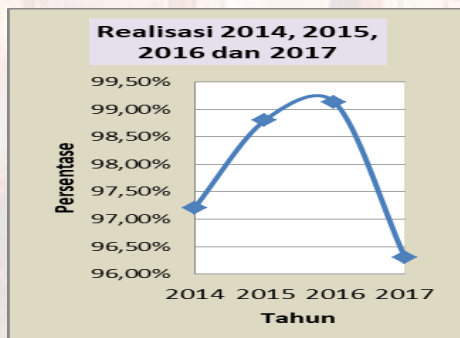
a. Perbandingan Realisasi dan Target 2017



Hasil pengujian kosmetik selama tahun 2017 menunjukkan persentase kosmetik yang memenuhi syarat adalah 96,30%, lebih rendah dari angka yang ditargetkan (98,85%) dengan capaian 97,42 % dengan kriteria Cukup. Sampling Kosmetik sebanyak 784 sampel di tahun 2017 dan seluruh sampel diuji dengan menggunakan parameter uji kritis.

Grafik 6. Perbandingan Realisasi dan Target 2017 Kosmetik yang Memenuhi Syarat.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja 2017 Persentase Kosmetik yang Memenuhi Syarat dengan Tahun 2014, 2015, dan 2016

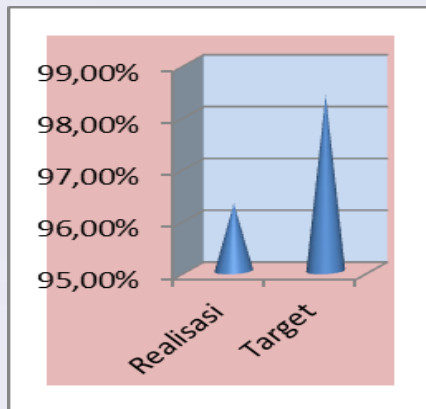


Perbandingan realisasi kinerja tahun 2014, 2015, 2016 dan 2017 diperoleh nilai kosmetik yang memenuhi syarat berturut-turut adalah 97,21%, 98,80%, 99,13% dan 96,30%. Realisasi pada tahun 2017 lebih rendah dari perolehan 2014, 2015 dan realisasi 2016. Hal ini dikarenakan sudah seluruh

Grafik 7. Realisasi Kinerja persentase kosmetik MS 2014, 2015, 2016 dan 2017

sampel diuji dengan menggunakan parameter uji kritis.

c. Perbandingan capaian kinerja kosmetik MS 2017 terhadap target tahun 2019



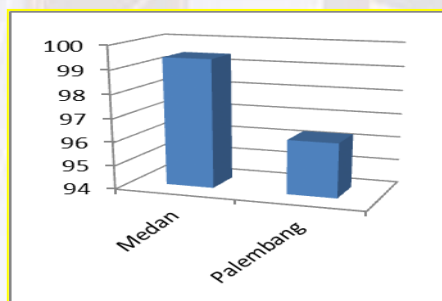
Realisasi kinerja pada tahun 2017 (96,30%) dapat dilihat bahwa masih dibawah target pada tahun 2019 (98,40%). Hasil ini menunjukkan bahwa target 2019 sebagai tahun akhir RPJM 2015-2019 belum terlampaui, masih diperlukan penyesuaian dan reviu terhadap target.

Grafik 8. Perbandingan capaian kinerja 2017 terhadap target tahun 2019

d. Perbandingan Realisasi Kosmetika Memenuhi Syarat dan target di Renstra 2015-2019

Berdasarkan Renstra BBPOM di Palembang 2015-2019 target pencapaian kosmetik yang memenuhi syarat untuk tahun 2017 adalah 98,00%, sedangkan pencapaian tahun 2017 kosmetik yang memenuhi syarat adalah 96,30%, berarti target dari renstra belum terpenuhi. Penetapan target tahun ini yang ada di Perjanjian Kinerja adalah dari Reviu 5 Indikator Kinerja Utama Sasaran Strategis 1 (SS1) yang diusulkan pada tahun 2016.

e. Perbandingan capaian kinerja 2017 Kosmetika Memenuhi Syarat BBPOM Di Palembang dengan capaian kinerja kosmetika MS BBPOM di Medan



Grafik 9. Perbandingan capaian Kosmetik MS 2017 BBPOM di Palembang dengan BBPOM di Medan

Realisasi kinerja pada tahun 2017 (96,30%) bila dibandingkan dengan BBPOM di Medan yang memiliki realisasi sebesar 99,43%, hal ini bahwa di Sumatera Selatan lebih banyak beredar Kosmetik yang tidak memenuhi syarat dan pengawasan peredaran dan penyuluhan kepada masyarakat lewat KIE masih perlu ditingkatkan.

f. Analisis faktor pendukung pencapaian indikator kinerja Persentase Kometika MS dan upaya/ rencana tindak lanjut

Kinerja pengawasan kosmetik telah baik karena dapat dilihat masih dibawah target 2019. Ada beberapa faktor yang mendukung pencapaian indikator kinerja di atas, di antaranya :

1. Kepatuhan terhadap pedoman sampling, dimana pelaksanaan sampling dan pengujian yang dilakukan berpedoman pada Pedoman Sampling tahun 2017.

2. Kemampuan uji Balai Besar POM di Palembang yang terus ditingkatkan sesuai dengan persyaratan parameter kritis pada tahun berjalan, sehingga seluruh sampel dapat diuji dengan parameter uji kritis.

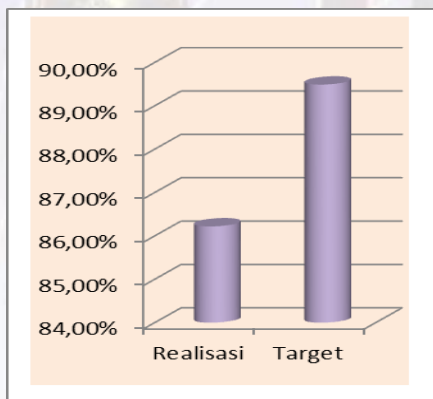
Pengawasan perlu dipertahankan agar konstan dan meningkat. Faktor pendukung yang dilakukan adalah adanya sampling yang lebih bervariasi yaitu sampel usulan balai selain sampel yang ditentukan oleh pusat.

g. Rencana Tindak Lanjut yang akan dilakukan dalam meningkatkan capaian kinerja Persentase Kosmetika yang Memenuhi Syarat (MS) pada tahun berjalan

1. Peningkatan kemampuan pengawasan melalui pelatihan berjenjang
2. Peningkatan kemampuan uji laboratorium
3. Advokasi dan koordinasi dengan lintas sektor terkait perlu diintensifkan
4. KIE tentang kosmetik kepada masyarakat lebih sering dilakukan agar masyarakat dapat lebih cerdas dalam memilih kosmetik yang aman, bermutu dan bermanfaat sehingga diharapkan kosmetik yang beredar di masyarakat hanya kosmetik yang ternotifikasi dan aman.

3. Persentase Obat Tradisional yang Memenuhi Syarat

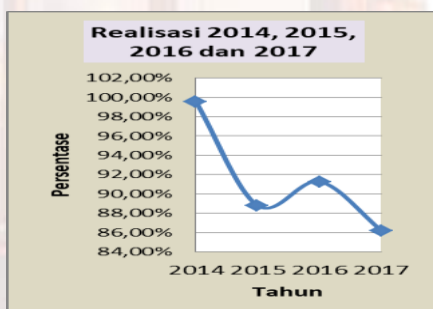
a. Perbandingan Realisasi dan Target 2017



Sampling OT tahun 2017 sebanyak 392 sampel seluruhnya telah diuji dengan menggunakan parameter uji kritis. Hasil pengujian obat tradisional selama tahun 2017 “cukup”. Hal ini ditunjukkan dengan persentase obat tradisional yang memenuhi syarat adalah 86,22%. Angka ini lebih rendah dari yang ditargetkan (89,49%).

Grafik 10. Perbandingan Realisasi dan Target OT MS 2017

b. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja OT MS 2017 dengan Tahun 2014, 2015, dan 2016



Perbandingan realisasi kinerja tahun 2014, 2015 dan 2016 terhadap capaian kinerja tahun 2017. Diperoleh nilai obat tradisional yang memenuhi syarat berturut-turut adalah 99,57%, 88,80%, 91,28% dan 86,22%. Dari tahun 2014 hingga tahun 2017 terlihat adanya fluktuatif capaian. Hal ini karena pada tahun 2015, 2016 dan 2017 sampling lebih bervariasi dan berbasis resiko.

Grafik 11. Perbandingan Realisasi OT MS 2017 dengan Tahun 2014, 2015, dan 2016

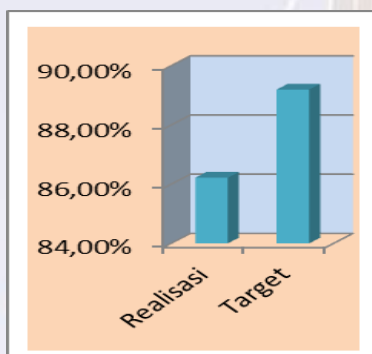
c. **Perbandingan capaian kinerja 2017 persentase OT MS terhadap target tahun 2019**



Realisasi kinerja pada tahun 2017 (86,22%) dapat dilihat bahwa masih dibawah target pada tahun 2019 (91,20%). Hasil ini menunjukkan bahwa target 2019 sebagai tahun akhir RPJM 2015-2019 belum terlampaui, tetapi masih diperlukan penyesuaian dan reviu terhadap target.

Grafik 12. Perbandingan capaian OT MS 2017 terhadap target 2019

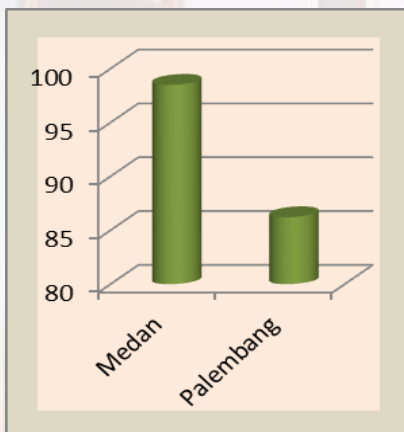
d. **Perbandingan Realisasi Persentase OT MS 2017 dan target 2017 di Renstra 2015-2019**



Berdasarkan Renstra BBPOM di Palembang 2015-2019 target pencapaian obat tradisional yang memenuhi syarat untuk tahun 2017 adalah 89,20%, sedangkan pencapaian tahun 2017 obat yang memenuhi syarat adalah 86,22%, berarti target dari renstra belum terpenuhi (pencapaian 96,66%). Walaupun demikian target pada Perjanjian Kinerja Tahun 2017 mengacu pada Reviu Indikator Kinerja Utama tahun 2016.

Grafik 13. Perbandingan capaian OT MS 2017 terhadap target 2017 Renstra

e. **Perbandingan capaian kinerja Persentase OT MS 2017 BBPOM Di Palembang dengan capaian kinerja BBPOM di Medan**



Realisasi kinerja OT yang memenuhi syarat BBPOM di Palembang pada tahun 2017 (86,22%) bila dibandingkan dengan BBPOM di Medan yang memiliki realisasi sebesar 98,51%. Hal ini menunjukkan bahwa di Sumatera Selatan lebih banyak beredar OT yang tidak memenuhi syarat, sehingga upaya pengawasan peredaran dan penyuluhan kepada masyarakat lewat KIE perlu ditingkatkan.

Grafik 14. Perbandingan realisasi persentase OT MS 2017 BBPOM di Palembang dengan BBPOM di Medan

f. Analisis faktor pendukung pencapaian indikator kinerja dan upaya/ rencana tindak lanjut pencapaian Obat Tradisional yang Memenuhi Syarat:

Faktor yang mendukung pencapaian indikator kinerja OT yang memenuhi syarat, antara lain :

1. Kepatuhan terhadap pedoman sampling, dimana pelaksanaan sampling dan pengujian yang dilakukan berpedoman pada Pedoman Sampling tahun 2017.
2. Kemampuan uji Balai Besar POM di Palembang yang terus ditingkatkan sesuai dengan persyaratan parameter uji kritis pada tahun berjalan.

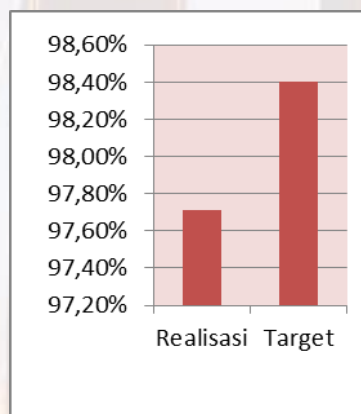
g. Rencana Tindak Lanjut yang akan dilakukan dalam meningkatkan/ mempertahankan capaian kinerja Persentase Obat Tradisional yang Memenuhi Syarat tahun berjalan

Rencana tindak lanjut yang dilakukan:

1. Meningkatkan pengawasan dan penerapan sanksi (proses projustitia maupun administratif) terhadap sarana produksi maupun distribusi.
2. Penyebaran informasi melalui KIE yang intensif oleh Balai Besar POM Palembang kepada masyarakat terhadap obat tradisional yang memenuhi syarat keamanan, mutu dan manfaat, melalui penyuluhan, leaflet, brosur, pameran, talk show, media massa baik cetak maupun elektronik sehingga diharapkan obat tradisional yang beredar di masyarakat adalah obat tradisional yang terdaftar, aman, sehat dan bermanfaat.

4. Persentase Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Syarat

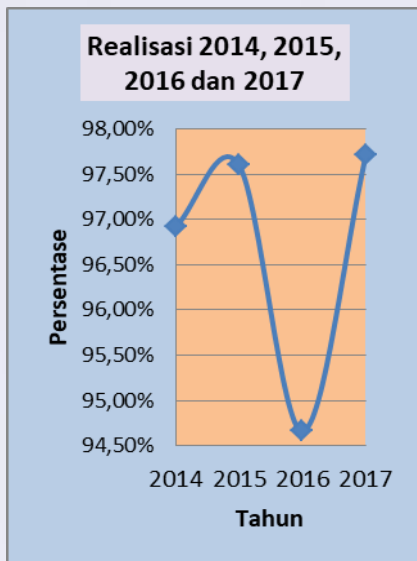
a. Perbandingan Realisasi dan Target 2017



Berdasarkan hasil pengujian suplemen kesehatan selama tahun 2017 didapatkan realisasi persentase suplemen kesehatan yang memenuhi syarat adalah 97,71%. Hasil tersebut lebih rendah dari target (98,40%) dengan kriteria capaian Cukup (99,30%) karena sampling yang sudah berdasarkan kajian resiko. Selain itu adanya peningkatan kemampuan uji dari laboratorium berdasarkan parameter kritis sehingga terdeteksi produk TMS.

Grafik 13. Perbandingan Realisasi dan Target Persentase Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Syarat 2017

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Suplemen Kesehatan MS dan Capaian Kinerja 2017 dengan Tahun 2014, 2015, dan 2016



Grafik 16. Perbandingan Realisasi Kinerja 2017 Suplemen Kesehatan MS dengan Tahun 2014, 2015, dan 2016

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2014, 2015, 2016 dan 2017 diperoleh suplemen kesehatan yang memenuhi syarat berturut-turut adalah 96,92%, 97,60%, 94,66% dan 97,71%. Pada tahun 2017 realisasi yang didapat lebih tinggi dari perolehan 2014, 2015 dan 2016. Hal tersebut terjadi karena sampling produk suplemen kesehatan pada tahun 2016 telah dilakukan sesuai dengan prioritas sampling yang lebih detail dan rinci berdasarkan kajian resiko. Selain itu adanya peningkatan kemampuan uji pengujian yang sudah menggunakan parameter kritis sehingga banyak terdeteksi produk TMS.

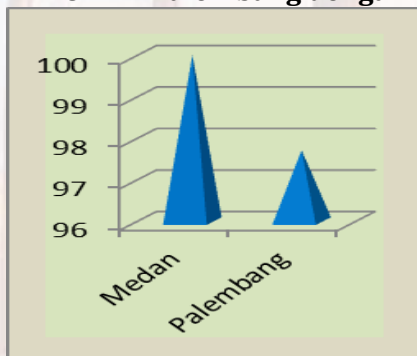
c. Perbandingan capaian kinerja 2017 persentase suplemen kesehatan MS terhadap target tahun 2019



Grafik 17. Perbandingan persentase suplemen kesehatan 2017 terhadap target tahun 2019

Realisasi kinerja pada tahun 2017 (97,71%) masih di bawah target tahun 2019 (99,20%) dengan capaian 99,30% kriteria cukup. Hasil ini masih perlu ditingkatkan kembali pada tahun berikutnya hingga target tercapai pada tahun 2019.

d. Perbandingan Persentase Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Syarat 2017 BBPOM Di Palembang dengan BBPOM di Medan



Grafik 18. Perbandingan persentase suplemen kesehatan 2017 BBPOM di Palembang dengan BBPOM di Medan

Realisasi kinerja BBPOM Di Palembang pada tahun 2017 (97,71%) lebih rendah dibandingkan dengan BBPOM di Medan (100,00%). Hal ini tidak serta merta menunjukkan bahwa di Sumatera Selatan lebih banyak beredar Suplemen kesehatan yang tidak memenuhi syarat, namun upaya pengawasan peredaran dan penyuluhan kepada masyarakat lewat KIE perlu ditingkatkan.

e. Analisis faktor pendukung pencapaian indikator kinerja Persentase Suplemen Kesehatan MS dan upaya/ rencana tindak lanjut

Faktor pendukung pencapaian indikator kinerja:

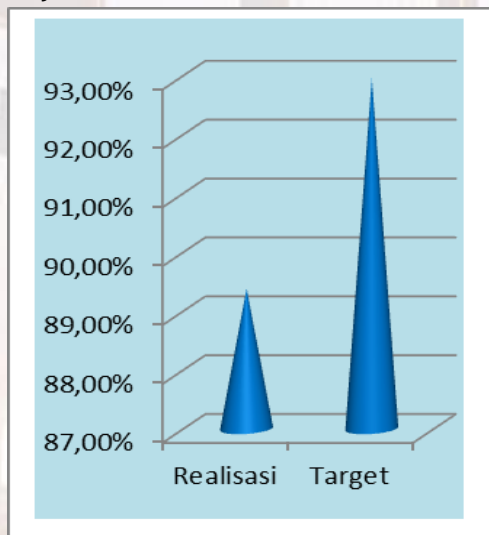
1. Sampling yang lebih bervariasi yaitu sampel usulan balai selain sampel yang ditentukan oleh pusat .
2. Mencerdaskan masyarakat melalui KIE dalam memilih suplemen kesehatan yang baik sehingga diharapkan suplemen kesehatan yang beredar di pasaran adalah suplemen kesehatan yang memenuhi syarat.
3. Pengawasan terhadap suplemen kesehatan di sarana produksi dan sarana distribusi lebih ditingkatkan untuk dapat mendeteksi adanya produk suplemen kesehatan yang tidak memenuhi syarat beredar di masyarakat dan di tempat produksi (hulu).

f. Rencana Tindak Lanjut yang akan dilakukan dalam meningkatkan/ mempertahankan capaian kinerja Persentase Suplemen Kesehatan MS pada tahun 2017

1. Peningkatan kemampuan pengawasan melalui pelatihan berjenjang
2. Peningkatan kemampuan uji laboratorium
3. Advokasi dan koordinasi dengan lintas sektor terkait perlu diintensifkan
4. KIE tentang suplemen kesehatan kepada masyarakat lebih sering dilakukan.

5. Persentase Makanan Yang Memenuhi Syarat

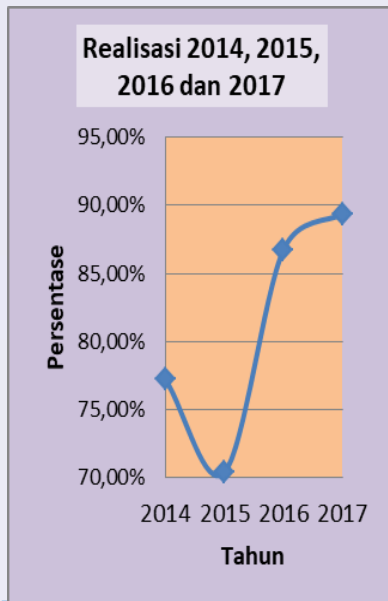
a. Perbandingan Realisasi dan Target Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat Tahun 2017



Berdasarkan hasil pengujian makanan selama tahun 2017 didapatkan realisasi persentase makanan yang memenuhi syarat adalah 89,38% lebih rendah dari angka yang ditargetkan (92,95%) dengan capaian 96,16% kriteria Cukup.

Grafik 19. Perbandingan Realisasi dan Target 2017 Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat

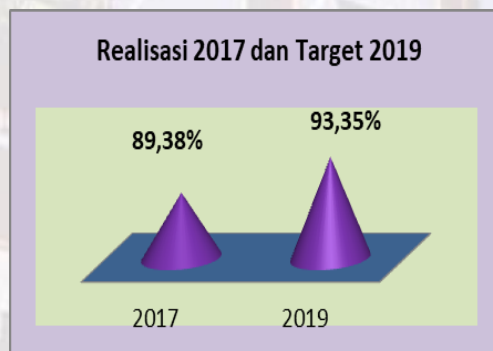
b. Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat 2017 dengan tahun 2014, 2015, 2016 dan 2017



Apabila dibandingkan dengan tahun 2014, 2015, 2016 dan 2017 diperoleh makanan yang memenuhi syarat berturut-turut adalah 77,23%, 70,40%, 86,75% dan 89,38%. Pada tahun 2016 realisasi yang didapat lebih tinggi dari perolehan 2014, 2015 dan 2016. Hal tersebut menunjukkan bahwa adanya peningkatan produk pangan yang memenuhi syarat (MS). Hal ini menunjukkan pengawasan dan pembinaan terhadap produk pangan secara Nasional meningkat sehingga kepatuhan industri dalam memproduksi produk pangan meningkat.

Grafik 20. Perbandingan realisasi Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat 2017 dengan tahun 2014, 2015, dan 2016

c. Perbandingan capaian kinerja Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat 2017 terhadap target tahun 2019



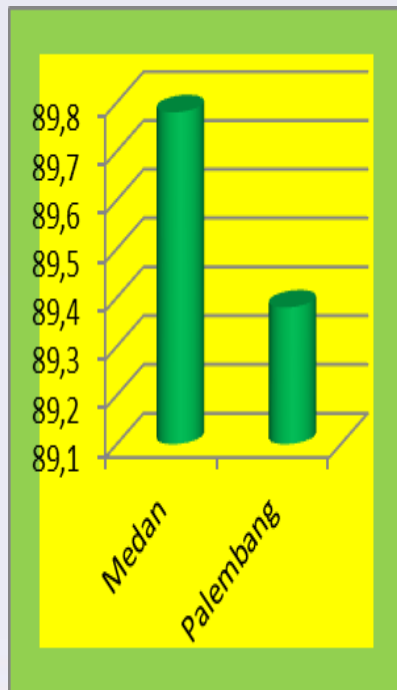
Realisasi kinerja pada tahun 2017 (89,38%) dapat dilihat bahwa masih di bawah target pada tahun 2019 (93,35%) dengan capaian 95,94% kriteria cukup. Hasil ini masih dapat ditingkatkan kembali pada tahun berikutnya hingga target tercapai pada tahun 2019.

Grafik 21. Perbandingan capaian Persentase Makanan yang MS 2017 terhadap target tahun 2019

d. Perbandingan capaian kinerja Pangan MS 2017 terhadap target Renstra

Realisasi kinerja pada tahun 2017 (89,38%) dengan target pada Perjanjian Kinerja sebesar 92,95% sedangkan target pada Renstra untuk tahun 2017 sebesar 92,35% perbedaan ini terjadi karena Perjanjian Kinerja mengacu pada Reviu Indikator Kinerja Utama BBPOM di Palembang tahun 2017. Tetapi pada kenyataannya baik target Renstra maupun target Perjanjian Kinerja sama-sama pencapaian masih dibawah 100%.

e. **Perbandingan capaian kinerja 2017 Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat BBPOM Di Palembang dengan capaian BBPOM di Medan**



Realisasi kinerja pada tahun 2017 (89,38%) bila dibandingkan dengan BBPOM di Medan yang memiliki realisasi sebesar 89,78%, hal ini tidak serta merta menunjukkan bahwa lebih banyak pangan yang memenuhi syarat beredar di Sumatera Selatan dibandingkan dengan Provinsi Sumatera Utara. Tetapi upaya peningkatan dalam pengawasan perlu dilaksanakan terutama terkait produksi, distribusi dan sampling yang lebih representatif serta pembinaan serta penyuluhan melalui KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi).

Grafik 22. Perbandingan Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat 2017 BBPOM di Palembang dengan BBPOM di Medan

f. **Analisis faktor pendukung pencapaian indikator kinerja Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat dan upaya/ rencana tindak lanjut**

Peningkatan pencapaian kinerja makanan yang memenuhi syarat perlu ditingkatkan lagi agar dapat mencapai target yang dibuat, baik pada tahun 2018 ataupun tahun 2019.

Selain itu perlu dilakukan pembinaan yang dilakukan oleh petugas secara berkesinambungan terhadap pihak-pihak yang terkait dalam produksi dan distribusi makanan. KIE terhadap masyarakat tentang keamanan pangan perlu dilakukan secara terus-menerus sehingga turut mencerdaskan masyarakat baik produsen maupun konsumen. Peningkatan kerjasama dengan stakeholder (kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan) dalam rangka penindakan pelanggaran pun perlu dilakukan agar dapat menimbulkan efek jera bagi produsen yang melanggar hukum.

Pada produk pangan IRT-P dan produk tidak teregistrasi walaupun bukan termasuk indikator utama tetapi sebagai institusi yang menjaga keamanan dan mutu pangan yang dikonsumsi masyarakat, produk tersebut termasuk dalam pengawasan yang dilakukan oleh BPOM RI. Hal tersebut sangat penting untuk mendukung pengembangan produk lokal yang sedang digalakkan pemerintah saat ini. Pada produk IRTP dan Tidak Teregistrasi juga

masih ditemukan produk pangan TMS mengandung bahan berbahaya seperti formalin pada mie basah, pempek tahu dan tahu, sulfit pada kecap, gula merah dan cuka pempek. Sanksi hukum yang dijatuhkan tidak memberikan efek jera terhadap sarana produksi ataupun industri pangan IRT-P yang terbukti menggunakan bahan berbahaya dalam produk pangannya (formalin, borak, rhodamin, dll).

g. Rencana Tindak Lanjut yang akan dilakukan dalam meningkatkan/mempertahankan capaian kinerja persentase makanan yang memenuhi syarat :

1. Peningkatan kemampuan pengawasan melalui pelatihan berjenjang
2. Peningkatan kemampuan uji laboratorium
3. Advokasi dan koordinasi dengan lintas sektor terkait perlu diintensifkan
4. KIE tentang makanan kepada masyarakat lebih sering dilakukan

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan dari SS1

SASARAN STRATEGIS	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET 2017	REALISASI	% CAPAIAN
Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan	Meningkatnya Kualitas Sampling dan Pengujian terhadap Produk Obat dan Makanan yang Beredar.	Jumlah sampel yang diuji menggunakan parameter kritis	2607	2607	100,00%
		Pemenuhan target sampling produk obat disektor publik (IFK)	100%	108,00%	108,33%
	Meningkatnya kualitas sarana produksi yang Memenuhi Standar	Persentase cakupan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan	13,40%	14,67%	109,50%
	Meningkatnya kualitas sarana distribusi yang memenuhi standar	Persentase cakupan pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan	33,19%	37,34%	112,49%
	Meningkatnya Hasil Tindak Lanjut Penyidikan terhadap Pelanggaran obat dan Makanan	Jumlah Perkara di Bidang Obat dan Makanan	10	5	50,00%

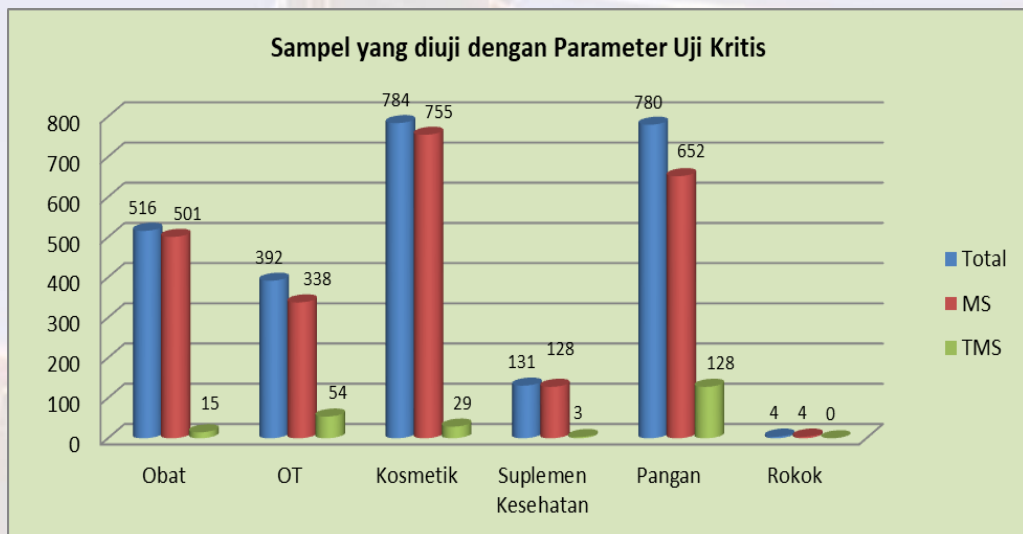
Tabel 14. Capaian Indikator Kinerja Sasaran kegiatan SS1 tahun 2017

Sasaran Kegiatan :

Meningkatnya kualitas sampling dan pengujian terhadap produk obat dan makanan yang beredar

Indikator:**1. Jumlah sampel yang diuji menggunakan parameter uji kritis****a. Realisasi jumlah sampel obat dan makanan yang diuji menggunakan parameter kritis**

Jumlah sampling sesuai Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) tahun 2017 adalah 2607 sampel dan semua dapat dilakukan uji kritis dan seluruh sampel sudah selesai uji tidak ada yang menyeberang ke tahun 2018.



Grafik 23. Sampel yang diuji dengan Parameter Uji Kritis tahun 2017 BBPOM di Palembang

- Sampel obat → Tidak Memenuhi Syarat: Waktu Hancur, Keseragaman Kandungan, Penetapan Kadar dan Disolusi.
- Sampel obat tradisional → TMS PK Sineol 2 item, TMS Angka Lempeng Total (ALT) 44 item, TMS ALT dan Kapang Khamir 6 item, TMS Kapang Khamir 2 item.
- Sampel kosmetik → TMS ALT, TMS Hg, TMS Alkali Bebas, TMS Asam Lemak Bebas, Berat Jenis (BJ), pH, Hg, Kadar Air, PK Clindamisin dan TMS PK.Methanol.
- Suplemen makanan → Parameter uji TMS hasil uji meliputi TMS PK Vitamin B2 sebanyak 2 item, TMS PK Vitamin B2 dan Metanol sebanyak 1 item.
- Sampel makanan → TMS berupa TMS Sulfit 13.46%, TMS NaCl 3.85%, TMS Formalin 17.31%, TMS PK Siklomat 8.33%, TMS Kadar air 10.26%, TMS protein 3.85%, TMS Benzoat 3.85%, TMS pH 2.56%, TMS KIO₃ 1.28%, TMS Residu Kloramfenikal 5.13%, TMS Mikrobiologi 14,74%, dan TMS lainnya 15.38 %.

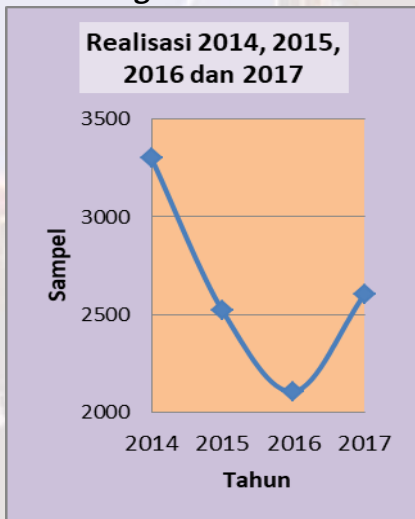
b. Persentase (%) capaian sampel yang diuji dengan parameter uji kritis terhadap target tahun 2017

Target tahun 2017 sesuai Perjanjian Kinerja dan Renstra periode 2015-2019 untuk target 2017 adalah 2500 sampel. Persentase capaian terhadap target 2017 adalah 104,28% (tercapainya 2607 sampel yang dilakukan pengujian dengan parameter uji kritis tahun 2017). Sedangkan bila dibandingkan dengan POK sampel yang diuji dengan parameter uji kritis adalah 2607 sesuai dengan target POK 2607 sampel (100%).

c. Persentase (%) capaian terhadap target tahun 2019 (akhir periode Renstra)

Target tahun 2019 sesuai perjanjian kinerja, rencana kinerja tahunan dan Renstra adalah 2500 sampel. Persentase capaian tahun 2017 terhadap target 2019 adalah 104,28% (2607 sampel). Perbedaan target Renstra dan Petunjuk Operasional Kegiatan perlu dilakukan reviu terhadap Renstra BBPOM di Palembang.

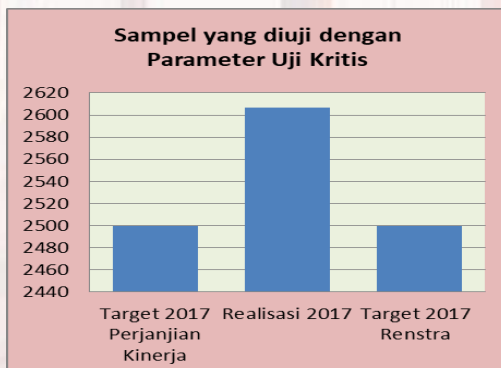
d. Perbandingan realisasi tahun 2017 terhadap realisasi tahun 2014, 2015, dan 2016



Pada tahun 2017 realisasi yang didapat lebih tinggi dari 2015 dan 2016 yaitu: 2607 sampel. Realisasi 2014 sampel yang diuji 3300 sampel, tahun 2015 jumlah sampel yang diuji adalah 2520 sampel dan tahun 2016 sejumlah 2108 sampel. Data 2014 tidak dapat dibandingkan dengan realisasi tahun 2017 karena tahun 2014 definisi operasional (DO) tentang parameter uji kritis tidak ada. Pada tahun 2015 DO sudah ada tetapi perhitungan masih mengacu kepada tahun 2014.

Grafik 24. Perbandingan realisasi sampel yang diuji dengan parameter uji kritis tahun 2017 terhadap realisasi tahun 2014, 2015, dan 2016

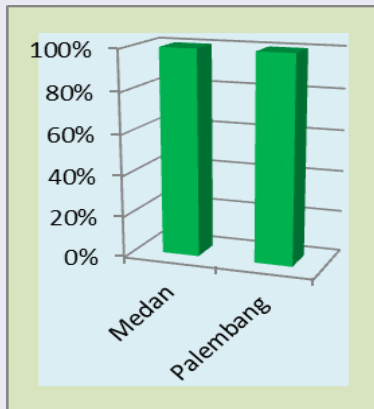
e. Realisasi tahun 2017 terhadap target tahun 2017



Grafik 25. Sampel yang diuji dengan parameter uji kritis tahun 2017 terhadap PK 2017 dan Renstra (2015-2019)

Realisasi pengujian sampel dengan menggunakan parameter uji kritis pada tahun 2017 sebesar 2607 sampel melebihi target yang ada di Perjanjian Kinerja dan target di akhir RPJM yaitu sebesar 2500 sampel, sehingga perlu dilakukan review/penyesuaian target dengan cara mereview Renstra BBPOM di Palembang tahun 2017.

f. Perbandingan Realisasi Sampel yang diuji dengan parameter uji kritis antara BBPOM di Palembang dengan BBPOM di Medan



Grafik 26. Perbandingan Realisasi Sampel yang diuji dengan parameter uji kritis 2017 antara BBPOM di Palembang dengan BBPOM di Medan

BBPOM di Palembang dengan realisasi sampel yang diuji menggunakan parameter uji kritis tahun 2017 sebanyak 2607 sampel dari seluruh sampel tahun 2017 sedangkan BBPOM di Medan terdapat 3507 sampel yang diuji menggunakan parameter uji kritis dari 3507 sampel selesai diuji. Persentase capaian jumlah sampel yang diuji di BBPOM di Palembang 100,00% sama tinggi dari BBPOM di Medan 100%.

g. Kegiatan dan faktor lain di bawah ini yang mendukung pencapaian indikator kinerja Sampel yang diuji dengan menggunakan Parameter Uji Kritis:

1. Kepatuhan terhadap Pedoman Sampling

Tahun 2017 ini BBPOM di Palembang sudah mulai memperhatikan parameter uji kritis yang tercantum dalam prioritas sampling dan sudah mulai melakukan perhitungan dengan menggunakan parameter uji kritis ini.

2. Kemampuan Uji Balai Besar/Balai POM, terutama terkait parameter kritis

Kemampuan uji BBPOM di Palembang terkait pengujian dengan menggunakan parameter uji kritis cukup optimal.

3. Sarana dan Prasarana Pengujian

Dari segi peralatan dan reagensia yang sudah optimal merupakan salah satu faktor pendukung pencapaian terhadap pemenuhan parameter uji kritis ini.

4. Kuantitas dan Kualitas SDM terkait sampling dan pengujian

Kualitas dan kuantitas SDM mulai dari yang melakukan sampling sesuai Pedoman Sampling sampai kepada kemampuan/kompetensi tenaga pengujian sangat berpengaruh pada pencapaian ini.

h. Upaya-upaya perbaikan yang telah dilakukan dalam mencapai kinerja sampel yang diuji dengan parameter uji kritis sesuai tindak lanjut yang direncanakan tahun sebelumnya:

1. Peningkatan kompetensi SDM dan peralatan untuk meningkatkan kemampuan uji laboratorium

2. Koordinasi antara Bidang Pemeriksaan dan Penyidikan dengan Bidang Pengujian terkait perencanaan sampling.

3. Peningkatan kepatuhan terhadap prioritas sampling serta sampling yang lebih variatif.

i. Rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam meningkatkan/mempertahankan capaian kinerja jumlah sampel yang diuji dengan menggunakan parameter uji kritis:

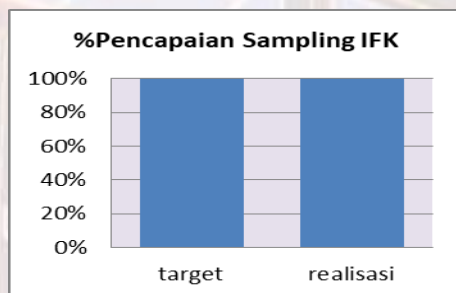
1. Pelatihan secara berkelanjutan agar dapat ditingkatkan kompetensi penguji.
2. Upaya pemenuhan standar minimum alat laboratorium melengkapi sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk pengerjaan parameter uji kritis tersebut.
3. variasi sampel yang disampling lebih diperluas dengan mempertimbangkan Obat dan Makanan yang berisiko terhadap kesehatan masyarakat.

2. Pemenuhan Target Sampling Produk Obat di Sektor Publik (IFK)

a. Realisasi pemenuhan target sampling produk obat di sektor publik (IFK)

Jumlah sampel produk obat yang disampling di sektor publik sejumlah 40 sampel yang berasal dari 4 IFK (Instalasi Farmasi Kota/Kabupaten) yang ada di Propinsi Sumatera Selatan.

b. Persentase Capaian Sampling Produk Obat di Sektor Publik terhadap target tahun 2017



Rencana Sampling IFK tahun 2017 adalah 40 sampel, realisasi tahun 2017 adalah 40 sampel (100,00%).

Grafik 27. Persentase capaian Sampling Produk Obat di Sektor Publik terhadap target tahun 2017

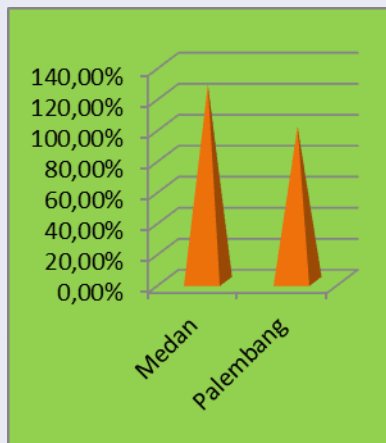
c. Persentase Capaian Sampling Produk Obat di Sektor Publik terhadap target tahun 2019

Target tahun 2019 adalah 100% capaian sehingga capaian tersebut bila dibandingkan dengan %Capaian tahun 2019 sebagai tahun akhir periode renstra yaitu 100%. %Capaian terhadap target diakhir RPJM sudah dicapai sehingga perlu dilakukan reuiu.

d. Persentase capaian tahun 2017 Sampling Produk Obat di Sektor Publik terhadap tahun 2016,2015 dan 2014

Tahun 2017 tercapai 100%, Tahun 2015 pencapaian sebesar 120% sedangkan tahun 2016 tercapai 108,33% dari target sedangkan terhadap tahun 2014 tidak dapat dibandingkan karena indikator ini tidak ditetapkan di tahun 2014 (RPJM 2009-2014).

e. Perbandingan capaian Sampling Produk Obat di Sektor Publik BBPOM di Palembang dengan BBPOM di Medan



Grafik 28. Perbandingan capaian Sampling Produk Obat di Sektor Publik BBPOM di Palembang dengan BBPOM di Medan

Capaian tahun 2016 untuk indikator kinerja Pemenuhan target sampling produk Obat di sektor publik (IFK) **BBPOM di Medan** adalah 127,14% dan BBPOM di Palembang 100%. Dari capaian tersebut koordinasi dengan lintas sektor bidang farmasi dan pemetaan IFK BBPOM di Palembang dan BBPOM di Medan sudah cukup baik dan perlu lebih ditingkatkan lagi.

f. Kegiatan dan faktor lain yang mendukung pencapaian kinerja diatas:

Koordinasi dengan Pemerintah daerah sudah dilakukan dengan baik berupa tersedianya obat di IFK sesuai dengan prioritas sampling BBPOM Di Palembang.

**Sasaran Kegiatan :
Meningkatnya kualitas sarana produksi yang memenuhi standar**

Indikator: Persentase cakupan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan

a. Realisasi persentase cakupan pengawasan sarana produksi obat dan makanan

Pemeriksaan sarana produksi yang tercapai pada tahun 2017 adalah 184 sarana (14,67%) dari 1254 sarana yang ada di Sumatera Selatan. Hasil tersebut berasal dari cakupan sarana di bawah ini:

- Sarana Produksi Obat dan Napza
Pemeriksaan sarana industri obat cakupannya terealisasi 100% dengan target 2 sarana terhadap 1(satu) industri farmasi dengan 2 fasilitas yang berbeda. Hasil pemeriksaan masih terdapat temuan ketidaksesuaian terkait penerapan aspek-aspek cara pembuatan obat yang baik (CPOB). Terkait dengan hasil temuan telah dilaporkan ke Deputi Bidang Pengawasan Produk Terapeutik dan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Aditif.
- Sarana Produksi Obat Tradisional
Pemeriksaan sarana industri obat tradisional cakupannya terealisasi 100% yaitu pada satu sarana IOT dan satu sarana IKOT yang ada di Sumatera Selatan dilakukan inspeksi. Hasil pemeriksaan pada industri obat tradisional (IOT) adalah Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK) dalam pemenuhan terhadap Aspek

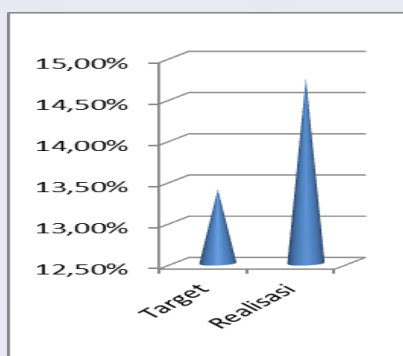
CPOTB: Manajemen Mutu, Bangunan, Fasilitas & Peralatan, Produksi, Pengawasan Mutu, Pembuatan & Analisis berdasarkan Kontrak, Penanganan keluhan terhadap produk & penarikan kembali produk, Inspeksi Diri dan Penandaan:1. Sedangkan 1 IKOT dengan temuan 'Higiene Sanitasi dan Administrasi.

- Sarana Produksi Kosmetik
Pemeriksaan sarana industri kosmetik cakupannya terealisasi 100% yaitu pada satu sarana kosmetik yang ada di Sumatera Selatan. Hasil pemeriksaan adalah TMK (Tidak Memenuhi Ketentuan) dengan temuan Produk TIE, Perizinan, Pengadaan, Proses Produksi, penyimpanan dan pendistribusian terkait CPKB (Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik).
- Sarana Produksi Makanan
Realisasi pemeriksaan terhadap sarana industri pangan (MD) adalah sebanyak 53 sarana dan 1 sarana industri miras dari rencana 46 sarana produksi Pangan termasuk Industri Miras yang ada. Sedangkan untuk IRTP yang diperiksa sejumlah 125 sarana dari 1198 sarana yang ada. Temuan tersebut terkait dengan penerapan aspek cara produksi pangan yang baik (CPPB) terbanyak terkait higiene & sanitasi, bangunan dan peralatan serta laboratorium. Adapun tindak lanjut dari hasil temuan pelanggaran terhadap sarana industri pangan (MD) dan sarana industri miras adalah laporan dan rekomendasi kepada Deputi Bidang Pengawasan Pangan dan Bahan Berbahaya.

Sarana	Jumlah Sarana yang Ada
INDUSTRI FARMASI	1
IOT	1
IKOT/UMOT	1
INDUSTRI KOSMETIK	1
INDUSTRI PANGAN	51
IRTP	1198
INDUSTRI MIRAS	1
TOTAL	1254

Tabel 15. Jumlah sarana produksi obat dan makanan di wilayah pengawasan BBPOM di Palembang 2017

b. Persentase Capaian Pemeriksaan Sarana Produksi terhadap target tahun 2017



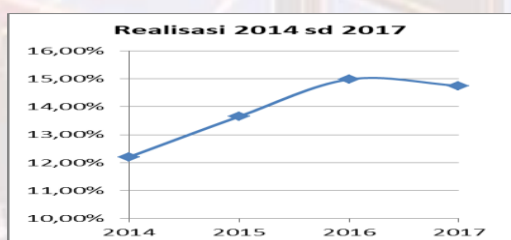
Pemeriksaan sarana produksi yang tercapai pada tahun 2017 adalah 184 sarana (14,67%) dari 1254 sarana yang ada di Sumatera Selatan. Hasil tersebut lebih tinggi dari target renstra pada tahun 2017 yaitu 13,40%. Persentase capaian terhadap target tahun 2017 adalah 109,50%.

Grafik 29. Persentase Pemsar Produksi Tahun 2017 terhadap target 2017

c. Persentase capaian 2017 pemeriksaan sarana produksi terhadap target tahun 2019 (akhir periode Renstra)

Pemeriksaan sarana produksi tahun 2017 realisasinya 14,67% sedangkan target tahun 2017 adalah 13,40%, persentase capaian terhadap 2019 (14,20%) adalah 103,33%.

d. Perbandingan realisasi sarana produksi tahun 2017 terhadap baseline (2014), tahun 2015,2016 dan realisasi tahun 2017



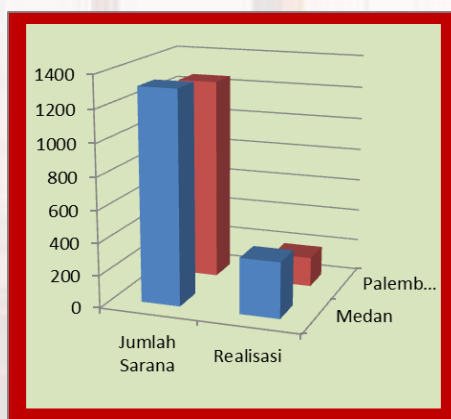
Baseline adalah 12,20% sedangkan realisasi tahun 2015 adalah 13,65%, realisasi tahun 2016 sebesar 14,98% dan realisasi tahun 2017 sebesar 14,67%.

Grafik 30. Realisasi Persentase Cakupan Pemsar Produksi Tahun 2014,2015,2016 dan 2017

e. Perbandingan realisasi sarana produksi tahun 2017 terhadap baseline (2014), tahun 2015,2016 dan realisasi tahun 2017

Realisasi tahun 2017 sudah melebihi target tahunan dan bahkan target di akhir RPJMN sehingga perlu dilakukan review/penyesuaian target kembali.

f. Perbandingan capaian antara BBPOM di Palembang dengan BBPOM di Medan



Realisasi pemeriksaan sarana produksi BBPOM di Palembang 184 sarana yaitu 14,67% (184 sarana dari 1254 sarana yang ada) dengan persentase capaian 109,50% hal ini lebih besar dari capaian BBPOM di Medan dengan persentase capaian terhadap target 105,16% (realisasi 26,29% sarana dari 1315 sarana yang ada). Tetapi secara jumlah capaian sarana BBPOM di

Grafik 31. Realisasi Presentase Cakupan Pemsar Produksi 2017 BBPOM di Palembang dengan BBPOM di Medan

Medan lebih banyak 346 sarana sedangkan BBPOM di Palembang hanya 184 sarana, hal ini tidak terlepas dari jumlah SDM BBPOM di Palembang yang lebih sedikit dibandingkan dengan BBPOM di Medan.

g. Kegiatan dan faktor lain yang mendukung pencapaian indikator kinerja Persentase cakupan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan:

- Kondisi geografis dan persebaran sarana produksi obat dan makanan di wilayah pengawasan Balai Besar POM di Palembang tersebar di 17 kabupaten/kota dengan kondisi geografis yang beragam tetapi masih dapat dilaksanakan oleh petugas karena kelancaran sarana transportasi.
- Perencanaan pengawasan sarana produksi obat dan makanan: dengan adanya defenisi operasional yang menyatakan bahwa apabila Industri Makanan MD disuatu daerah 51-100 sarana maka pemeriksaan dilakukan 90% maka terjadinya penambahan target inspeksi/pemeriksaan sarana MD.
- Kualitas dan kuantitas SDM terkait pengawasan sarana produksi obat dan makanan sudah cukup memadai dengan adanya penambahan petugas yang mengikuti pelatihan/Bimtek Food Inspektur.
- Koordinasi dengan Pemerintah Daerah yang sudah cukup baik dengan adanya pendampingan setiap kali petugas melakukan pemeriksaan sarana produksi.
- Faktor pendukung lain adalah sarana dan prasarana yang mulai dilengkapi terkait pemeriksaan sarana seperti laptop, komputer, form checklist, kertas serta form-form yang terkait.

h. Upaya-upaya perbaikan yang telah dilakukan dalam mencapai kinerja Persentase cakupan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan sesuai tindak lanjut yang direncanakan tahun sebelumnya:

Perbaikan-perbaikan yang telah dilakukan adalah penambahan jumlah SDM seksi Pemeriksaan BBPOM di Palembang, sarana dan prasarana penunjang pemeriksaan sudah ditingkatkan dimana sudah berjalannya sistem pengetikan ditempat sarana terhadap berita acara pemeriksaan yang telah dibuat serta peningkatan kerjasama dengan lintas sektor.

i. Rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam meningkatkan/mempertahankan capaian kinerja ini adalah:

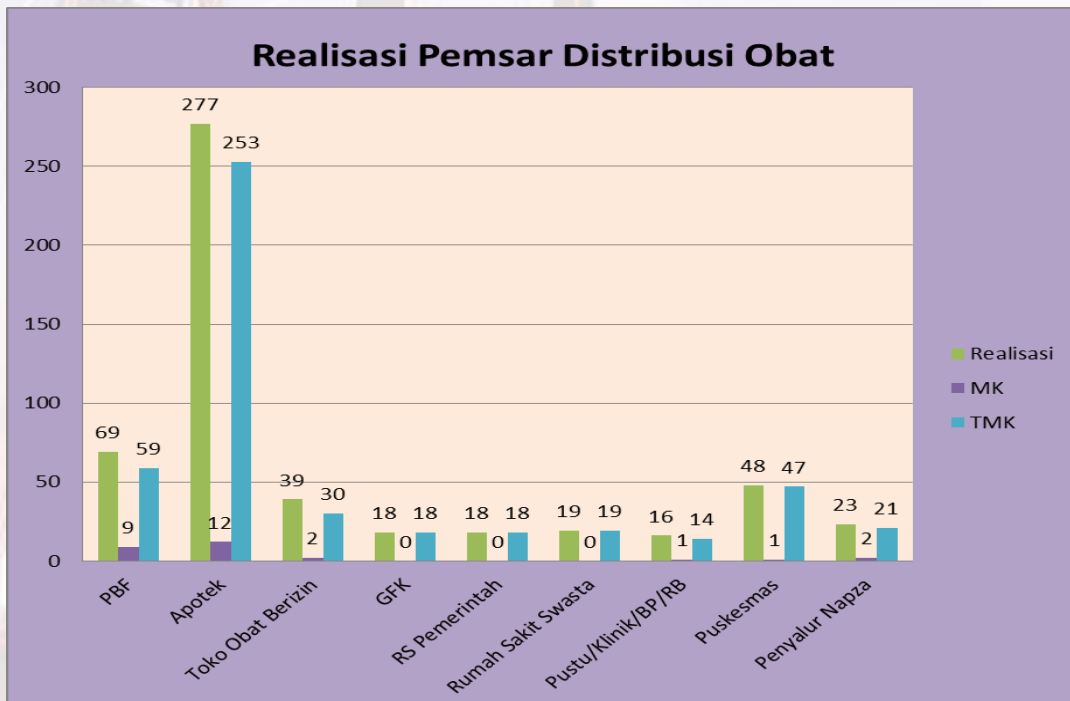
BBPOM di Palembang khususnya seksi pemeriksaan akan tetap mengoptimalkan SDM yang ada, pemenuhan sarana dan prasarana penunjang yang lebih memadai serta peningkatan kerjasama dengan lintas sektor terkait, dengan adanya Inpres No.3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektifitas Pengawasan Obat dan Makanan telah ditandatangani MOU dengan pemerintah kabupaten/kota terkait pengawasan obat dan makanan secara tidak langsung berpengaruh kepada kaulitas dan kuantitas pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan.

Sasaran Kegiatan :
Meningkatnya kualitas sarana distribusi yang memenuhi standar

Indikator: Persentase cakupan pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan

a. Realisasi persentase cakupan pengawasan sarana distribusi obat dan makanan

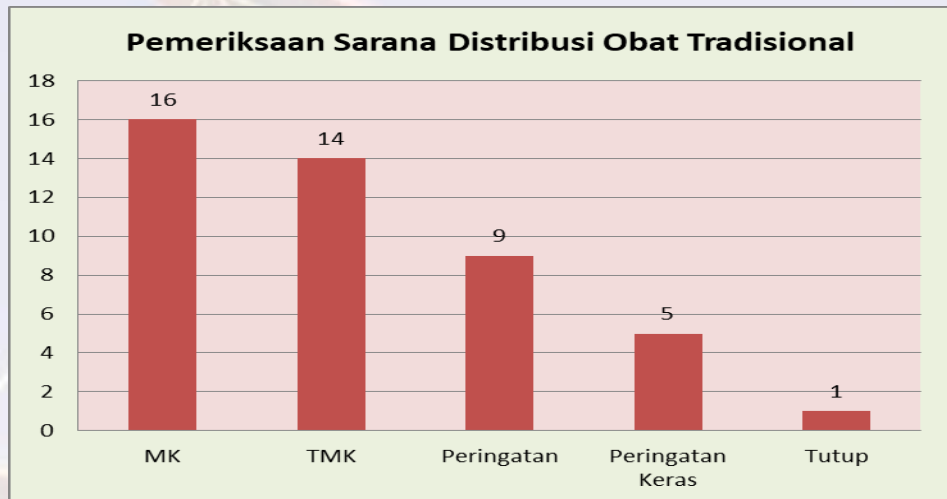
- Pemeriksaan sarana distribusi yang tercapai adalah 1141 sarana (37,34%) dari 3056 sarana yang ada di Sumatera Selatan. Hasil tersebut lebih tinggi dari target renstra pada tahun 2017 yaitu 33,40%.
- Hasil tersebut berasal dari cakupan sarana di bawah ini:
 - Sarana Distribusi Obat
 Pemeriksaan sarana distribusi obat cakupan yang terealisasi sebanyak 527 sarana (38,27%) dari total 1377 jumlah sarana distribusi obat yang ada di Sumatera Selatan. Hasil pemeriksaan tersebut terdiri atas :



Grafik 32. Realisasi Pemsar Distribusi Obat 2017

Adapun tindak lanjut dari hasil temuan pelanggaran adalah rekomendasi pemberian sanksi kepada Dinas Kesehatan Kota/Kabupaten untuk sarana distribusi obat serta rekomendasi kepada Ditwas PT dan PKRT untuk sarana PBF sedangkan untuk bulan Oktober 2017 selain PBF rekomendasi tidak lagi dilakukan tetapi langsung surat sanksi administrasi dikirim ke sarana.

- **Sarana Distribusi Obat Tradisional**

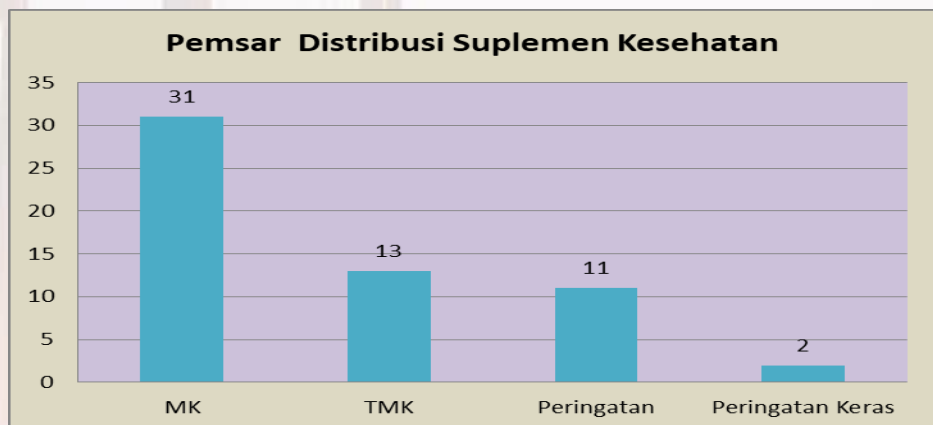


Grafik.33 Realisasi Pemsar Distribusi Obat Tradisional 2017

Temuan TMK:

Obat Tradisional tanpa izin edar (TIE), tanpa izin edar/kadaluarsa/rusak, TMK Penandaan dan tanpa izin edar produk kosmetik.

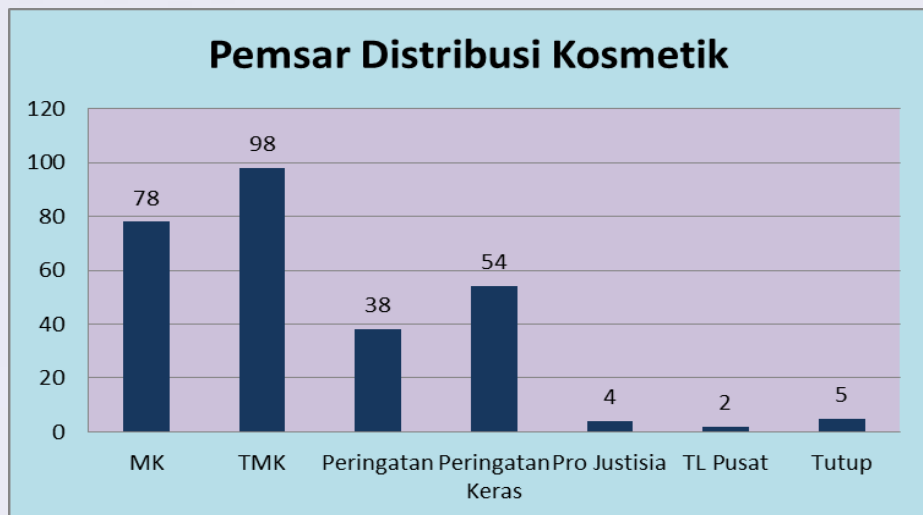
- **Sarana Distribusi Suplemen Kesehatan**



Grafik.34 Realisasi Pemsar Distribusi Suplemen Kesehatan 2017

Temuan: TMK Penandaan, TIE&TMK Penandaan, Administrasi, Tanpa Izin edar, ditemukannya komoditi lain selain OT, OT kadaluarsa dan rusak kemasan.

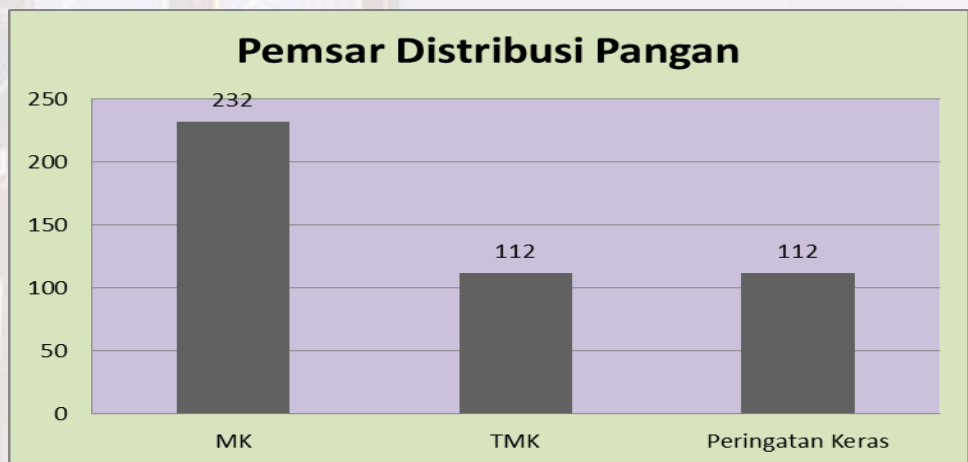
• Sarana Distribusi Kosmetik



Grafik 35. Realisasi Pemsar Distribusi Kosmetik 2017

Temuan pelanggaran antara lain ditemukan kosmetik rusak, kadaluarsa, tanpa izin edar, higiene sanitasi sarana, administrasi, kadaluarsa, TMK penandaan dan komoditi lain.

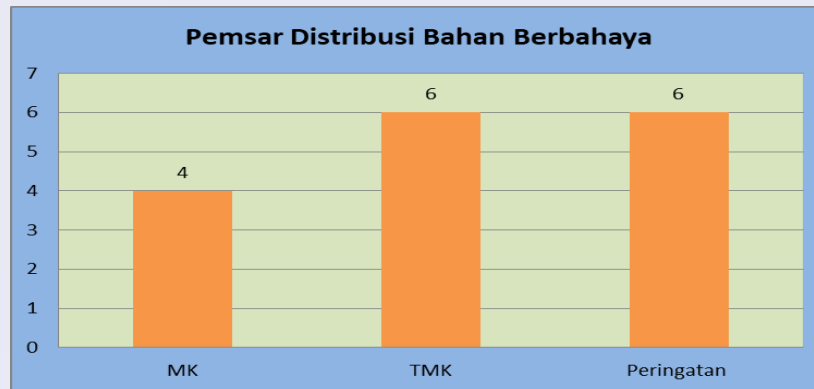
• Sarana Distribusi Makanan



Grafik 36. Realisasi Pemsar Distribusi Pangan 2017

Temuan antara lain produk tanpa izin edar (TIE), kadaluarsa, kemasan rusak, label yang tidak memenuhi ketentuan, penyimpanan, komoditi lain, bangunan, sarana & prasarana, administrasi serta kurang memperhatikan hygiene/sanitasi.

- **Sarana Distribusi Bahan Berbahaya**



Grafik 37. Realisasi Pemsar Distribusi Bahan Berbahaya 2017
Temuan Administrasi, Penyimpanan, Penggunaan dan Pelaporan.

- **Sarana Distribusi Parcel**

Dalam rangka menyambut hari besar keagamaan telah dilakukan pemeriksaan terhadap sarana distribusi parcel sebanyak 4 sarana dengan hasil memenuhi ketentuan.

b. Jumlah sarana distribusi obat dan makanan di wilayah pengawasan Balai Besar POM di Palembang:

Sarana	Jumlah Sarana Yang Ada
PBF	49
Apotek	618
Toko Obat Berizin	132
GFK	18
Rumah Sakit Pemerintah	67
Rumah Sakit Swasta	
Klinik/Balai Pengobatan/Rumah Bersalin	170
Puskesmas	323
Sarana Dist.KOSMETIKA	413
Sarana Dist. OBAT TRADISIONAL	76
Sarana Dist.Supl.Mkn	14
Sarana Dist.Pangan	1167
Sarana Distribusi Bahan Berbahaya	5
PENJUAL PARCEL	4
TOTAL	3056

Tabel 16. Jumlah sarana distribusi obat dan makanan di wilayah pengawasan BBPOM di Palembang

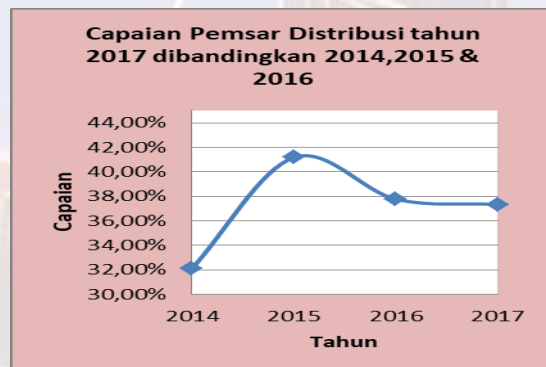
c. Pencapaian indikator kinerja kegiatan Persentase cakupan pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan terhadap target tahun 2017

- Pemeriksaan sarana distribusi yang tercapai adalah 1141 sarana (37,34%) dari 3056 sarana yang ada di Sumatera Selatan. Hasil tersebut lebih tinggi dari target renstra pada tahun 2017 yaitu 33,19%.

d. Pencapaian indikator kinerja kegiatan Persentase cakupan pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan terhadap target tahun 2019 (akhir periode Renstra)

Pencapaian terhadap target 2017 (33,19%) yaitu 112,49% dan pencapaian terhadap target akhir RPJMN (34,28%) yaitu: 108,92%. Realisasi tahun 2017 37,34%, hal ini melebihi target tahun 2017 (33,19%) dan bahkan target di akhir RPJMN (34,28%) sehingga perlu dilakukan review/penyesuaian target kembali.

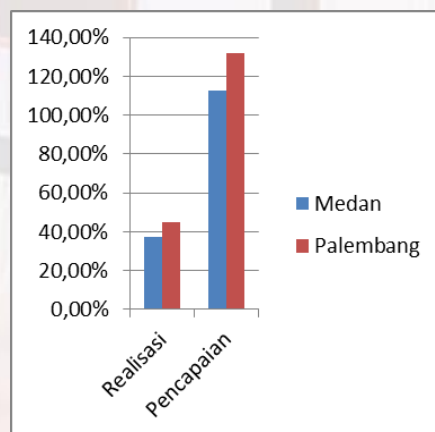
e. Persentase capaian terhadap baseline(2014), pencapaian 2015, 2016 dan 2017



Baseline adalah 32,10% sedangkan realisasi tahun 2015 adalah 41,17%, realisasi tahun 2016 sebesar 37,77% dan realisasi tahun 2017 sebesar 37,34%.

Grafik 38. Realisasi Persentase Cakupan Pemsar Distribusi OMKA 2014, 2015, 2016 & 2017

f. Perbandingan capaian persentase pemeriksaan sarana distribusi OMKA antara BBPOM di Palembang dengan BBPOM di Medan



Realisasi pemeriksaan sarana distribusi BBPOM di Palembang 1141 sarana yaitu 37,34% dengan persentase capaian 112,50% hal ini lebih besar dari capaian BBPOM di Medan dengan realisasi 44,60% dengan persentase capaian 131,8%. Semuanya ini tidak terlepas dari masih kurangnya SDM BBPOM di Palembang dengan luasnya cakupan area 17 kabupaten/kota di Propinsi Sumatera Selatan.

Grafik.39 Perbandingan Realisasi Persentase Pemsar Distribusi OMKA BBPOM di Palembang dengan BBPOM di Medan

g. Kegiatan dan faktor lain yang mendukung pencapaian indikator kinerja di atas:

- Kondisi geografis dan persebaran sarana distribusi obat dan makanan di wilayah pengawasan Balai Besar POM di Palembang tersebar di 17

- kabupaten/kota dengan kondisi geografis yang beragam tetapi masih dapat dilaksanakan oleh petugas karena kelancaran sarana transportasi.
- Perencanaan pengawasan sarana distribusi obat dan makanan yang sudah ada ditambah lagi dengan adanya kasus PCC (Paracetamol, Carisoprodol dan Caffein) yang menambah kuantitas pemeriksaan sarana dari jumlah yang telah direncanakan semula.
 - Kualitas dan kuantitas SDM terkait pengawasan sarana distribusi obat dan makanan sudah cukup memadai dengan adanya penambahan petugas yang mengikuti pelatihan cara distribusi obat yang baik, pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan kosmetik ilegal yang beredar di pasaran dan pelatihan lainnya.
 - Koordinasi dengan Pemerintah Daerah yang sudah cukup baik dengan adanya pendampingan setiap kali petugas melakukan pemeriksaan sarana distribusi.
 - Faktor pendukung lain adalah sarana dan prasarana yang mulai dilengkapi terkait pemeriksaan sarana seperti laptop, komputer, form checklist, kertas serta form-form yang terkait.

h. Upaya-upaya perbaikan yang telah dilakukan dalam mencapai kinerja sesuai tindak lanjut yang direncanakan tahun sebelumnya:

Perbaikan-perbaikan yang telah dilakukan adalah penambahan jumlah SDM seksi Pemeriksaan BBPOM di Palembang, sarana dan prasarana penunjang pemeriksaan sudah ditingkatkan dimana sudah berjalannya sistem pengetikan ditempat sarana terhadap berita acara pemeriksaan yang telah dibuat serta peningkatan kerjasama dengan lintas sektor.

i. Rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam meningkatkan/mempertahankan capaian kinerja ini adalah:

BBPOM di Palembang khususnya seksi pemeriksaan akan tetap mengoptimalkan SDM yang ada, pemenuhan sarana dan prasarana penunjang yang lebih memadai serta peningkatan kerjasama dengan lintas sektor terkait.

Sasaran Kegiatan :

Meningkatnya Hasil Tindak Lanjut Penyidikan terhadap Pelanggaran Obat dan Makanan

Indikator: Jumlah Perkara di Bidang Obat dan Makanan:

Indikator: Jumlah Perkara di Bidang Obat dan Makanan:

- a.** Realisasi jumlah perkara di bidang obat dan makanan
Jumlah pelanggaran tindak pidana di bidang obat dan makanan pada tahun 2017 adalah sebagai berikut :

NO	Jenis Produk	Jumlah Kasus	Tindak Lanjut				Keterangan	
			Non-Justisia	%	Pro-Justisia	%		SPDP
1	2	3	4	5	6	7	8	10
1.	OBAT	7	6	-	1	-	1	1 Kasus Pro justicia: Toko Obat
2.	PANGAN	2	1		1		1	- 1 Kasus Pro Justicia : Pabrik AMDK
3.	KOSMETIKA	2			2		2	2 kasus Pro justitia : Toko / kios kosmetika
4.	OTRAD	6	5		1		1	1 kasus Projustitia : Agen/ Distributor
TOTAL		17	12	0	5	0	5	

Tabel 17. Jumlah pelanggaran tindak pidana di bidang obat dan makanan pada tahun 2017

Sesuai arahan kepala Badan POM RI pada Rakesnas Tahun 2016, bahwa penyidikan harus lebih menasar ke hulu artinya, sasaran target penyidikan diupayakan agar dapat menyentuh sumber baik produsen maupun distributor, maka pada tahun 2017, BBPOM di Palembang telah melakukan pemberkasan terhadap sarana Pabrik Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) dan Agen atau Distributor Obat Tradisional yang Tidak Memiliki Izin Edar (TIE) serta toko Kosmetika Tanpa Izin Edar (TIE).



Gambar 3. Penindakan Pabrik AMDK pada Maret 2017

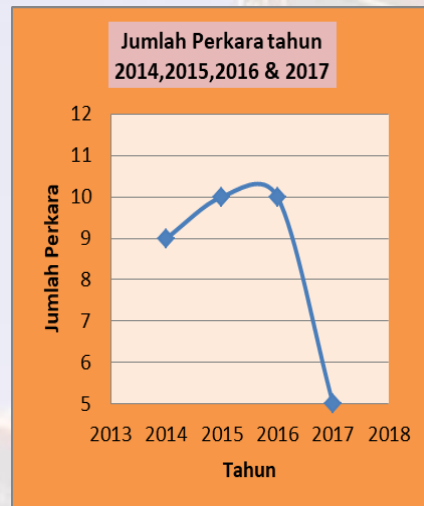
b. % capaian terhadap target tahun 2017

Persentase pencapaian terhadap target tahun 2017 adalah 50%

c. % capaian terhadap target tahun 2019 (akhir periode Renstra)

Persentase capaian terhadap target tahun 2019 (akhir periode renstra adalah 41,67% yaitu tercapai 5 perkara dengan target 12 perkara di tahun 2019.

d. Perbandingan realisasi tahun 2017 terhadap realisasi tahun-tahun sebelumnya :

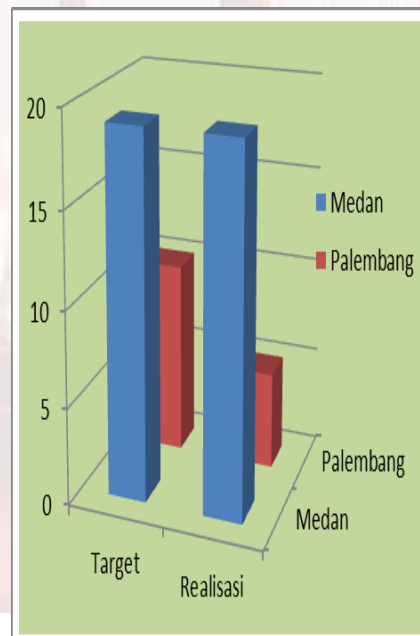


Grafik 40. Realisasi Jumlah Perkara tahun 2014,2015,2016 dan 2017

Realisasi tahun 2015 sebanyak 10 perkara, tahun 2016 sebanyak 10 perkara dan tahun 2017 sebanyak 5 perkara. Terjadi penurunan 50% hal ini dikarenakan adanya kasus yang ditindak Penyidik Balai Besar POM di Palembang mendapat perlawanan dari tersangka, sehingga penyidik kesulitan untuk menyelesaikan perkara tersebut ditambah tidak adanya penambahan personil di seksi penyidikan dan dengan segala kemampuan yang dimiliki seksi penyidikan telah berusaha untuk melakukan pencapaian jumlah perkara sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Tetapi karena keterbatasan dan hambatan tersebut, target tersebut hanya bisa tercapai 50 %.

e. Hal ini tidak melebihi target tahunan dan target di akhir RPJMN, tidak perlunya dilakukan review/penyesuaian target, tetapi yang diperlukan adalah bagaimana BBPOM di Palembang dapat selalu konsisten dalam merealisasikan jumlah perkara sesuai dengan target yang telah ditetapkan didalam perjanjian kinerja.

f. Perbandingan capaian antara BBPOM di Palembang dengan BBPOM di Medan:



Realisasi jumlah perkara di BBPOM di Medan adalah sebanyak 19 perkara dari target 19 perkara, sedangkan BBPOM di Palembang hanya tercapai 5 perkara dari target 10 perkara, hal ini dikarenakan penyidik BBPOM di Medan sudah optimal dalam melakukan proses investigasi sampai ke proses penyidikan serta kerjasama

dan hubungan antara BBPOM Medan dengan Kejaksaan dan Kepolisian (Criminal Justice System) yang sudah terjalin dengan baik.

Grafik.41 Perbandingan Target & Realisasi Jumlah Perkara BBPOM di Palembang dengan BBPOM di Medan tahun 2017

- g.** Kegiatan dan faktor lain di bawah ini yang mendukung pencapaian indikator kinerja di atas:
1. Perencanaan penyidikan terhadap pelanggaran di bidang obat dan makanan
 2. Operasi-operasi yang dilakukan
 3. Kualitas dan kuantitas SDM terkait penyidikan obat dan makanan
 4. Koordinasi dengan *Criminal Justice System* di daerah
 5. Faktor pendukung lain yang dianggap perlu
- h.** Upaya-upaya perbaikan yang telah dilakukan dalam mencapai kinerja sesuai tindak lanjut yang direncanakan tahun sebelumnya antara lain dengan menambah PPNS dan Intelijen baru, namun belum dapat memberikan kontribusi yang signifikan.
- i.** Rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam meningkatkan capaian kinerja ini antara lain :
1. Menambah personil Penyidik di Seksi Penyidikan baik PPNS yang baru selesai Pendidikan dan Latihan maupun memperbaharui Skep Penyidik lama yang sudah habis masa berlakunya.
 2. Memberdayakan PPNS dan intelijen baru di Balai Besar POM di Palembang terhadap kegiatan Penyidikan
 3. Meningkatkan koordinasi dengan lintas sektor terkait (Korwas, Kejati, dan Pengadilan)

Sasaran Strategis 2 : Meningkatkan Kemandirian Pelaku Usaha, Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan, dan Partisipasi Masyarakat

Indikator Kinerja Sasaran:

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Meningkatnya Kemandirian Pelaku Usaha, Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan, dan Partisipasi Masyarakat	Tingkat Kepuasan Masyarakat	84,00%	86,14%	102,60%	Memuaskan
	Jumlah Kabupaten/Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan	17	17	100,00%	Baik
Rata-rata				101,30%	Memuaskan

Tabel 18. Capaian Indikator Kinerja SS2 tahun 2017

Salah satu pilar pengawasan Obat dan Makanan adalah masyarakat sebagai konsumen. Obat dan Makanan yang diproduksi dan diedarkan di pasaran masih berpotensi untuk tidak memenuhi syarat, sehingga masyarakat harus lebih cerdas dalam memilih dan menggunakan produk obat dan makanan yang aman, bermanfaat dan bermutu. Dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat terkait Obat dan Makanan yang memenuhi syarat, BPOM harus memberikan kegiatan pembinaan dan bimbingan melalui Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) serta Penyebaran Informasi (PI).

A. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2017

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1	Tingkat Kepuasan Masyarakat	84,00%	86,18%	102,60%
2	Jumlah Kabupaten/Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan	17	17	100.0%
Rata-Rata				101,30%

Tabel 19. Perbandingan antara target dan realisasi indikator kinerja SS2 Tahun 2017

Berdasarkan tabel perbandingan antara capaian target dan realisasi kerja tahun 2017 didapatkan hasil rata-rata pencapaian **Memuaskan**. Hasil baik itu merupakan rata-rata dari capaian kinerja IKU dari 1 kriteria capaian baik dan 1 kriteria memuaskan.

B. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2017 dan Baseline

No	Indikator Kinerja	Baseline	Realisasi	% Capaian
1	Tingkat Kepuasan Masyarakat	83,79%	86,18%	102,85%
2	Jumlah Kabupaten/Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan	15	17	113,33%
Rata-Rata				108,09%

Tabel 20. Perbandingan antara realisasi indikator kinerja SS2 Tahun 2017 dengan Baseline 2014

Berdasarkan tabel perbandingan antara capaian target baseline (2014) dan realisasi kerja tahun 2017 didapatkan hasil rata-rata pencapaian **Memuaskan (108,09%)**. Hasil tersebut merupakan rata-rata dari capaian kinerja IKU dari 2 kriteria dengan capaian 2 kriteria Memuaskan. Hasil tingkat kepuasan masyarakat berdasarkan tabel dapat dilihat bahwa realisasi kinerja 2017 lebih tinggi dari baseline. Hasil realisasi kepuasan pelanggan tahun 2017 adalah 102,85% dengan kinerja unit pelayanan Memuaskan. Jumlah kabupaten/kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan lebih tinggi dari baseline yaitu 17 realisasi 2017 dengan baseline 2014 adalah 15 kabupaten/kota.

C. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2017 dan Rencana Jangka Menengah yang terdapat dalam Dokumen Renstra dan Standar Nasional

No	Indikator Kinerja	Target RPJM	Realisasi	% Capaian
1	Tingkat Kepuasan Masyarakat	84,20%	86,18%	102,35%
2	Jumlah Kabupaten/Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan	17	17	100,00%
Rata-Rata				101,18%

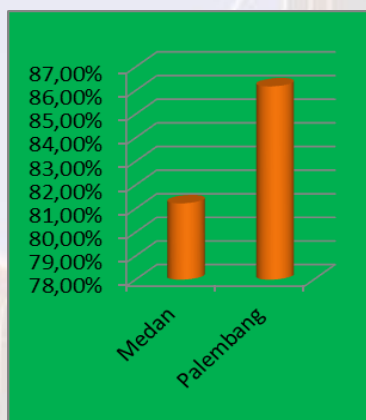
Tabel 21. Perbandingan antara realisasi indikator kinerja SS2 Tahun 2017 dengan rencana tahun akhir RPJM (2019)

Berdasarkan tabel perbandingan antara capaian target rencana jangka menengah dan realisasi kerja tahun 2017 didapatkan hasil rata-rata pencapaian **Memuaskan (101,18%)**. Hasil cukup itu merupakan rata-rata dari capaian kinerja IKU dari 1 kriteria dengan

capaian Memuaskan yaitu kriteria tingkat kepuasan masyarakat (102,35%) dan 1 capaian Baik yaitu jumlah kabupaten/kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan obat dan makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi obat dan makanan adalah 17 kabupaten dari target rencana jangka menengah pada tahun 2019 yaitu 17 kabupaten (100,00%).

D. Perbandingan antara realisasi BBPOM di Palembang 2017 dengan realisasi 2014 BBPOM di Palembang

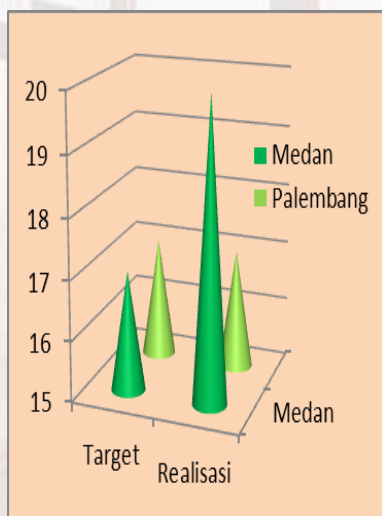
1. Perbandingan realisasi Tingkat Kepuasan Masyarakat BBPOM di Palembang dengan BBPOM di Medan



Perbandingan tingkat kepuasan masyarakat BBPOM di Palembang realisasi: 86,18% dengan target 84,00% dan capaian sebesar 102,60% sedangkan BBPOM di Medan realisasi: 81,23% dengan target 93,00% dan capaian sebesar 87,34%. Nilai ini tidak serta merta menentukan bahwa BBPOM di Palembang lebih baik dari BBPOM di Medan dari segi pelayanan publik karena penilaian hanya berdasarkan kuantitas.

Grafik.42 Perbandingan Realisasi Tingkat Kepuasan Masyarakat BBPOM di Palembang tahun 2017 dengan BBPOM di Medan

2. Perbandingan realisasi Jumlah Kabupaten/Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi obat dan makanan



Perbandingan realisasi Jumlah Kabupaten/Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi obat dan makanan untuk BBPOM di Palembang target 17 kabupaten/kota dengan realisasi 17 kab/kota sehingga tercapai 100% sedangkan BBPOM di Medan dari 17 kabupaten/kota sebagai targetnya terealisasi sebanyak 20 kabupaten/kota dengan pencapaian 117,65%.

Grafik.43 Perbandingan Jumlah Kabupaten/Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan OMKA dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi obat dan makanan

E. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan serta Peningkatan dan Penurunan Kinerja Berserta Solusi

1. Capaian Kinerja Tingkat Kepuasan Masyarakat

Tingkat kepuasan masyarakat diukur dari layanan publik berupa layanan informasi melalui Unit Layanan Pengaduan Konsumen, layanan rekomendasi sarana produksi dan distribusi serta pengujian obat dan makanan.

Pengukuran dilakukan menggunakan form survei yang diisi oleh masyarakat yang menerima layanan. Form survey yang terkumpul sebanyak 57 form. Pelaksanaan survei mengacu pada empat aspek utama yaitu aspek pelayanan petugas, sarana dan prasarana, biaya pelayanan dan produk pelayanan yang tercakup dalam 12 unsur pelayanan yang terdapat dalam form survei yaitu :

- Persyaratan pelayanan
- Prosedur layanan
- Waktu Pelayanan
- Biaya/tarif
- Produk spesifikasi jenis pelayanan
- Kompetensi pelaksana
- Perilaku Pelaksana
- Maklumat Pelayanan
- Penanganan pengaduan, saran dan masukan
- Kenyamanan
- Kedisiplinan
- Teknologi Informasi



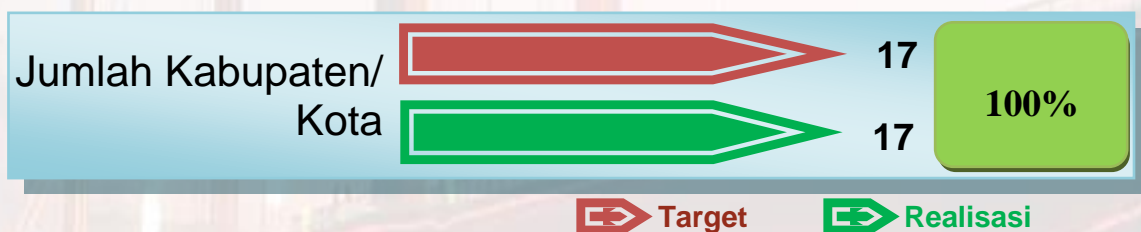
Grafik 44. Tingkat kepuasan masyarakat tahun 2017

TINGKAT KEPUASAN MASYARAKAT					
Target 2017	Realisasi				Target Renstra
	2017	2016	2015	2014	
84,020%	86,18%	82,61%	81,02%	81,79%	84,20%

Tabel 22. Realisasi Tingkat Kepuasan Masyarakat 2014,2015,2016,2017 serta target 2017 dan Renstra 2019.

Dari pengukuran tingkat kepuasan masyarakat ini terlihat bahwa target tahun 2017 tercapai dan tingkat kepuasannya lebih baik dari tahun 2014,2015 dan 2016. Tingkat kepuasan Masyarakat ini diharapkan semakin baik dari waktu ke waktu walaupun sudah melewati target akhir RPJMN (2019) nanti akan direview kembali target tersebut. Terkait hal tersebut diatas, maka upaya-upaya yang perlu dilakukan dalam rangka peningkatan capaian kinerja sasaran tersebut antara lain :

- Berupaya untuk konsisten terhadap perjanjian waktu pelayanan yang telah disepakai oleh pihak ketiga dan pihak Balai Besar POM Di Palembang sebagai pihak penyelenggara pelayanan. Balai Besar POM Palembang telah menerapkan kesepakatan waktu penyelesaian layanan dengan pihak ke-3.
 - Perbaiki komitmen organisasi dan personil dalam memahami kebutuhan masyarakat
 - Meningkatkan kemampuan pelayanan dengan meningkatkan kompetensi personil. Pada tahun 2016 telah dilaksanakan pelatihan *service excellent* tetapi masih untuk sebagian pegawai.
2. Capaian Kinerja Jumlah Kabupaten/Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi obat dan makanan.



Gambar 4. Capaian jumlah kabupaten/kota tahun 2017

JUMLAH KABUPATEN/KOTA YANG MEMBERIKAN KOMITMEN UNTUK PELAKSANAAN PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN DENGAN MEMBERIKAN ALOKASI ANGGARAN PELAKSANAAN REGULASI OBAT DAN MAKANAN					
Target	Realisasi				Target
2017	2017	2016	2015	2014	Renstra
17	17	16	15	15	17

Tabel 23. Realisasi jumlah kab/kota 2014,2015,2016 &2017 serta target 2017 & Renstra 2019

Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan yang memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan, pada tahun 2017 sebanyak 17 Kabupaten/Kota atau 100% dari target 17 Kabupaten/Kota. Paramater pengukurannya dilihat dari aktifitas pengawasan obat dan makanan secara mandiri dilakukan oleh pemda Kabupaten/Kota dan permintaan narasumber terkait obat dan makanan kepada Balai Besar POM di Palembang.

Upaya BBPOM di Palembang untuk meningkatkan jumlah kabupaten/kota yang mengalokasikan anggaran pelaksanaan regulasi obat dan makan dilakukan dengan kegiatan pertemuan lintas sektor terkait dari Kabupaten/Kota serta advokasi dan sosialisasi pengawasan obat dan makanan.

F. PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN

Indikator Kinerja Kegiatan

SASARAN STRATEGIS	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET 2017	REALISASI	% CAPAIAN
Meningkatnya Kemandirian Pelaku Usaha, Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan dan Partisipasi Masyarakat	Meningkatnya Kerjasama, Komunikasi, Informasi dan edukasi (KIE)	Jumlah Layanan Publik	310	356	114,84
		Jumlah Komunitas yang diberdayakan	17	21	123,53

Tabel 24. Capaian realisasi indikator sasaran kegiatan dari SS2 terhadap target tahun 2017

Dalam menunjang pencapaian SS.2, terdapat 2 indikator kinerja kegiatan dengan sasaran Kegiatan Meningkatkan Kerjasama, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) yaitu Jumlah Layanan Publik dan Jumlah Komunitas yang Diberdayakan.

E. 1. JUMLAH LAYANAN PUBLIK BBPOM DI PALEMBANG

Jumlah layanan publik termasuk ke dalam sasaran kegiatan yang dilakukan untuk menunjang pencapaian 2 IKU tersebut di atas. Layanan publik terdiri dari Layanan informasi, Layanan Sertifikasi, dan layanan pengujian pihak ketiga. Target jumlah layanan publik pada tahun 2017 adalah 310 layanan dengan baseline (2014) 237 layanan. Realisasi jumlah layanan untuk tahun 2017 adalah sebanyak 356 layanan (114,84 %) dan dijabarkan satu persatu di bawah ini :



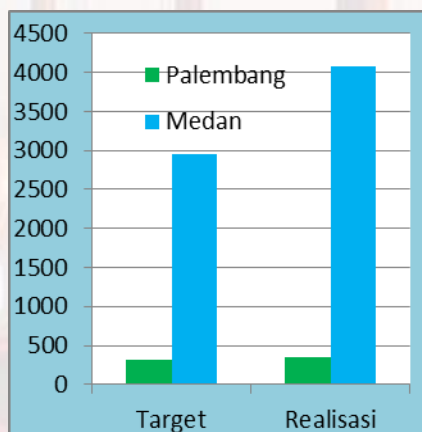
Gambar 5. Capaian Jumlah Layanan Publik 2017

JUMLAH LAYANAN PUBLIK					
Target	Realisasi				Target
2017	2017	2016	2015	2014	Renstra
310	356	331	414	278	330

Tabel 25. Realisasi Jumlah Layanan Publik 2014,2015,2016 & 2017 serta target 2017 & Renstra 2019

Jumlah layanan publik sejak tahun 2014 cenderung meningkat bahkan melebihi target tahunan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu diperlukan reuiu target tersebut hingga akhir RPJM pada tahun 2019

Perbandingan Jumlah Layanan Publik BBPOM di Palembang dengan BBPOM di Medan:



Jumlah layanan publik BBPOM di Palembang tahun 2017 adalah 356 dari 310 target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian kinerja Tahun 2017 (114,84%), sedangkan BBPOM di Medan jumlah layanan publik adalah 4081 dengan target 2950 pencapaian sebesar 138,34%, dari hasil ini juga menunjukkan bahwa antusias masyarakat cukup tinggi terhadap pelayanan publik BPOM baik berupa layanan informasi, layanan sertifikasi maupun layanan pengujian pihak ke-3.

Grafik 45. Perbandingan Jumlah Layanan Publik BBPOM di Palembang dengan BBPOM di Medan

Pada akhir tahun 2017 telah dilakukan Evaluasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia terhadap 72 Kabupaten kota Role Model sesuai dengan KepMenPan Nomor 21 Tahun 2017 tentang Penetapan Provinsi, Kabupaten/Kota, Kementerian/Lembaga dan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Sebagai Lokasi Penyelenggaraan Evaluasi Pelayanan Publik Tahun 2017 dengan hasil Balai Besar POM di Palembang mendapatkan Piagam Penghargaan sebagai Role Model Penyelenggara Pelayanan Publik Kategori “Sangat Baik”.

- Layanan Informasi

Layanan Informasi diukur berdasarkan jenis dan frekuensi layanan informasi dan tindaklanjut pengaduan yang dilakukan oleh Balai Besar/Balai POM baik penyuluhan langsung atau melalui media cetak/elektronik. Pada tahun 2017 kegiatan layanan informasi yang telah dilakukan sebanyak 6 jenis kegiatan. Hasil tersebut jauh melebihi target yang telah ditetapkan. Kegiatan layanan informasi yang dilakukan selama tahun 2017: Penyuluhan dan talkshow, Pameran, Bimtek, Penyuluhan, Layanan pengaduan masyarakat dan Iklan layanan masyarakat.

- Layanan Sertifikasi

Layanan sertifikasi merupakan salah satu pelayanan publik yang telah dilakukan oleh Balai Besar POM Di Palembang. Untuk pelayanan Surat Keterangan Impor (SKI) dan Surat Keterangan Ekspor (SKE) Balai Besar POM di Palembang pada tahun 2017 menerbitkan 33 SKI (4 SKI Bahan Tambahan Pangan, 26 SKI Bahan Baku Pangan, 1 Bahan Non Pangan, 1 Bahan Kimia HS Code OTKOS dan 1 Bahan Suplemen Kesehatan). Rekomendasi sarana produksi sebanyak 12 sarana (Produksi Makanan MD) berupa pendaftaran produk pangan olahan dan rekomendasi sarana distribusi sebanyak 6 sarana (PBF).

- Layanan Pengujian Pihak ke-3

Selain melakukan pengujian dari sampel reguler, Balai Besar POM Di Palembang juga melakukan pengujian dari pihak ke-3 sebagai salah satu bentuk pelayanan kepada masyarakat. Pada tahun 2017 jumlah sampel pihak ke-3 sejumlah 395 sampel (260 sampel umum, 4 sampel kasus, 39 sampel kasus penyidikan PPNS dan 92 sampel pangan buka puasa). Hasil pengujian menunjukkan 244 sampel MS dan 151 sampel dinyatakan TMS. Sampel pangan mengambil porsi TMS terbanyak yaitu 149 sampel berupa pangan siap saji dan pangan basah seperti mie basah dan tahu.

E.2. JUMLAH KOMUNITAS YANG DIBERDAYAKAN



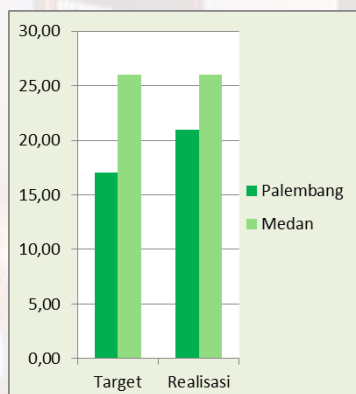
Gambar 6. Capaian Jumlah Komunitas yang diberdayakan tahun 2017

JUMLAH KOMUNITAS YANG DIBERDAYAKAN					
Target	Realisasi				Target
2017	2017	2016	2015	2014	Renstra
17	21	17	5	-	19

Tabel 26. Realisasi Jumlah Komunitas yang diberdayakan tahun 2014, 2015, 2016 & 2017 serta Target 2017 & Renstra 2019

Pada tahun 2017 telah dilakukan pemberdayaan komunitas sebanyak 21 komunitas (123,53%) dari target 17 komunitas dalam bentuk kegiatan Gerakan Keamanan Pangan Desa dan Pasar Aman dari Bahan Berbahaya. Hal ini karena rencana pelaksanaan yang telah disusun sebanyak 17 komunitas dalam tahun berjalan ada penambahan komunitas sebanyak 4 komunitas yaitu 3 Desa dan 1 pasar.

Perbandingan Jumlah Komunitas yang diberdayakan BBPOM di Palembang dengan BBPOM di Medan:



Jumlah komunitas yang diberdayakan BBPOM di Palembang tahun 2017 adalah 21 dari 17 target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian kinerja Tahun 2017 (123,53%), sedangkan BBPOM di Medan Jumlah komunitas yang diberdayakan adalah 26 dengan target 26 pencapaian sebesar 100,00%, dari hasil ini juga menunjukkan bahwa semakin banyaknya kelompok masyarakat yang mendapatkan pelayanan Penyebaran informasi dan KIE (Konsultasi, Infomasi dan Edukasi) BPOM.

Grafik 46. Perbandingan Jumlah Komunitas yang diberdayakan BBPOM di Palembang dengan BBPOM di Medan 2017

Gerakan Keamanan Pangan Desa (GKPD)

Kegiatan GKPD telah dilakukan sejak tahun 2014 dan secara akumulatif ditahun 2017 telah diberdayakan sebanyak 16 Desa/Kelurahan di Kabupaten Ogan Ilir, Kota Palembang Kota Lubuk Linggau dan kota Pagar Alam. Pemberdayaan masyarakat desa ini dilakukan dengan pemberian pengetahuan dan praktek keamanan pangan di rumah tangga, pelaku usaha rumah tangga dan kantin sekolah.

Pasar Aman dari Bahan Berbahaya.

Telah dilakukan monitoring di 5 pasar yaitu Pasar Cinde, Pasar Lemabang dan Pasar Km.5 di Kota Palembang, Pasar Bukit Sulap di Kota Lubuk Linggau dan Nendagung Pasar Pagar Alam. Dilakukan pemberian pengetahuan keamanan pangan kepada petugas pasar dan pedagang pasar khususnya bahaya penggunaan bahan-bahan berbahaya yang dilarang digunakan pada pangan serta cara mendeteksinya. Kepada petugas pasar juga diberikan test kit untuk mendeteksi formalin, boraks, pewarna merah rhodamin B dan pewarna kuning metanil yellow.

Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya Kualitas Kapasitas Kelembagaan BBPOM Di Palembang

Indikator Kinerja Sasaran

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Meningkatnya Kualitas Kapasitas Kelembagaan BPOM	Nilai SAKIP Balai Besar POM di Palembang	70,01 (BB)	70,62 (BB)	100,87	Memuaskan

Tabel 27. Pencapaian indikator kinerja SS3 terhadap target tahun 2017

Penguatan kelembagaan/ organisasi adalah prasyarat tercapainya tujuan dan sasaran strategis BPOM (1 dan 2). Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik secara konsisten ditandai dengan berkembangnya aspek keterbukaan, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, supremasi hukum, keadilan, dan partisipasi masyarakat. Untuk melaksanakan tugas BPOM, diperlukan penguatan kelembagaan/ organisasi. Penataan dan penguatan organisasi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi secara proporsional menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi BPOM.

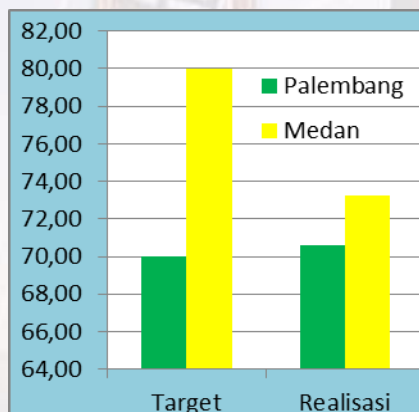
Perbandingan Antara Target Jangka Menengah 2019, Target 2017, dan Realisasi Kinerja Tahun 2017

No.	Indikator Kinerja	Target 2017	Target Rencana Jangka Menengah	Realisasi	% Capaian
1	Nilai SAKIP BBPOM dari Badan POM	70,01 (BB)	80,00 (A)	70,62 (BB)	88,28

Tabel 28. Perbandingan antara realisasi indikator SS3 terhadap target RPJM 2019

Untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis ini, maka indikator sasaran strategis ini pada Balai Besar POM di Palembang adalah nilai SAKIP dari BPOM adalah BB. Realisasi hasil penilaian SAKIP Tahun 2016 dari BPOM pada tahun 2017 adalah BB dengan nilai 70,62 yang berarti terealisasi 100,87% (Memuaskan) tetapi apabila hal ini dibandingkan dengan pencapaian beberapa tahun lalu yaitu realisasi nilai SAKIP 2014 dari BPOM tahun 2015 adalah 62,46 dan nilai SAKIP 2015 dari BPOM tahun 2016 69,20 terjadi peningkatan sebesar 113,06%(2014) dan 102,05% (2015). Namun secara target untuk mencapai nilai A sesuai dengan Perjanjian Kinerja tidak tercapai ditahun 2017. Hal tersebut terjadi karena perencanaan, capaian kinerja, dan pelaporan yang belum optimal. Perlu dilakukan perbaikan ke depannya agar lebih baik lagi.

Perbandingan Nilai SAKIP BBPOM di Palembang dengan BBPOM di Medan Tahun 2017:



Nilai SAKIP BBPOM di Palembang tahun 2017 adalah 70,62 (BB) dari 70,01 target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian kinerja Tahun 2017 (100,87%), sedangkan BBPOM di Medan Nilai SAKIP 73,28 dengan target 80 pencapaian sebesar 100,00%, dari hasil ini juga menunjukkan bahwa semakin akuntabilitas BPOM dalam penyusunan Laporan Kinerja dari tahun ke tahun.

Grafik 47. Perbandingan Nilai SAKIP BBPOM di Palembang dengan BBPOM di Medan tahun 2017

Indikator Kinerja Kegiatan

SASARAN STRATEGIS	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET 2017	REALISASI	% CAPAIAN
Meningkatnya Kualitas Kapasitas Kelembagaan BPOM	Pengadaan sarana dan prasarana yang terkait Pengawasan Obat dan Makanan	Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana sesuai standar	85,00%	85,00%	100,00
	Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, Keuangan dan Evaluasi yang dilaporkan tepat waktu.	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, Keuangan dan Evaluasi yang dilaporkan Tepat Waktu.	10	10	100,00

Tabel 29. Capaian realisasi indikator kinerja sasaran kegiatan dari SS3 terhadap target 2017

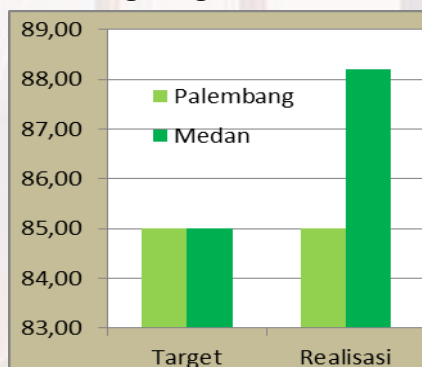
Sasaran Kegiatan: Pengadaan Sarana dan Prasarana yang Terkait Pengawasan Obat dan Makanan

Indikator: Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana Sesuai Standar

Realisasi persentase pemenuhan sarana prasarana pada Balai Besar POM di Palembang sesuai standar, mencakup persentase pemenuhan sarana dan prasarana kerja dan persentase pemenuhan alat laboratorium adalah sebesar 85,00% terhadap target tahun 2017 sebesar 85,00%. Dalam hal ini berarti pemenuhan sarana dan prasarana sudah sesuai dengan target yang telah ditetapkan (pencapaian 100% dari target). Target ini perlu ditingkatkan lagi sehingga dapat mencapai pemenuhan 90% pada akhir RPJMN yaitu sebesar 90%.

Hal-hal yang perlu dilakukan untuk mendukung pencapaian indikator pemenuhan sarana dan prasarana sesuai standar di atas adalah dengan membuat perencanaan pengadaan sarana dan prasarana yang harus disesuaikan antara standar kebutuhan, waktu pelaksanaan dan kecukupan anggaran yang tersedia.

Perbandingan Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana Sesuai Standar BBPOM di Palembang dengan BBPOM di Medan:



dalam kelancaran kinerja BPOM.

Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana BBPOM di Palembang tahun 2017 adalah 85% dari 85% target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian kinerja Tahun 2017 (100,00%), sedangkan BBPOM di Medan Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana tahun 2017 adalah 88,19% dengan target 85% pencapaian sebesar 103,75%, dari hasil ini juga menunjukkan bahwa semakin tersedianya sarana dan prasarana yang dibutuhkan

Grafik 48. Perbandingan Capaian Sarpras 2017 BBPOM di Palembang dengan BBPOM di Medan

Sasaran Kegiatan: Penyusunan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi yang Dilaporkan Tepat Waktu

Indikator: Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi yang Dilaporkan Tepat Waktu

Realisasi jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, keuangan, dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu pada tahun 2017 (100%). Daftar dokumen tersebut meliputi 10 dokumen, yaitu :

- a. Laporan Kinerja 2016,
- b. LAPTAH 2016,
- c. Laporan Keuangan Semester II 2016,
- d. Laporan Triwulan IV 2016,
- e. Laporan Triwulan I 2017,
- f. Perjanjian Kinerja 2017,
- g. Laporan Triwulan II 2017,
- h. Laporan Keuangan semester I 2017,
- i. Laporan Triwulan III 2017,
- j. RKAKL/DIPA 2018.

Perbandingan Realisasi Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi yang Dilaporkan Tepat Waktu tahun 2014, 2015, 2016 dan akhir RPJMN 2019

Target dokumen tahun 2019 (akhir periode Renstra) sebanyak 10 dokumen. Setiap tahun realisasi target dokumen perencanaan, penganggaran, keuangan, dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu ini selalu tercapai 100% termasuk untuk tahun 2017 ini.

Perbandingan Realisasi Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi yang Dilaporkan Tepat Waktu BBPOM di Palembang dengan BBPOM di Medan:



Realisasi Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi yang Dilaporkan Tepat Waktu BBPOM di Palembang tahun 2017 adalah 10 dari 10 target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian kinerja Tahun 2017 (100,00%), sedangkan BBPOM di Medan Realisasi Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi yang Dilaporkan Tepat Waktu tahun 2017 adalah 10 dengan target 10 pencapaian sebesar 100%, dari hasil ini juga menunjukkan bahwa semakin konsisten Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi yang Dilaporkan Tepat Waktu BPOM.

Grafik 49. Perbandingan Realisasi Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran & Evaluasi yang dilaporkan tepat waktu BBPOM di Palembang dengan BBPOM di Medan

3.2 Realisasi Anggaran

Pada tahun 2017, Balai Besar POM di Palembang memperoleh anggaran sebesar Rp. 27.538.165.000,-. Tetapi pada perjalanannya terjadi efisiensi anggaran sebanyak 1 kali. Efisiensi anggaran sebesar Rp. 4.448.922.000,- sehingga anggaran sebenarnya yang bisa digunakan oleh BBPOM di Palembang adalah sebesar Rp. 23.089.243.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 21.143.240.765,- (91,57%), dengan rincian sebagai berikut :

NO	SUMBER ANGGARAN	BELANJA PEGAWAI (RP)		BELANJA BARANG (RP)		BELANJA MODAL		TOTAL	
		PAGU	REALISASI	PAGU	REALISASI	PAGU	REALISASI	PAGU	REALISASI
1	Rupiah Murni (RM)	5.560.487.000	5.280.547.785	9.714.856.000	8.404.227.990	6.663.900.000	6.373.970.565	21.939.243.000	20.058.746.340
2	PNBP	0	0	1.150.000.000	1.084.494.425	0	0	1.150.000.000	1.084.494.425
JUMLAH		5.560.487.000	5.280.547.785	10.864.856.000	9.488.722.415	6.663.900.000	6.373.970.565	23.089.243.000	21.143.240.765

Tabel 30. Rincian anggaran dan realisasi Balai Besar POM di Palembang Tahun 2017

Jenis Anggaran	2015		2016		2017	
	Pagu	Realisasi	Pagu Setelah self blocking	Realisasi Setelah self blocking	Pagu	Realisasi
Belanja Pegawai	5.994.548.000	5.105.562.416	5.503.922.000	5.311.048.103	5.560.487.000	5.280.547.785
Belanja Barang	8.541.535.000	7.377.589.916	9.987.953.000	9.093.500.293	10.864.856.000	9.488.722.415
Belanja Modal	10.306.210.000	10.196.815.264	4.887.080.000	4.396.430.426	6.663.900.000	6.373.970.565
Total	24.842.293.000	22.679.967.596	20.378.955.000	18.800.978.822	23.089.243.000	21.143.240.765
Serapan Anggaran	-	91,30%		92,26%		91,57%
Target serapan anggaran	-	99,00%		99,00%		99,00%

Tabel 31. Profil anggaran DIPA BBPOM di Palembang dari tahun 2015-2017

Realisasi Anggaran Balai Besar POM di Palembang per Sasaran Strategis:

NO	SASARAN STRATEGIS/ KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	% SERAPAN ANGGARAN
1.	Menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan	Rp. 2.217.749.000	Rp. 1.935.975.284	87,29%
2.	Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat	Rp. 2.651.255.000	Rp. 2.166.004.188	81,70%
3.	Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan Balai Besar POM di Palembang	Rp. 18.220.239.000	Rp.17.041.261.293	93,53%
	TOTAL	Rp. 23.089.243.000	Rp.21.143.240.765	91,57%

Tabel 32. Realisasi anggaran berdasarkan sasaran strategis

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa alokasi anggaran terbesar adalah untuk mendukung sasaran ketiga yaitu “Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan Balai Besar POM di Palembang” diikuti oleh sasaran kedua “Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat” dan selanjutnya sasaran pertama “Menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan“. Sasaran pertama merupakan tugas pokok dan fungsi pengawasan Obat dan Makanan, sedangkan sasaran ketiga merupakan tulang punggung pengawasan, dalam arti kata lain bahwa sasaran ketiga memegang peranan yang sangat penting dalam mendukung kegiatan pengawasan.

Rata-rata realisasi anggaran untuk sasaran strategis adalah 91,57%. Realisasi anggaran pada sasaran strategis pertama paling rendah diantara realisasi anggaran sasaran strategis lainnya, sebesar 81,70%.

Sehubungan dengan pengelolaan keuangan/dana selama tahun anggaran 2017 pada Balai Besar POM di Palembang dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Secara garis besar pelaksanaan aspek keuangan ini telah diupayakan sesuai dengan prinsip-prinsip laporan yang lazim, dan pertanggungjawabannya diupayakan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, hemat, efisien dan efektif dengan menghindarkan seminimal mungkin penyalahgunaan.
- Akuntabilitas keuangan secara lengkap dan rinci, dipertanggungjawabkan melalui Laporan Realisasi Anggaran Balai Besar POM di Palembang tahun 2017.

3.3 Analisis Efisiensi Kegiatan

Fokus pengukuran efisiensi adalah indikator input dan output dari suatu kegiatan, dalam hal ini, diukur kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan input yang lebih sedikit dalam menghasilkan output yang sama/lebih besar, atau penggunaan input yang sama dapat menghasilkan output yang sama/lebih besar, atau persentase capaian output sama/lebih tinggi daripada persentase capaian input. Efisiensi suatu kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE).

Indeks efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi % capaian output terhadap % capaian input sesuai rumus berikut :

$$IE = \frac{\% \text{ capaian output}}{\% \text{ capaian input}}$$

Sedangkan standar efisiensi (SE) merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Dalam hal ini, SE yang digunakan adalah indeks efisiensi sesuai rencana capaian, yaitu 1, yang diperoleh dengan menggunakan rumus:

$$\begin{aligned} SE &= \frac{\% \text{ rencana capaian output}}{\% \text{ rencana capaian input}} \\ &= \frac{100\%}{100\%} \\ &= 1 \end{aligned}$$

Selanjutnya efisiensi suatu kegiatan ditentukan dengan membandingkan IE terhadap SE, mengikuti formula logika berikut :

Jika $IE > SE$, maka kegiatan dianggap efisien
Jika $IE < SE$ maka kegiatan dianggap tidak efisien

Kemudian, terhadap kegiatan yang efisien atau tidak efisien tersebut diukur tingkat efisiensi (TE) yang menggambarkan seberapa besar efisiensi/ketidakefisienan yang terjadi pada masing-masing kegiatan, dengan menggunakan rumus berikut:

$$TE = \frac{IE - SE}{SE}$$

Efisiensi Capaian Kegiatan Sasaran Strategis BBPOM di Palembang:

NO	SASARAN STRATEGIS/ KEGIATAN	% SERAPAN ANGGARAN	Tingkat Efiseinsi	Kategori
1.	Menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan	87,29%	0,56	Efisien
2.	Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat	81,70%	0,56	Efisien
3.	Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan Balai Besar POM di Palembang	93,53%	0,22	Efisien
	TOTAL	91,57%	0,45	Efisien

Tabel 33. Efisiensi Capaian Kegiatan Sasaran Strategis BBPOM di Palembang

Pada tahun 2017 seluruh kegiatan yang menjadi implementasi Sasaran Strategis 1,2 dan 3 EFISIEN dengan rata-rata tingkat Efisiensi 0,45. Berdasarkan perhitungan efisiensi sasaran, dapat diketahui bahwa efisiensi paling tinggi terdapat pada sasaran strategis kesatu dan kedua yaitu Menguatnya Sistem Pengawasan Obat & Makanan dan Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat, sedangkan efisiensi paling rendah terdapat pada sasaran ketiga yaitu Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan BPOM. Hal ini disebabkan oleh adanya beberapa kegiatan yang tidak dilaksanakan, walaupun demikian capaian output masih bisa dipertahankan sesuai target.

Dari 16 kegiatan yang terdiri dari 154 sub kegiatan yang dilaksanakan, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang telah berhasil melaksanakan sebanyak 143 (92,86%) kegiatan dan tidak dilaksanakan 11 (7,14%) sub kegiatan. Dari 143 kegiatan yang telah dilakukan ada 5 sub Kegiatan yang dilaksanakan dengan memakai dana pusat yang pelaksanaannya tidak menggunakan anggaran yang telah disediakan dan ada 2 sub kegiatan di balai yang terlaksana tetapi memakai dana sub kegiatan lain didalam 1 kegiatan yang sama. Dari 143 subkegiatan yang telah dilaksanakan tersebut setelah dianalisis dan dievaluasi terdapat 131 (91,61%) subkegiatan yang efisien, 5 (3,50%) subkegiatan tidak efisien, 7 (4,89%) subkegiatan yang tidak dapat dihitung efisiensinya karena 5 sub kegiatan menggunakan dana pusat tanpa mencairkan DIPA Balai Besar POM di Palembang dan 2 subkegiatan menggunakan dana subkegiatan lain pada satu kegiatan yang sama. Untuk kegiatan yang tidak efisien dengan nilai TE -0,05, -0,03, dan -0,04. Dalam hal ini, semakin tinggi TE maka semakin rendah ketidakefisienan yang terjadi.

No	Nama Kegiatan	TE
1	Penasehat Hukum Investigasi Awal dan Penyidikan Tindak Pidana Obat dan Makanan (Target Operasi/dalam Kota) Palembang	-0,67
2	Penasehat Hukum Investigasi Awal dan Penyidikan Tindak Pidana Obat dan Makanan (Target Operasi/luar Kota) Palembang	-0,57
3	Pemberkasan	-0,06
4	Konsultasi Penyelesaian Berkas Perkara	-0,53
5	Advokasi & sosialisasi BBPOM ke Kab/Kota	-0,01

Tabel 34. Kegiatan tahun 2017 yang tidak efisien.

Untuk kegiatan yang dinilai tidak efisien, antara lain Penasehat Hukum baik kegiatan Investigasi Awal dan Penyidikan Tindak Pidana Obat dan Makanan dalam kota maupun luar kota, pemberkasan, konsultasi penyelesaian berkas perkara yang semuanya tidak efisien karena tidak tercapainya target seksi penyidikan sebesar 10 perkara di tahun 2017 (tercapai hanya 5 perkara).

Untuk kegiatan Advokasi & sosialisasi BBPOM ke kab/kota tidak efisien karena tidak tercapainya output sebesar 16 kali (realisasi hanya 11 kali). Sedangkan untuk kegiatan FGD koordinasi dan pemantaban Tahubja dengan lintas sektor yang seharusnya dua kali kegiatan namun hanya dilaksanakan sebanyak 1 kali.

Kegiatan yang tidak dilaksanakan sejumlah 7 (tujuh) kegiatan (4,54%), dikarenakan terdapat beberapa kegiatan yang dianggarkan oleh BBPOM di Palembang tetapi tidak dilaksanakan oleh BPOM Pusat, sehingga kegiatan tersebut tidak dapat direalisasikan oleh Balai Besar POM Palembang.

Beberapa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan oleh BBPOM di Palembang yaitu:

1. Pelatihan fasilitator pasar aman dari bahan berbahaya (Kegiatan Pusat)
2. Monitoring dan evaluasi - balai : kegiatan Komunitas yang diberdayakan (Kegiatan Balai)
3. Perjalanan monitoring kepala balai ke wilayah kerja (Kegiatan Balai)
4. Reformasi Birokrasi (Kegiatan Balai).
5. Peningkatan kompetensi ASN (Kegiatan Balai)
6. Penggalangan Komitmen terkait revolusi mental.(Kegiatan Balai).
7. Peningkatan Kompetensi Penyidikan PPNS Balai Besar/Balai POM. (Kegiatan Balai).
8. Evaluasi Implementasi SPIP. (Kegiatan Balai)
9. Pemantauan SPIP satker/unit mandiri. (Kegiatan Balai)
10. Survei indeks kepuasan masyarakat. (Kegiatan Balai).
11. Perkuatan bimtek monev, tidak dilaksanakan karena menunggu undangan dari Pusat.

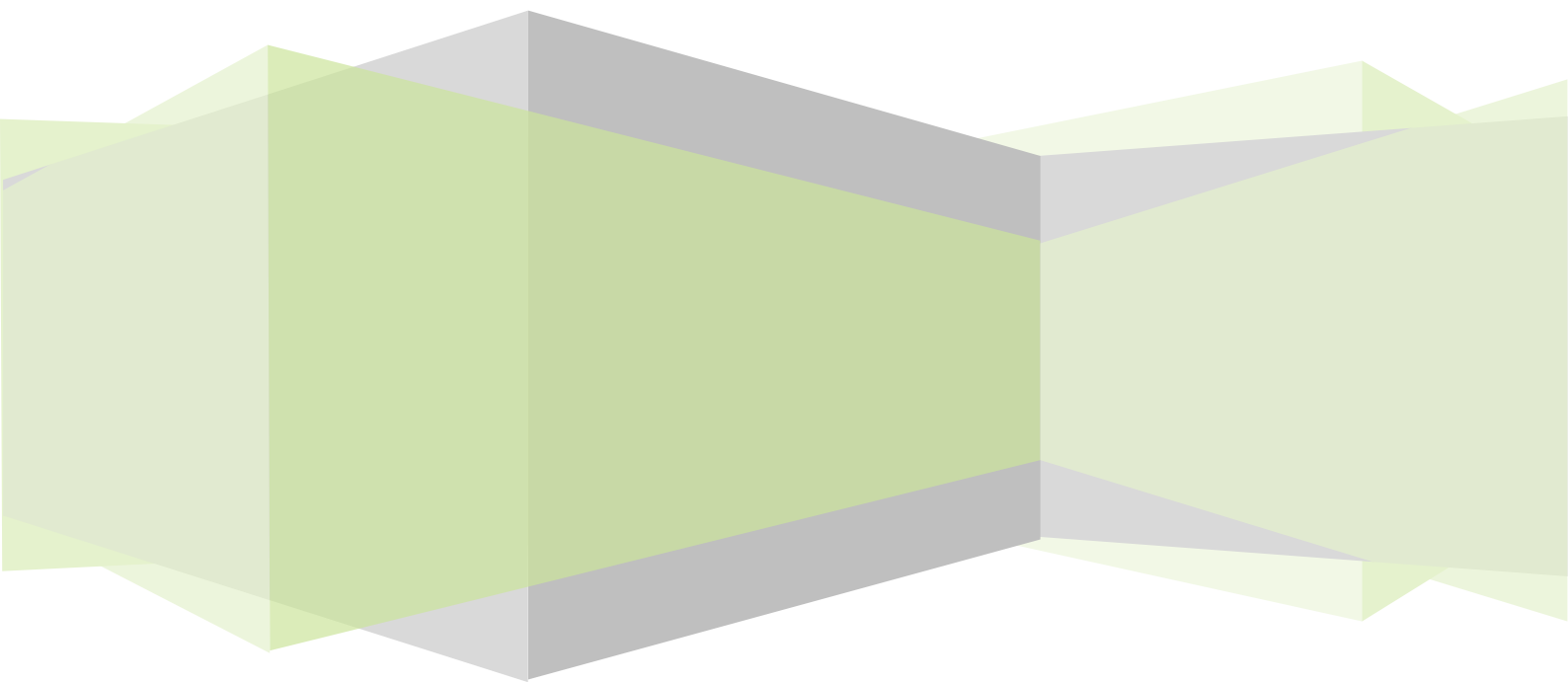
Ada 7 kegiatan yang dilaksanakan tetapi tidak dapat disimpulkan/dievaluasi, yaitu:

1. Pulbaket, verifikasi informasi dan ren. Inves awal Seksi Penyidikan, dilaksanakan 11 kali dari 8 target secara realisasi 137,5%.
2. Rapat Pembahasan Rencana Penyidikan, Skenario Penindakan dan Olah TKP, dilaksanakan 5 kali dari target 3 kali (166,67%).
3. Bimtek CPKB dalam rangka pelayanan publik bagi petugas daerah, telah dilaksanakan tetapi seluruhnya menggunakan dana pusat.
4. Bimtek penerbitan SKI/SKE bagi petugas, telah dilaksanakan tetapi seluruhnya menggunakan dana pusat.
5. Rapat Kerja Pengawasan dan Pelaksanaan RB, telah dilaksanakan tetapi seluruhnya menggunakan dana pusat.
6. Rapat Koordinasi Nasional Implementasi SPIP Badan POM, telah dilaksanakan tetapi seluruhnya menggunakan dana pusat.
7. Workshop implementasi pelaksanaan akuntansi berbasis akrual dan SAKTI, telah dilaksanakan tetapi seluruhnya menggunakan dana pusat.

Pada Tahun 2017 juga dilakukan revisi DIPA sebanyak 6 kali dan revisi POK sebanyak 4 kali. Monitoring dan Evaluasi berbasis online secara Implementasi Kinerja pada tahun 2017 sudah dilaksanakan dan sudah sesuai antara e-performance.pom.go.id yang diinput secara rutin setiap triwulan dengan Monev DJA (SMART) yang diinput perbulan, Monev Bappenas (e-Monev PP 39) per triwulan dan Sismon TEPR (Pelaporan Realisasi Barang dan Jasa dari LKPP) per triwulan.

Keberhasilan dalam pencapaian sasaran strategis disebabkan karena strategi yang diterapkan untuk mencapai sasaran tersebut dalam bentuk program dan kegiatan sudah tepat dan selaras dengan sasaran yang ingin diwujudkan. Penyempurnaan perencanaan di masa yang akan datang diperlukan antara lain dalam bentuk lebih menyelaraskan sasaran dengan tujuan, misi dan visi dalam suatu struktur yang logis sesuai dengan pedoman yang berlaku.

BAB IV. PENUTUP



BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Secara garis besar, pencapaian kinerja Balai Besar POM di Palembang Tahun 2017 adalah:

- 1) Tahun 2017 merupakan tahun ketiga untuk renstra keempat Balai Besar POM di Palembang, dimana terdapat 3 Sasaran Strategis, dan 7 Sasaran Kegiatan Tahunan yang ingin dicapai Balai Besar POM di Palembang. Dari 3 (tiga) sasaran strategis yang ingin diwujudkan pada tahun 2017, Balai Besar POM di Palembang rata-rata mencapai kriteria **BAIK**.
- 2) Dari 3 (tiga) Sasaran Strategis yang ditargetkan :
 - a. Sasaran Strategis target pertama mencapai kriteria **CUKUP**. Hasil tersebut didapat dari capaian 5 (lima) indikator dengan kriteria Cukup terhadap masing-masing indikator.
 - b. Sasaran Strategis kedua mencapai kriteria **Memuaskan**, tercapai 1 (satu) indikator kriteria Memuaskan dan 1 (satu) indikator kriteria Baik.
 - c. Sasaran Strategis ketiga mencapai kriteria **Memuaskan** dari 1 (satu) indikator kegiatan.
- 3) Pencapaian sasaran kegiatan diwujudkan melalui 16 kegiatan yang terdiri dari 154 subkegiatan pengawasan obat dan makanan di Balai Besar POM di Palembang. Sub kegiatan yang telah berhasil dilaksanakan sebanyak 143 sub kegiatan (92,86%) dan tidak dilaksanakan 11 (7,14%) sub kegiatan. Dari 143 subkegiatan yang telah dilaksanakan tersebut setelah dianalisis dan dievaluasi terdapat 131 (91,61%) subkegiatan yang efisien, 5 (3,50%) subkegiatan tidak efisien, 7 (4,89%) subkegiatan yang tidak dapat dihitung efisiensinya karena 5 sub kegiatan menggunakan dana pusat tanpa mencairkan DIPA Balai Besar POM di Palembang dan 2 subkegiatan menggunakan dana subkegiatan lain pada satu kegiatan yang sama.
- 4) Dari 3 (tiga) Sasaran Strategis yang ditargetkan terdapat Sasaran Kegiatan sebagai berikut :
 - a. Sasaran Strategis 1 (satu) memiliki 4 (empat) Sasaran Kegiatan dengan 5 (lima) indikator capaian dengan hasil memuaskan yaitu: 2 (dua) indikator dengan kriteria Memuaskan, 2 (dua) indikator dengan kriteria Baik dan 1(satu) indikator dengan kriteria Cukup.

- b. Sasaran Strategis 2 (dua) memiliki 1 (satu) Sasaran kegiatan dengan 2 (dua) indikator dengan rata-rata kriteria Memuaskan terdiri atas 2 indikator Memuaskan.
- c. Sasaran Strategis 3 (tiga) terbagi menjadi 2 (dua) Sasaran kegiatan dengan 2 (dua) indikator dengan capaian rata-rata Baik dan kedua indikator masing-masing dengan kriteria Baik.

4.2 Saran

Balai Besar POM di Palembang secara terus menerus berupaya meningkatkan kinerja. Tindak lanjut yang dilakukan sebagai langkah perbaikan kedepan dalam rangka meningkatkan kinerja, antara lain :

- a. Melakukan revisi anggaran pada triwulan ke-3 apabila terdapat kegiatan yang tidak dilaksanakan oleh pusat, karena pada tahun 2017 ini pada Triwulan IV anggaran tidak dapat lagi direvisi.
- b. Melaksanakan kegiatan yang tidak terlaksana pada tahun sebelumnya apabila dengan kajian bahwa kegiatan tersebut masih dibutuhkan oleh balai.
- c. Meningkatkan koordinasi antara pengawasan *pre* dan *post market*, sehingga pembinaan ke masyarakat dalam rangka pengawasan obat dan makanan menjadi lebih optimal.
- d. Menambah sarana dan prasarana yang mendukung pengawasan obat dan makanan, seperti pengadaan alat-alat laboratorium, suku cadang, *glassware*, *furniture* pemenuhan infrastruktur, alat komunikasi, komputer dan lain sebagainya.
- e. Meningkatkan kompetensi SDM untuk meningkatkan cakupan kinerja dan sistem pengawasan.
- f. Meningkatkan koordinasi terkait pelaksanaan kegiatan antara pusat dan balai.
- g. Melakukan review kembali terkait target yang telah ditetapkan disesuaikan dengan kondisi terkini yang ada di masyarakat dimana semakin antusiasnya masyarakat terhadap pelayanan publik Badan POM.
- h. Mengawal secara optimal Implementasi Inpres No.3 Tahun 2017 dalam fungsi Pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Sumatera Selatan.
- i. MOU yang telah dilaksanakan antara BBPOM di Palembang dan pemerintah kabupaten/kota yang ada di Sumatera Selatan semoga dapat lebih bersinergi dalam pengawasan OMKA di Provinsi Sumatera Selatan.
- j. Perkuatan Kelembagaan BPOM dengan adanya Perpres No.80 Tahun 2017 secara kelembagaan BPOM menjadi semakin kuat dan secara fungsi semakin lengkap sangat mendukung peningkatan pengawasan dan penindakan.

Lampiran 1. Matriks Kinerja dan Pendanaan Balai Besar POM di Palembang

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Baseline	Target					Alokasi (dalam Miliar rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L-N- B-NS- BS
				2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang															
	SS 1 Menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	BBPOM di Palembang
	1.1. Persentase obat yang memenuhi syarat	Provinsi Sumsel	95,73	94,50	95,00	95,50	96,00	96,50%							
	1.2. Persentase obat Tradisional yang memenuhi syarat	Provinsi Sumsel	87,23	87,20	88,20	89,20	90,20	91,20%							
	1.3. Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat	Provinsi Sumsel	97,31	97,20	97,70	98,00	98,20	98,40%							
	1.4. Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat	Provinsi Sumsel	96,92	97,60	97,60	98,40	98,40	99,20%							
	1.5. Persentase makanan yang memenuhi syarat	Provinsi Sumsel	91,38	91,35	91,85	92,35	92,85	93,35%							
	SS 2 Meningkatkan jaminan kualitas pembinaan dan bimbingan dalam mendorong kemandirian pelaku usaha dan kemitraan dengan pemangku kepentingan									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2,1 Tingkat Kepuasan Masyarakat	Provinsi Sumsel	83,79	83,80	83,90	84,00	84,10	84,20							BBPOM di Palembang
	2,2 Jumlah Kabupaten/Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan	Provinsi Sumsel	15,00	15	16	17	17	17							Bidang Serlik
	SS 3 Meningkatkan kualitas kapasitas kelembagaan BPOM									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	BBPOM di Palembang
	3,1 Nilai SAKIP BBPOM/BPOM dari Badan POM	Provinsi Sumsel	A	A	A	A	A	A							
Program Pengawasan Obat dan Makanan															
	SP 1 Menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	BBPOM di Palembang
	1.1. Persentase obat yang memenuhi syarat	Provinsi Sumsel	95,73	94,50	95,00	95,50	96,00	96,50%							
	1.2. Persentase obat Tradisional yang memenuhi syarat	Provinsi Sumsel	87,23	87,20	88,20	89,20	90,20	91,20%							
	1.3. Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat	Provinsi Sumsel	97,31	97,20	97,70	98,00	98,20	98,40%							
	1.4. Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat	Provinsi Sumsel	96,92	97,60	97,60	98,40	98,40	99,20%							
	1.5. Persentase makanan yang memenuhi syarat	Provinsi Sumsel	91,38	91,35	91,85	92,35	92,85	93,35%							
	SP 2 Meningkatkan jaminan kualitas pembinaan dan bimbingan dalam mendorong kemandirian pelaku usaha dan kemitraan dengan pemangku kepentingan									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2,1	Tingkat Kepuasan Masyarakat	Provinsi Sumsel	83,79	83,80	83,90	84,00	84,10	84,20							
2,2	Jumlah Kabupaten/Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan	Provinsi Sumsel	15,00	15	16	17	17	17							Bidang Serlik
SP 3 Meningkatkan kualitas kapasitas kelembagaan BPOM									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3,1	Nilai SAKIP BPOM dari Badan POM	Provinsi Sumsel	A	A	A	A	A	A							BBPOM di Palembang
Kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Palembang									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Meningkatnya kinerja pengawasan obat dan makanan di seluruh Indonesia														
1	Jumlah sampel yang diuji menggunakan parameter kritis	Provinsi Sumsel	3.300	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500							Bidang Pengujian
2	Pemenuhan target sampling produk Obat di sektor publik (IFK)	Provinsi Sumsel	N/A	100	100	100	100	100							Bidang Pemdik
3	Persentase cakupan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan	Provinsi Sumsel	12,20	12,38	13,03%	13,40	13,84	14,20							Bidang Pemdik
4	Persentase cakupan pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan	Provinsi Sumsel	32,10	32,41	32,72	33,19	33,66	34,28							Bidang Pemdik
5	Jumlah Perkara di bidang obat dan makanan	Provinsi Sumsel	9	10	10	10	12	12							Bidang Pemdik
6	Jumlah layanan publik BB/BPOM	Provinsi Sumsel	237	278	300	310	320	330							Bidang Serlik
7	Jumlah Komunitas yang diberdayakan	Provinsi Sumsel	10,00	5,00	16,00	17,00	18,00	19,00							Bidang Serlik
8	Persentase pemenuhan sarana prasarana sesuai standar	Provinsi Sumsel	76	80	85	85	90	90							Sub Bag TU
9	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	Provinsi Sumsel	8	10	9	10	9	10							Sub Bag TU

LAMPIRAN 2
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Sasaran Program/Kegiatan		Indikator Kinerja	Target
-1		-2	-3
1	Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan	1 Persentase Obat yang memenuhi syarat	97,23%
		2 Persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat	89,49%
		3 Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat	98,85%
		4 Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat	98,40%
		5 Persentase Makanan yang memenuhi syarat	92,95%
2	Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat.	1 Tingkat Kepuasan Masyarakat	84,00%
		2 Jumlah Kabupaten / Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan	17
3	Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan BPOM	Nilai SAKIP BBPOM di Palembang oleh Badan POM RI	BB
Menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan			
1	Meningkatnya kualitas sampling dan pengujian terhadap produk Obat dan Makanan yang beredar	1 Jumlah sampel yang diuji menggunakan parameter kritis	2500
		2 Pemenuhan target sampling produk obat di sektor publik (IFK)	100,00%
2	Meningkatnya kualitas sarana produksi yang memenuhi standar	Persentase cakupan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan	13,40%
3	Meningkatnya kualitas sarana distribusi yang memenuhi standar	Persentase cakupan pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan	33,19%
4	Meningkatnya hasil tindak lanjut penyidikan terhadap Pelanggaran Obat dan Makanan	Jumlah perkara di bidang Obat dan Makanan	10
Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat			
1	Meningkatnya kerjasama, komunikasi, informasi dan edukasi	1 Jumlah layanan publik BBPOM di Palembang	310
		2 Jumlah komunitas yang diberdayakan	17
Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan BBPOM di Palembang			
1	Pengadaan Sarana dan Prasarana yang Terkait Pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan sarana prasarana sesuai standar	85,00%
2	Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, Keuangan dan Evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	10

Kegiatan
Pengawasan Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Palembang

Anggaran
Rp. 23.089.243.000,



BADAN POM

perencanaan strategis dan diakhiri dengan adanya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

- KETIGA : Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan salah satu acuan untuk penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Balai Besar POM di Palembang;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan di dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan serta perubahan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Palembang
Pada tanggal : 22 September 2015

Kepala Balai Besar Pengawas
Obat dan Makanan di Palembang



Dra. Indriaty Tubagus, Apt, M.Kes
NIP. 19610321 198703 2 002

Tembusan :

1. Kepala Badan POM RI di Jakarta
2. Sekretaris Utama Badan POM RI
3. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Badan POM RI
4. Inspektur Badan POM RI

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALEMBANG
Jalan Pangeran Ratu Seberang Ulu 1 Palembang Telp. (0711) 510126, 510804 Fax (0711) 510195
E-mail : bpomplg@yahoo.com and bpomplg@gmail.com

LAMPIRAN 3
PENGUKURAN KINERJA
BALAI BESAR POM DI PALEMBANG TAHUN 2017

Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Target	Realisasi	%Capaian
SS 1 Menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan			
1.1. Persentase Obat yang memenuhi syarat	97,23%	97,09	99,86
1.2. Persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat	89,49%	86,22	96,35
1.3. Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat	98,85%	96,30	97,42
1.4. Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat	98,40%	97,71	99,30
1.5. Persentase Makanan yang memenuhi syarat	92,95%	89,38	96,16
SS 2 Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat			
2,1 Tingkat Kepuasan Masyarakat	84,00	86,18	102,60%
2,2 Jumlah Kabupaten/Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan	17	17	100%
SS 3 Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan BPOM			
3,1 Nilai SAKIP BBPOM di Palembang dari BPOM	BB	BB	100,87%
Program Pengawasan Obat dan Makanan			
SP 1 Menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan			
1.1. Persentase obat yang memenuhi syarat	95,00%	97,09	102,20
1.2. Persentase obat Tradisional yang memenuhi syarat	88,20%	86,22	97,76
1.3. Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat	97,70%	96,30	98,57
1.4. Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat	97,60%	97,71	100,11
1.5. Persentase makanan yang memenuhi syarat	91,85%	89,38	97,31
SP 2 Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat			
2,1 Tingkat Kepuasan Masyarakat	84,00	86,18	102,60%
2,2 Jumlah Kabupaten/Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan	17	17	100,00%
SP 3 Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan BPOM			
3,1 Nilai SAKIP BPOM dari Badan POM	BB	BB	100,87%
Kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Palembang			
Meningkatnya kinerja pengawasan obat dan makanan di seluruh Indonesia			
1 Jumlah sampel yang diuji menggunakan parameter kritis	2.607	2607	100,00%
1.a Jumlah sampel Obat KB yang diuji menggunakan parameter kritis	31	32	103,23%
1.b Jumlah sampel Obat yang diuji menggunakan parameter kritis	1.796	1795	99,94%
1.c Jumlah sampel Makanan yang diuji menggunakan parameter kritis	780	780	100,00%
2 Pemenuhan target sampling produk Obat di sektor publik (IFK)	100	100	100,00%
3 Persentase cakupan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan	13,40	14,67%	109,50%
4 Persentase cakupan pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan	33,19	37,34%	112,49%
5 Jumlah Perkara di bidang obat dan makanan	10	5	50,00%
Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat			
6 Jumlah layanan publik BB/BPOM	310	356	114,84%

Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Target	Realisasi	%Capaian
7 Jumlah Komunitas yang diberdayakan	17	21	123,53%
Meningkatnya kinerja pengawasan obat dan makanan di seluruh Indonesia			
8 Persentase pemenuhan sarana prasarana sesuai standar	85	85	100,00%
9 Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	10	10	100,00%

Kegiatan

Pengawasan Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Palembang

Anggaran

Rp. 23.089.243.000,

Realisasi

Rp.21.143.240.765

LAMPIRAN 4
PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN
TINGKAT UNIT ORGANISASI BALAI BESAR POM

Unit Organisasi Eselon II : Balai Besar POM di Palembang
Tahun Anggaran : 2017

Sasaran	Kegiatan	Indikator kinerja		Satuan	Target	Realisasi	Persentase pencapaian	Ket		
			Uraian							
1. Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan	1 PRODUK OBAT DAN MAKANAN YANG DISAMPEL DAN DIUJI									
	1.1 PENGUJIAN LABORATORIUM SAMPEL OBAT KB									
	a	Pengadaan sampel	input	dana	Rp	Rp	8.538.000	Rp	2.589.760	30,33%
			proses	waktu	Thn					
			output	Jumlah Sampel yang Diuji	sampel		31	32		103,23%
	b	Pengujian laboratorium sampel obat KB	input	dana	Rp	Rp	6.820.000	Rp	5.331.700	78,18%
			proses	waktu	Thn					
			output	laporan hasil pengujian	laporan		31	32		103,23%
	1.2 PENGUJIAN LABORATORIUM SAMPEL MAKANAN									
	a	Pengadaan sampel	input	dana	Rp	Rp	138.582.000	Rp	107.250.859	77,39%
			proses	waktu	Thn					
			output	Jumlah Sampel yang Diuji	sampel		691	691		100,00%
	b	Pengujian laboratorium sampel makanan	input	dana	Rp	Rp	311.540.000	Rp	286.589.000	91,99%
			proses	waktu	Thn					
			output	laporan hasil pengujian	laporan		691	691		100,00%
	1.3 PENGUJIAN LABORATORIUM SAMPEL OBAT, OT, KOSMETIK									
	a	Penyusunan Perencanaan Sampling	input	dana	Rp	Rp	3.150.000	Rp	2.271.500	72,11%
			proses	waktu	Thn					
			output	Jumlah Sampel yang Diuji	sampel		1827	1827		100,00%
	b	Pengadaan sampel	input	dana	Rp	Rp	435.016.000	Rp	370.343.340	85,13%
			proses	waktu	Thn					
			output	Jumlah Sampel yang Diuji	sampel		1827	1827		100,00%
	c	Pengujian laboratorium sampel obat, ot, kosmetik	input	dana	Rp	Rp	529.320.000	Rp	500.556.000	94,57%
			proses	waktu	Thn					
			output	laporan hasil pengujian	laporan		1827	1827		100,00%
	1.4 PENGAWASAN SARANA PRODUKSI OBAT, OT, KOSMETIKA, NAFZA, PREKURSOR, MAKANAN DAN BAHAN BERBAHAYA									
	a	Pemeriksaan Sarana Produksi OMKA	input	dana	Rp	Rp	97.680.000	Rp	93.586.823	95,81%
			proses	waktu	thn					
			output	jumlah sarana produksi yang diperiksa	sarana		165	184		111,52%
	1.5 PENGAWASAN SARANA DISTRIBUSI OBAT, OT, KOSMETIKA, NAFZA, PREKURSOR, MAKANAN DAN BAHAN BERBAHAYA									
	a	Pemeriksaan Sarana Distribusi produk OMKA	input	dana	Rp	Rp	316.329.000	Rp	301.488.185	78,60%
			proses	waktu	thn					
			output	jumlah sarana distribusi yang diperiksa	sarana		1055	1118		105,97%
	b	Audit Komprehensif Narkotika, Psikotropika dan Prekursor	input	dana	Rp	Rp	9.540.000	Rp	7.540.000	79,04%
			proses	waktu	Thn		1	1		100,00%
			output	Jumlah sarana yang diaudit	sarana		10	23		230,00%
	c	Peer Inspection	input	dana	Rp	Rp	11.326.000	Rp	11.263.200	99,45%
			proses	waktu	Thn		1	1		100,00%
			output	jumlah pegawai yang ikut	orang		2	2		100,00%
	d	Join Inspection	input	dana	Rp	Rp	5.001.000	Rp	5.001.000	100,00%
			proses	waktu	thn		1	1		100,00%
			output	jumlah pegawai yang ikut	orang		1	1		100,00%
	e	Aksi Penertiban Kosmetik Ilegal dan TMS	input	dana	Rp	Rp	25.600.000	Rp	14.710.000	57,46%
			proses	waktu	thn		1	1		100,00%
			output	Jumlah sarana yang diaudit	sarana		5	5		100,00%
	f	Post Marketing Vigilance Iklan dan Promosi OMKA	input	dana	Rp	Rp	25.048.000	Rp	24.122.700	96,31%
			proses	waktu	thn		1	1		100,00%
			output	Jumlah iklan yang diaudit	sampel		200	629		314,50%
	g	Pelatihan Inspeksi CPOB di UTD	input	dana	Rp	Rp	3.030.000	Rp	2.950.000	97,36%
			proses	waktu	thn		1	1		100,00%
			output	jumlah pegawai yang ikut	orang		1	1		100,00%
	h	Pelatihan CPOTB Lanjutan	input	dana	Rp	Rp	1.570.000	Rp	1.570.000	100,00%
			proses	waktu	thn					
			output	jumlah pegawai yang ikut	orang		1	1		100,00%
	i	Rakon Nas Pengawasan OT, Kosmetik dan Suplement	input	dana	Rp	Rp	9.000.000	Rp	8.910.000	99,00%
			proses	waktu	thn					
			output	jumlah pegawai yang ikut	orang		1	1		100,00%
	j	Pelatihan CPOTB Dasar	input	dana	Rp	Rp	3.320.000	Rp	3.320.000	100,00%
			proses	waktu	thn					
			output	jumlah pegawai yang ikut	orang		1	1		100,00%

Sasaran	Kegiatan	Indikator kinerja		Satuan	Target	Realisasi	Persentase pencapaian	Ket	
			Uraian						
2. Meningkatkan kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat	k Evaluasi Efektifitas Upaya/Aksi Penertiban Kosmetik Ilegal dan TMS	input	dana	Rp	Rp 905.000	Rp 905.000	100,00%		
		proses	waktu	thn					
		output	jumlah pegawai yang ikut	orang	1	1	100,00%		
	1.6	PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN							
	a Pulbaket, verifikasi informasi dan ren. Inves awal	input	dana	Rp	Rp 252.000	Rp	-	0,00%	
		output	Laporan pulbaket, verifikasi informasi dan rencana investigasi awal yang dilakukan	Paket	8	11	137,50%		
	b Pelaksanaan Investigasi Awal	input	dana	Rp	Rp 19.000.000	Rp 14.491.000	76,27%		
		output	jumlah investigasi awal yang dilaksanakan	trip	9	11	122,22%		
	c Evaluasi Inves Awal, Gelar Kasus dan Palaporan Hasil Inves	input	dana	Rp	Rp 2.268.000	Rp 2.148.000	94,71%		
		output	jumlah investigasi awal yang dilaksanakan	kali	9	11	122,22%		
	d Rapat Pembahasan Rencana Penyidikan,Skenario Penindakan dan Olah TKP	input	dana	Rp	Rp 1.134.000	Rp 960.000	84,66%		
		output	jumlah investigasi awal yang dilaksanakan	kali	3	5	166,67%		
	e Penindakan	input	dana	Rp	Rp 11.150.000	Rp 8.773.000	78,68%		
		output	Jumlah tindakan yang dilakukan	trip	3	5	166,67%		
	f Pemberkasan	input	dana	Rp	Rp 24.630.000	Rp16.390.000	66,54%		
		output	Jumlah pemberkasan yang dilakukan	trip	3	2	66,67%		
	g Konsultasi Penyelesaian Berkas Perkara	input	dana	Rp	Rp 6.030.000	Rp 4.200.000	69,65%		
		proses output	waktu jumlah konsultasi yang dilakukan	Thn kali	3	5	166,67%		
	h Gelar Perkara	input	dana	Rp	Rp 7.668.000	Rp 3.009.800	39,25%		
		output	Jumlah gelar perkara yang diadakan	kali	3	7	233,33%		
	i Penasehat Hukum	input	dana	Rp	Rp 1.800.000	Rp 1.800.000	100,00%		
		proses output	waktu jumlah bantuan hukum yang diberikan	Thn kali	3	1	33,33%		
	j Pulbaket, verifikasi informasi dan ren. Inves awal	input	dana	Rp	Rp 756.000	Rp 116.000	15,34%		
		output	Laporan pulbaket, verifikasi informasi dan rencana investigasi	Paket	17	15	88,24%		
	k Pelaksanaan Investigasi Awal	input	dana	Rp	Rp 102.840.000	Rp 84.874.942	82,53%		
		output	jumlah investigasi awal yang	trip	17	15	113,33%		
	l Evaluasi Inves Awal, Gelar Kasus dan Palaporan Hasil Inves	input	dana	Rp	Rp 756.000	Rp 460.000	60,85%		
		output	jumlah investigasi awal yang dilaksanakan	kali	17	15	88,24%		
m Rapat Pembahasan Rencana Penyidikan,Skenario Penindakan dan Olah TKP	input	dana	Rp	Rp 756.000	Rp	-	0,00%		
	output	jumlah investigasi awal yang dilaksanakan	kali	7	4	57,14%			
n Penindakan	input	dana	Rp	Rp 43.160.000	Rp 18.908.500	43,81%			
	output	Jumlah tindakan yang dilakukan	trip	7	4	57,14%			
o Pemberkasan	input	dana	Rp	Rp 37.950.000	Rp17.248.975	45,45%			
	output	Jumlah pemberkasan yang dilakukan	trip	7	3	42,86%			
p Konsultasi Penyelesaian Berkas Perkara	input	dana	Rp	Rp 9.156.000	Rp 8.400.000	91,74%			
	proses output	waktu jumlah konsultasi yang dilakukan	Thn kali	7	3	42,86%			
q Gelar Perkara	input	dana	Rp	Rp 3.528.000	Rp 296.000	8,39%			
	output	Jumlah gelar perkara yang diadakan	kali	7	5	71,43%			
r Penasehat Hukum	input	dana	Rp	Rp 3.600.000	Rp 3.600.000	100,00%			
	proses output	waktu jumlah bantuan hukum yang diberikan	Thn kali	7	3	42,86%			
jumlah realisasi anggaran SS1					Rp 2.217.749.000	Rp 1.935.975.284	87,29%		
2.1	LAYANAN PUBLIK BB/BPOM								
a Coaching Clinic Pengawasan Keamanan Pangan	input	dana	Rp	Rp 2.400.000	Rp 2.400.000	100,00%			
	output	jumlah pertemuan	kali	1	1	100,00%			
b Koordinasi dan diseminasi kegiatan hukmas dan BB/BPOM	input	dana	Rp	Rp 18.072.000	Rp 18.000.000	99,60%			
	output	jumlah pegawai yang ikut	orang	4	4	100,00%			
c Advokasi & sosialisasi BBPOM ke Kab/Kota	input	dana	Rp	Rp 119.680.000	Rp 83.265.767	69,57%			
	output	jumlah advokasi dan sosialisasi	trip	16	11	68,75%			

Sasaran	Kegiatan	Indikator kinerja		Satuan	Target	Realisasi	Persentase pencapaian	Ket
		input	uraian					
3. Meningkatkan Kualitas Kapasitas Kelembagaan BPOM	d Rencana Aksi Lab. Keliling Pangan Buka Puasa (160 spl)	input	dana	Rp	Rp 82.850.000	Rp 74.773.062	90,25%	
		output	Jumlah sampel	spl	160	160	100,00%	
	e FGD koordinasi dan pemantaban tahubja dg lintas sektor	input	dana	Rp	Rp 118.524.000	Rp 89.170.000	75,23%	
		output	Jumlah FGD	kali	1	1	100,00%	
	f Pemeriksaan dalam rangka Perizinan/Reg/SKI/SKE/Halal	input	dana	Rp	Rp 42.900.000	Rp 15.633.118	36,44%	
		output	Jumlah pemeriksaan	kali	24	15	62,50%	
	g Sosialisasi Penyebaran Informasi Produk OMKABA	input	dana	Rp	Rp 316.275.000	Rp 239.921.600	75,86%	
		proses	waktu	Thn				
	output	Jumlah SDM yang diberikan layanan informasi produk OMKABA	Orang	450	703	156,22%		
	h Komunikasi, Informasi, Edukasi	input	dana	Rp	Rp 377.163.000	Rp 296.976.015	78,74%	
		proses	waktu	Thn				
	output	pelayanan KIE yang diadakan	Paket	1	1	100,00%		
	i Pemetaan distribusi keracunan obat dan makanan di Indonesia	input	dana	Rp	Rp 35.990.000	Rp 5.600.000	15,56%	
		output	Jumlah Kabupaten	Kab	5	5	100,00%	
	j Sosialisasi pemberdayaan masyarakat melalui KIE obat dan makanan	input	dana	Rp	Rp 812.760.000	Rp 785.630.548	96,66%	
		output	Jumlah Paket	Paket	6	6	100,00%	
	k Workshop virtual ekosistem	input	dana	Rp	Rp 9.266.000	Rp 3.825.500	41,29%	
		output	Jumlah SDM yang mengikuti sosialisasi	Kegiatan	2	1	50,00%	
	l Pelatihan surveilan KLB keracunan pangan	input	dana	Rp	Rp 4.548.000	Rp 3.693.500	81,21%	
		output	Jumlah SDM yang mengikuti pelatihan	orang	1	1	100,00%	
m Bimtek CPKB dalam rangka pelayanan publik bagi petugas daerah	input	dana	Rp	Rp 1.670.000	Rp -	0,00%		
	output	Jumlah Paket	Paket	1	1	100,00%		
n Pelatihan fasilitator pasar aman dari bahan berbahaya	input	dana	Rp	Rp 4.548.000	Rp -	0,00%		
	output	Jumlah SDM yang mengikuti pelatihan	orang	1	0	0,00%		
o Bimtek penerbitan SKI/SKE bagi petugas	input	dana	Rp	Rp 2.280.000	Rp -	0,00%		
	output	Jumlah Paket	Paket	1	1	100,00%		
2.2	KOMUNITAS YANG DIBERDAYAKAN							
a Advokasi kelembagaan desa	input	dana	Rp	Rp 93.060.000	Rp 58.941.649	63,34%		
	output	jumlah advokasi	kali	1	1	100,00%		
b Pemberdayaan masyarakat dan usaha pangan desa di bidang keamanan pangan - di balai	input	dana	Rp	Rp 282.370.000	Rp 262.322.150	92,90%		
	output	Jumlah desa	desa	3	3	100,00%		
c Monitoring dan evaluasi - balai	input	dana	Rp	Rp 61.174.000	Rp 14.520.000	23,74%		
	output	Jumlah movev	kali	1	1	100,00%		
d Operasional lab keliling dalam rangka PJAS dan food security	input	dana	Rp	Rp 97.314.000	Rp 90.216.276	92,71%		
	output	Jumlah trip	trip	21	23	109,52%		
e Pasar aman dari bahan berbahaya	input	dana	Rp	Rp 150.731.000	Rp 121.115.003	80,35%		
	output	Jumlah pasar	pasar	5	5	100,00%		
f Monitoring dan evaluasi - balai	input	dana	Rp	Rp 17.680.000	Rp -	0,00%		
	output	Jumlah movev	kali	0	0	0,00%		
	Jumlah Rata-rata realisasi anggaran SS2				Rp 2.651.255.000	Rp 2.166.004.188	81,70%	
3	KEGIATAN DUKUNGAN TEKNIS DAN MANAJEMEN LABORATORIUM YANG DILAKSANAKAN							
3.1	SARANA DAN PRASARANA SESUAI STANDAR							
a Pengadaan buku pustaka	input	dana	Rp	Rp 35.000.000	Rp 20.565.600	58,76%		
	output	jumlah buku	buku	1	1	100,00%		
b Pengadaan genset	input	dana	Rp	Rp 353.600.000	Rp 322.873.800	91,31%		
	output	jumlah alat	unit	1	1	100,00%		
c Pengadaan pakaian kerja	input	dana	Rp	Rp 72.657.000	Rp 65.989.000	90,82%		
	output	Jumlah pakaian yang dibuat	unit	1	1	100,00%		
d Administrasi pengadaan	input	dana	Rp	Rp 50.735.000	Rp 46.505.262	91,66%		
	output	Jumlah Paket	Paket	1	1	100,00%		
e Langganan internet	input	dana	Rp	Rp72.000.000	Rp69.631.550	96,71%		
	output	Jumlah langganan bulanan	bulan	12	12	100,00%		
f Pengadaan mobil lab keliling	input	dana	Rp	Rp 403.600.000	Rp 398.906.604	98,84%		
	output	jumlah paket	paket	1	1	100,00%		

Sasaran	Kegiatan	Indikator kinerja		Satuan	Target	Realisasi	Persentase pencapaian	Ket
			Uraian					
3.2	DOKUMEN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI							
a	Rapat Kerja Nasional di Surabaya	input	dana	Rp	Rp 48.692.000	Rp 35.607.000	73,13%	
		output	Jumlah rapat	Kali	1	1	100,00%	
b	Rapat Evaluasi Nasional di Gorontalo	input	dana	Rp	Rp 39.082.000	Rp 38.138.000	97,58%	
		output	Jumlah rapat	Kali	1	1	100,00%	
c	Rapat Koordinasi Internal	input	dana	Rp	Rp 64.000.000	Rp 57.548.530	89,92%	
		output	Jumlah rapat	Kali	1	1	100,00%	
d	Konsultasi ke Pusat dan Antar Balai	input	dana	Rp	Rp 250.154.000	Rp 248.200.263	99,22%	
		output	Jumlah konsultasi	Kali	1	1	100,00%	
e	Rapat Kerja Pengawasan dan Pelaksanaan RB	input	dana	Rp	Rp 6.960.000	Rp -	0,00%	
		output	Jumlah rapat	Kali	1	1	100,00%	
f	Rapat Koordinasi Nasional Implementasi SPIP Badan POM	input	dana	Rp	Rp 6.960.000	Rp -	0,00%	
		output	Jumlah rapat	Kali	1	1	100,00%	
g	Evaluasi Implementasi SPIP	input	dana	Rp	Rp 3.200.000	Rp -	0,00%	
		output	Jumlah rapat	Kali	1	0	0,00%	
h	Pemantauan SPIP satker/unit mandiri	input	dana	Rp	Rp 3.200.000	Rp -	0,00%	
		output	Jumlah rapat	Kali	1	0	0,00%	
i	Survei indeks kepuasan masyarakat	input	dana	Rp	Rp 1.600.000	Rp -	0,00%	
		output	Jumlah rapat	Kali	1	0	0,00%	
j	Perkuatan bimtek movev	input	dana	Rp	Rp 2.280.000	Rp -	0,00%	
		output	Jumlah rapat	Kali	1	0	0,00%	
k	Workshop implementasi pelaksanaan akuntansi berbasis akrual dan SAKTI	input	dana	Rp	Rp 8.496.000	Rp -	0,00%	
		output	Jumlah rapat	Kali	1	1	100,00%	
l	Penyusunan program RKAKL/DIPA	input	dana	Rp	Rp 2.796.000	Rp 1.305.300	46,68%	
		output	Jumlah dokumen	buah	1	1	100,00%	
m	Penyusunan LAKIP dan LAPTAH	input	dana	Rp	Rp 16.317.000	Rp 16.278.000	99,76%	
		output	Jumlah dokumen yang disusun	dokumen	2	2	100,00%	
n	Terlaksananya Sistem Akuntansi Pemerintah (SAI)	input	dana	Rp	Rp 12.600.000	Rp 10.800.000	85,71%	
		output	Sistem akuntansi pemerintah yang terlaksana	Bulan	12	12	100,00%	
o	Kelancaran Administrasi pemerintahan	input	dana	Rp	Rp 290.700.000	Rp 236.325.000	81,30%	
		output	Administrasi Pemerintahan berjalan dengan baik	Bulan	12	12	100,00%	
p	Perjalanan monitoring kepala balai ke wilayah kerja	input	dana	Rp	Rp 10.172.000	Rp -	0,00%	
		output	Administrasi Pemerintahan berjalan dengan baik	Trip	2	0	0,00%	
q	Penyusunan laporan keuangan konsolidasi 2017 di Mataram	input	dana	Rp	Rp 22.614.000	Rp 17.766.200	78,56%	
		output	jumlah sdm yang ikut	orang	3	3	100,00%	
r	Workshop keuangan	input	dana	Rp	Rp 8.496.000	Rp 7.666.599	90,24%	
		output	jumlah sdm yang ikut	orang	3	3	100,00%	
s	Ujian Dinas UPKP	input	dana	Rp	Rp 11.896.000	Rp 6.464.400	54,34%	
		output	jumlah SDM yang mengikuti workshop	Orang	1	1	100,00%	
t	Diklat fungsional PFM	input	dana	Rp	Rp 13.644.000	Rp 13.000.000	95,28%	
		output	jumlah SDM yang mengikuti	Kali	3	3	100,00%	
u	Reformasi birokrasi	input	dana	Rp	Rp 23.656.000	Rp -	0,00%	
		output	Jumlah trip yang dilakukan	Trip	3	0	0,00%	
v	Workshop sdm	input	dana	Rp	Rp 11.276.000	Rp 10.963.500	97,23%	
		output	Jumlah trip yang dilakukan	Orang	3	3	100,00%	
w	Pemeliharaan dan peningkatan QMS ISO 9001	input	dana	Rp	Rp 60.138.000	Rp 23.799.050	39,57%	
		output	Jumlah rapat yang dilakukan	kali	8	8	100,00%	
x	Penilaian angka kredit	input	dana	Rp	Rp 7.400.000	Rp 7.400.000	100,00%	
		output	Jumlah bulan yg dibayar	bulan	2	2	100,00%	
y	Peningkatan kompetensi asan	input	dana	Rp	Rp 9.234.000	Rp -	0,00%	
		output	Jumlah rapat yang dilakukan	kali	1	0	0,00%	
z	Sosialisasi pengelolaan BMN	input	dana	Rp	Rp 4.128.000	Rp 1.759.750	42,63%	
		output	Jumlah SDM yang mendapat sosialisasi	Orang	1	1	100,00%	

Sasaran	Kegiatan	Indikator kinerja		Satuan	Target	Realisasi	Persentase pencapaian	Ket
		input	uraian					
aa	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Perlengkapan	input	dana	Rp	Rp 14.400.000	Rp 9.570.500	66,46%	
		output	Rapat yang diadakan	Rapat	3	3	100,00%	
ab	Jumlah ATK/cetakan/Terbitan/Penggunaan/Laminating	input	dana	Rp	Rp 68.403.000	Rp 65.484.250	95,73%	
		output	cetakan/terbitan/penggunaan/laminasi yang diadakan	Paket	12	12	100,00%	
ac	Sewa Rumah Dinas	input	dana	Rp	Rp 100.000.000	Rp 99.000.000	99,00%	
		output	rumah kepala dinas yang disewa	unit	1	1	100,00%	
ad	Pemutakhiran data BMN	input	dana	Rp	Rp 18.192.000	12.741.133	70,04%	
		output	Jumlah SDM yang melakukan Pemutakhiran data BMN	Orang	5	5	100,00%	
ae	Persiapan Penghapusan BMN	input	dana	Rp	Rp 8.566.000	Rp 3.825.000	44,65%	
		output	jumlah dokumen BMN yang disusun	Dokumen	1	1	100,00%	
af	Administrasi	input	dana	Rp	Rp 153.600.000	Rp 138.975.511	90,48%	
		output	Jumlah bulan dilaksanakan kegiatan	Bulan	12	12	100,00%	
ag	Bimtek penilaian BMN	input	dana	Rp	Rp 2.798.000	Rp 2.321.900	82,98%	
		output	jumlah SDM yang mengikuti	orang	12	12	100,00%	
ah	Sosialisasi pedoman tata naskah dinas	input	dana	Rp	Rp 3.328.000	Rp 3.328.000	100,00%	
		output	jumlah SDM yang mengikuti	orang	1	1	100,00%	
ai	Penggalangan komitmen terkait revolusi mental	input	dana	Rp	Rp 4.388.000	Rp -	0,00%	
		output	jumlah SDM yang mengikuti	orang	1	0	0,00%	
aj	Pembinaan BPOM/BBPOM oleh eselon I	input	dana	Rp	Rp 6.800.000	Rp 5.640.000	82,94%	
		output	jumlah rapat	kali	1	1	100,00%	
ak	Pelatihan eksternal	input	dana	Rp	Rp 219.022.000	Rp 156.607.520	71,50%	
		output	jumlah pelatihan yang diikuti	trip	11	11	100,00%	
3.3	LAPORAN DUKUNGAN TEKNIS INVESTIGASI AWAL DAN PENYIDIKAN							
a	Pemantapan operasional penyidikan obat dan makanan	input	dana	Rp	Rp 4.728.000	Rp 4.542.000	96,07%	
		output	Jumlah SDM yang mengikuti	orang	1	1	100,00%	
b	Peningkatan kemampuan manajerial	input	dana	Rp	Rp 4.248.000	Rp 4.242.000	99,86%	
		output	Jumlah SDM yang mengikuti	orang	1	1	100,00%	
c	Pertemuan Peningkatan Kinerja Profesionalisme dan Koordinasi	input	dana	Rp	Rp 8.496.000	Rp 4.581.000	53,92%	
		output	Jumlah SDM yang mengikuti	orang	1	1	100,00%	
d	Pendidikan dan Pelatihan Intelijen di Bandung	input	dana	Rp	Rp 4.548.000	Rp 4.262.000	93,71%	
		output	Jumlah SDM yang mengikuti	orang	1	1	100,00%	
e	Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan PPNS Badan POM	input	dana	Rp	Rp 4.548.000	Rp 4.199.309	92,33%	
		output	Jumlah SDM yang mengikuti	orang	1	1	100,00%	
f	Peningkatan Kompetensi Penyidikan PPNS Balai Besar/Balai POM	input	dana	Rp	Rp 4.248.000	Rp -	0,00%	
		output	Jumlah SDM yang mengikuti	Orang	1	0	0,00%	
g	Monitoring status PPNS ke BPOM pusat	input	dana	Rp	Rp 4.248.000	Rp 4.242.000	99,86%	
		output	Jumlah SDM yang mengikuti	Orang	1	1	100,00%	
h	Rapat koordinasi lintas sektor penegakan hukum tindak pidana	input	dana	Rp	Rp 27.750.000	Rp 16.336.517	58,87%	
		output	Jumlah SDM yang mengikuti	Orang	3	4	133,33%	
i	Peningkatan Kompetensi Dasar PPNS Balai Besar/Balai POM	input	dana	Rp	Rp 15.000.000	Rp 15.000.000	100,00%	
		output	Jumlah SDM yang mengikuti	Orang	5	5	100,00%	
3.4	DOKUMEN DUKUNGAN TEKNIS DAN MANAJEMEN LABORATORIUM							
a	Audit Internal Sistem Mutu	input	dana	Rp	Rp 7.500.000	Rp 7.049.750	94,00%	
		output	Jumlah Pelaporan	Paket	1	1	100,00%	
b	Kaji Ulang Sistem Manajemen Mutu	input	dana	Rp	Rp 5.900.000	Rp 3.321.200	56,29%	
		output	jumlah rapat	kali	1	1	100,00%	
c	Kalibrasi Alat Laboratorium	input	dana	Rp	Rp 335.872.000	Rp 325.094.200	96,79%	
		output	Jumlah Paket	Paket	1	1	100,00%	

Sasaran	Kegiatan	Indikator kinerja		Satuan	Target	Realisasi	Persentase pencapaian	Ket
		input	uraian					
d	Pertemuan teknis laboratorium oleh KAN	input	dana	Rp	Rp 5.170.000	Rp 5.143.400	99,49%	
		output	Jumlah SDM yang mengikuti	orang	1	1	100,00%	
e	Pengelolaan Limbah dan Retain Sampel	input	dana	Rp	Rp 26.500.000	Rp 26.200.000	98,87%	
		output	Jumlah pengelolaan limbah	trip	4	4	100,00%	
f	Reassmen BB/BPOM dan sosialisasi pedoman GLP	input	dana	Rp	Rp 4.800.000	Rp 4.799.000	99,98%	
		output	Jumlah rapat	kali	1	1	100,00%	
g	Perbaikan Hasil Suveilan	input	dana	Rp	Rp 7.316.000	Rp 7.316.000	100,00%	
		output	Jumlah SDM yang mengikuti	orang	2	2	100,00%	
h	Re-Akreditasi Sistem Mutu	input	dana	Rp	Rp 44.672.000	Rp 43.638.150	97,69%	
		output	Jumlah rapat	kali	2	2	100,00%	
i	Validasi/revalidasi/verifikasi metode analisis	input	dana	Rp	Rp 30.400.000	Rp 29.928.250	98,45%	
		output	Jumlah paket yang diikuti	paket	3	3	100,00%	
j	Uji profisiensi/uji kolaborasi/ uji petik	input	dana	Rp	Rp 23.252.000	Rp 18.224.653	78,38%	
		output	Jumlah paket yang diikuti	paket	2	2	100,00%	
k	Forum Diskusi Peningkatan Teknis Pengujian di Badan POM	input	dana	Rp	Rp 22.740.000	Rp 21.599.800	94,99%	
		output	Jumlah SDM yang mengikuti	orang	5	5	100,00%	
l	Seminar Ilmiah dan Forum Diseminasi Hasil Riset	input	dana	Rp	Rp 5.360.000	Rp 5.305.200	98,98%	
		output	Jumlah SDM yang mengikuti	orang	2	2	100,00%	
m	Pengadaan bahan kimia khusus	input	dana	Rp	Rp 60.000.000	Rp 60.000.000	100,00%	
		output	Jumlah paket	paket	2	2	100,00%	
n	Pengadaan penunjang lab	input	dana	Rp	Rp 236.463.000	Rp 230.417.172	97,44%	
		output	Jumlah paket	paket	2	2	100,00%	
o	Pengadaan Suku Cadang Dan Glassware PNB	input	dana	Rp	Rp 578.927.000	Rp 569.800.000	98,42%	
		output	Reagensia yang diadakan	paket	1	1	100,00%	
p	Pengadaan buffer stok dan baku pembanding	input	dana	Rp	Rp 221.628.000	Rp 215.611.944	97,29%	
		output	jumlah paket	paket	1	1	100,00%	
q	Pelatihan analisis dengan instrumen di bidang PPTB	input	dana	Rp	Rp 8.838.000	Rp 7.364.100	83,32%	
		output	Jumlah SDM yang mengikuti	orang	1	1	100,00%	
r	Pelatihan analisis dengan instrumen di bidang Pangan	input	dana	Rp	Rp 8.838.000	Rp 7.821.000	88,49%	
		output	Jumlah SDM yang mengikuti	orang	1	1	100,00%	
s	Pelatihan analisis dengan instrumen di bidang OT dan komple	input	dana	Rp	Rp 6.566.000	Rp 6.552.500	99,79%	
		output	Jumlah SDM yang mengikuti	orang	1	1	100,00%	
t	Pelatihan analisis dengan instrumen di bidang kosmetik	input	dana	Rp	Rp 8.838.000	Rp 8.838.000	100,00%	
		output	Jumlah SDM yang mengikuti	orang	1	1	100,00%	
u	Pelatihan analisis dengan instrumen di bidang mikrobiologi	input	dana	Rp	Rp 8.838.000	Rp 7.852.200	88,85%	
		output	Jumlah SDM yang mengikuti	orang	1	1	100,00%	
v	Pelatihan Internal Bidang Teranokoko (15 Peserta)	input	dana	Rp	Rp 39.698.000	Rp 39.079.122	98,44%	
		output	Jumlah SDM yang mengikuti	orang	15	15	100,00%	
w	Pelatihan Internal Bidang Pangan dan BB (11 Peserta)	input	dana	Rp	Rp 22.698.000	Rp 22.300.536	98,25%	
		output	Jumlah SDM yang mengikuti	orang	11	11	100,00%	
x	Pelatihan Internal Mikrobiologi (7 Peserta)	input	dana	Rp	Rp 18.298.000	Rp 17.433.443	95,28%	
		output	Jumlah SDM yang mengikuti	orang	7	7	100,00%	
y	Magang di PPOM di Jakarta (Pangan, Teranokoko, Mikrobiologi)	input	dana	Rp	Rp 34.152.000	Rp 30.968.850	90,68%	
		output	Jumlah SDM yang mengikuti	orang	4	4	100,00%	
z	National food reference laboratory (NFRL) mikotoksin	input	dana	Rp	Rp 8.838.000	Rp 6.967.000	78,83%	
		output	Jumlah SDM yang mengikuti	orang	1	1	100,00%	
aa	Inhouse trinning sistem manajemen K3	input	dana	Rp	Rp 11.078.000	Rp 9.640.550	87,02%	
		output	Jumlah SDM yang mengikuti	orang	45	45	100,00%	

Sasaran	Kegiatan	Indikator kinerja		Satuan	Target	Realisasi	Persentase pencapaian	Ket	
			Uraian						
	ab Pelatihan sistem manajemen mutu ISO 17025 / ISO 9001:2015	input	dana	Rp	Rp 9.778.000	Rp 4.240.900	43,37%		
		output	Jumlah SDM yang mengikuti	orang	1	1	100,00%		
	3.5 BANGUNAN/GEDUNG								
	a Pemasangan instalasi gas laboratorium	input	dana	Rp	Rp 316.815.000	Rp 309.530.000	97,70%		
		output	Jumlah paket yang dilaksanakan	paket	1	1	100,00%		
	3.6 ALAT LABORATORIUM YANG DIADAKAN								
	a Pengadaan penambah nilai alat laboratorium	input	dana	Rp	Rp 1.278.998.000	Rp 1.204.070.000	94,14%		
		output	Jumlah paket yang dilaksanakan	paket	1	1	100,00%		
	b Pengadaan alat laboratorium utama	input	dana	Rp	Rp 3.959.424.000	Rp 3.811.175.540	96,26%		
		output	Jumlah paket yang dilaksanakan	paket	1	1	100,00%		
	3.7 LAYANAN INTERNAL (OVERHEAD)								
	a Pengadaan alat pengolahan data	input	dana	Rp	Rp 34.500.000	Rp 33.224.021	96,30%		
		output	Jumlah paket yang dilaksanakan	paket	1	1	100,00%		
	b Pengadaan peralatan dan fasilitas perkantoran	input	dana	Rp	Rp 95.500.000	Rp 92.675.000	97,04%		
		output	Jumlah paket yang dilaksanakan	paket	1	1	100,00%		
	3.8 LAYANAN PERKANTORAN								
	a Pembayaran Gaji dan Tunjangan	input	dana	Rp	Rp 5.560.487.000	Rp 5.280.547.785	94,97%		
		output	Lama proses pembayaran gaji	Bulan	12	12	100,00%		
	b Pengadaan Makanan/Minuman Penambah Daya Tahan Tubuh	input	dana	Rp	Rp 147.840.000	Rp 147.600.000	99,84%		
		output	SDM yang ditingkatkan daya tahan tubuhnya	Orang	44	44	100,00%		
	c Pemeriksaan Kesehatan resiko Pekerjaan	input	dana	Rp	Rp 81.000.000	Rp 79.790.000	98,51%		
		output	SDM yang diperiksa kesehatannya	Orang	81	81	100,00%		
	d Perawatan Gedung Kantor	input	dana	Rp	Rp 243.865.000	Rp 239.769.378	98,32%		
		output	gedung kantor yang terpelihara	m ²	1400	1400	100,00%		
	e Perbaikan Peralatan Kantor	input	dana	Rp	Rp 174.480.000	Rp 169.215.204	96,98%		
		output	peralatan kantor yang dipelihara & berfungsi dengan baik	bulan	12	12	100,00%		
	f Perlengkapan kantor	input	dana	Rp	Rp 140.770.000	Rp 139.901.737	99,38%		
		output	Terpenuhinya keperluan sehari-hari kantor	Bulan	12	12	100,00%		
	g Perawatan Kendaraan Bermotor Roda 4/6	input	dana	Rp	Rp 85.500.000	Rp 78.844.557	92,22%		
		output	kendaraan roda 4/6 yang berfungsi dengan baik	Unit	10	10	100,00%		
	h Perawatan Kendaraan Bermotor Roda 2	input	dana	Rp	Rp 6.000.000	Rp 1.104.548	18,41%		
		output	kendaraan roda 2 yang berfungsi dengan baik	Unit	2	2	100,00%		
	i Tagihan Langgan Daya dan jasa	input	dana	Rp	Rp 804.000.000	Rp 671.552.438	83,53%		
		output	langganan dan jasa yang tersedia	bulan	12	12	100,00%		
	j Operasional Perkantoran dan Pimpinan	input	dana	Rp	Rp 681.668.000	Rp 655.122.117	96,11%		
		output	operasional perkantoran & pimpinan yang berjalan dengan baik	bulan	12	12	100,00%		
	k Administrasi	input	dana	Rp	Rp 201.840.000	Rp 172.240.000	85,33%		
		output	Honor pengelola keuangan	bulan	12	12	100,00%		
	Jumlah rata-rata Realisasi anggaran SS3				Rp	18.220.239.000	Rp 17.041.261.293	93,53%	

LAMPIRAN 5
PENGUKURAN EFEKTIFITAS KEGIATAN
TINGKAT UNIT ORGANISASI BALAI BESAR POM

Unit Organisasi : Balai Besar POM di Palembang
Tahun Anggaran : 2017

Sasaran	Kegiatan	Rata-Rata % Capaian Target Indikator		IE	SE	Kategori	TE	
		Input	Output					
1. Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan	1	PRODUK OBAT DAN MAKANAN YANG DISAMPEL DAN DIUJI						
	1.1	PENGUJIAN LABORATORIUM SAMPEL OBAT KB						
	a	Pengadaan sampel	30,33%	103,23%	3,40	1,00	Efisien	2,40
	b	Pengujian laboratorium	78,18%	103,23%	1,32	1,00	Efisien	0,32
	1.2	PENGUJIAN LABORATORIUM SAMPEL MAKANAN						
	a	Pengadaan sampel	77,39%	100,00%	1,29	1,00	Efisien	0,29
	b	Pengujian laboratorium	91,99%	100,04%	1,09	1,00	Efisien	0,09
	1.3	PENGUJIAN LABORATORIUM SAMPEL OBAT, OT, KOSMETIK						
	a	Penyusunan Perencanaan	72,11%	100,00%	1,39	1,00	Efisien	0,39
	b	Pengadaan sampel	85,13%	100,00%	1,17	1,00	Efisien	0,17
	c	Pengujian laboratorium	94,57%	100,00%	1,06	1,00	Efisien	0,06
	1.4	PENGAWASAN SARANA PRODUKSI OBAT, OT, KOSMETIKA, NAFZA, PREKURSOR, MAKANAN DAN						
	a	Pemeriksaan Sarana Produksi OMKA	95,81%	116,25%	1,21	1,00	Efisien	0,21
	1.5	PENGAWASAN SARANA DISTRIBUSI OBAT, OT, KOSMETIKA, NAFZA, PREKURSOR, MAKANAN DAN						
	a	Pemeriksaan Sarana	78,60%	105,97%	1,35	1,00	Efisien	0,35
	b	Audit Komprehensif	79,04%	230,00%	2,91	1,00	Efisien	1,91
	c	Peer Inspection	99,45%	100,00%	1,01	1,00	Efisien	0,01
	d	Join Inspection	100,00%	100,00%	1,00	1,00	Efisien	0,00
	e	Aksi Penertiban Kosmetik	57,46%	100,00%	1,74	1,00	Efisien	0,74
	f	Post Marketing Vigilance Iklan dan Promosi OMKA	96,31%	314,50%	3,27	1,00	Efisien	2,27
	g	Pelatihan Inspeksi CPOB di	97,36%	100,00%	1,03	1,00	Efisien	0,03
	h	Pelatihan CPOTB Lanjutan	100,00%	100,00%	1,00	1,00	Efisien	0,00
	i	Rakon Nas Pengawasan OT,	99,00%	100,00%	1,01	1,00	Efisien	0,01
	j	Pelatihan CPOTB Dasar	100,00%	100,00%	1,00	1,00	Efisien	0,00
	k	Evaluasi Efektifitas	100,00%	100,00%	1,00	1,00	Efisien	0,00
	1.6	PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN						
	a	Pulbaket, verifikasi	0,00%	137,50%	-	1,00	TDD	-
	b	Pelaksanaan Investigasi	76,27%	122,22%	1,60	1,00	TDD	-
c	Evaluasi Inves Awal, Gelar	94,71%	122,22%	1,29	1,00	Efisien	0,29	
d	Rapat Pembahasan Rencana	84,66%	166,67%	1,97	1,00	Efisien	0,97	
e	Penindakan	78,68%	166,67%	2,12	1,00	Efisien	1,12	
f	Pemberkasan	66,54%	66,67%	1,00	1,00	Efisien	0,00	
g	Konsultasi Penyelesaian	69,65%	166,67%	2,39	1,00	Efisien	1,97	
h	Gelar Perkara	39,25%	233,33%	5,94	1,00	Efisien	4,94	
i	Penasehat Hukum	100,00%	33,33%	0,33	1,00	Tidak Efisien	-0,67	
j	Pulbaket, verifikasi	15,34%	88,24%	5,75	1,00	Efisien	4,75	
k	Pelaksanaan Investigasi	82,53%	113,33%	1,37	1,00	Efisien	0,37	
l	Evaluasi Inves Awal, Gelar	60,85%	88,24%	1,45	1,00	Efisien	0,45	
m	Rapat Pembahasan Rencana	0,00%	57,14%	-	1,00	TDD	-	
n	Penindakan	43,81%	57,14%	1,30	1,00	Efisien	0,30	
o	Pemberkasan	45,45%	42,86%	0,94	1,00	Tidak Efisien	-0,06	
p	Konsultasi Penyelesaian Berkas Perkara	91,74%	42,86%	0,47	1,00	Tidak Efisien	-0,53	
q	Gelar Perkara	8,39%	71,43%	8,51	1,00	Efisien	7,51	

Sasaran	Kegiatan	Rata-Rata % Capaian Target Indikator		IE	SE	Kategori	TE	
		Input	Output					
2. Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat	r	Penasehat Hukum	100,00%	42,86%	0,43	1,00	Tidak Efisien	-0,57
	2.1	LAYANAN PUBLIK BB/BPOM						
	a	Coaching Clinic Pengawasan	100,00%	100,00%	1,00	1,00	Efisien	0,00
	b	Koordinasi dan diseminasi	99,60%	100,00%	1,00	1,00	Efisien	0,00
	c	Advokasi & sosialisasi BBPOM ke Kab/Kota	69,57%	68,75%	0,99	1,00	Tidak Efisien	-0,01
	d	Rencana Aksi Lab. Keliling	90,25%	100,00%	1,11	1,00	Efisien	0,11
	e	FGD koordinasi dan pemantaban tahubja dg lintas sektor	75,23%	100,00%	1,33	1,00	Efisien	0,33
	f	Pemeriksaan dalam rangka Perizinan/Reg/SKI/SKE/Halal	36,44%	62,50%	1,72	1,00	Efisien	0,72
	g	Sosialisasi Penyebaran Informasi Produk OMKABA	96,66%	100,00%	1,03	1,00	Efisien	0,03
	h	Komunikasi, Informasi, Edukasi	78,74%	100,00%	1,27	1,00	Efisien	0,27
	i	Pemetaan distribusi keracunan obat dan makanan di Indonesia	15,56%	100,00%	6,43	1,00	Efisien	5,43
	j	Sosialisasi pemberdayaan masyarakat melalui KIE obat dan makanan	96,66%	100,00%	1,03	1,00	Efisien	0,03
	k	Workshop virtual ekosistem	41,29%	50,00%	1,21	1,00	Efisien	0,21
	l	Pelatihan surveilan KLB	81,21%	100,00%	1,23	1,00	Efisien	0,23
	m	Bimtek CPKB dalam rangka pelayanan publik bagi petugas daerah	0,00%	100,00%	-	1,00	TDD	-
	n	Pelatihan fasilitator pasar aman dari bahan berbahaya	0,00%	0,00%	-	1,00	Tidak Dilaksanakan	-
	o	Bimtek penerbitan SKI/SKE bagi petugas	0,00%	100,00%	-	1,00	TDD	-
	2.2	KOMUNITAS YANG DIBERDAYAKAN						
	a	Advokasi kelembagaan desa	63,34%	100,00%	1,58	1,00	Efisien	0,58
	b	Pemberdayaan masyarakat dan usaha pangan desa di bidang keamanan pangan - di balai	92,90%	100,00%	1,08	1,00	Efisien	0,08
c	Monitoring dan evaluasi - balai	23,74%	100,00%	4,21	1,00	Efisien	3,21	
d	Operasional lab keliling dalam rangka PJAS dan food security	92,71%	109,52%	1,18	1,00	Efisien	0,18	
e	Pasar aman dari bahan berbahaya	80,35%	100,00%	1,24	1,00	Efisien	0,24	
f	Monitoring dan evaluasi - balai	0,00%	0,00%	-	1,00	Tidak Dilaksanakan	-	
3	KEGIATAN DUKUNGAN TEKNIS DAN MANAJEMEN LABORATORIUM YANG DILAKSANAKAN							
3.1	SARANA DAN PRASARANA SESUAI STANDAR							
a	Pengadaan buku pustaka	58,76%	100,00%	1,70	1,00	Efisien	0,70	
b	Pengadaan genset	91,31%	100,00%	1,10	1,00	Efisien	0,10	
c	Pengadaan pakaian kerja	90,82%	100,04%	1,10	1,00	Efisien	0,10	
d	Administrasi pengadaan	91,66%	100,00%	1,09	1,00	Efisien	0,09	
e	Langganan internet	96,71%	100,00%	1,03	1,00	Efisien	0,03	
f	Pengadaan mobil lab keliling	98,84%	100,00%	1,01	1,00	Efisien	0,01	

Sasaran	Kegiatan	Rata-Rata % Capaian Target Indikator		IE	SE	Kategori	TE	
		Input	Output					
	3.2	DOKUMEN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI						
	a	Rapat Kerja Nasional di Surabaya	73,13%	100,00%	1,37	1,00	Efisien	0,37
	b	Rapat Evaluasi Nasional di Gorontalo	97,58%	100,00%	1,02	1,00	Efisien	0,02
	c	Rapat Koordinasi Internal	89,92%	100,00%	1,11	1,00	Efisien	0,11
	d	Konsultasi ke Pusat dan Antar Balai	99,22%	100,00%	1,01	1,00	Efisien	0,01
	e	Rapat Kerja Pengawasan dan Pelaksanaan RB	0,00%	100,00%	-	1,00	TDD	-
	f	Rapat Koordinasi Nasional Implementasi SPIP Badan POM	0,00%	100,00%	-	1,00	TDD	-
	g	Evaluasi Implementasi SPIP	0,00%	0,00%	-	1,00	Tidak Dilaksanakan	-
	h	Pemantauan SPIP satker/unit mandiri	0,00%	0,00%	-	1,00	Tidak Dilaksanakan	-
	i	Survei indeks kepuasan masyarakat	0,00%	0,00%	-	1,00	Tidak Dilaksanakan	-
	j	Perkuatan bimtek movev	0,00%	0,00%	-	1,00	Tidak Dilaksanakan	-
	k	Workshop implementasi pelaksanaan akuntansi	0,00%	100,00%	-	1,00	TDD	-
	l	Penyusunan program	46,68%	100,00%	2,14	1,00	Efisien	1,14
	m	Penyusunan LAKIP dan	99,76%	100,00%	1,00	1,00	Efisien	0,00
	n	Terlaksananya Sistem Akuntansi Pemerintah (SAI)	85,71%	100,00%	1,17	1,00	Efisien	0,17
	o	Kelancaran Administrasi pemerintahan	81,30%	100,00%	1,23	1,00	Efisien	0,23
	p	Perjalanan monitoring kepala balai ke wilayah	0,00%	0,00%	-	1,00	Tidak Dilaksanakan	-
	q	Penyusunan laporan keuangan konsolidasi 2017	78,56%	100,00%	1,27	1,00	Efisien	0,27
	r	Workshop keuangan	90,24%	100,00%	1,11	1,00	Efisien	0,11
	s	Ujian Dinas UPKP	54,34%	100,00%	1,84	1,00	Efisien	0,84
	t	Diklat fungsional PFM	95,28%	100,00%	1,05	1,00	Efisien	0,05
	u	Reformasi birokrasi	0,00%	0,00%	-	1,00	Tidak Dilaksanakan	-
	v	Workshop sdm	97,23%	100,00%	1,03	1,00	Efisien	0,03
	w	Pemeliharaan dan peningkatan QMS ISO 9001	39,57%	100,00%	2,53	1,00	Efisien	1,53
	x	Penilaian angka kredit	100,00%	100,00%	1,00	1,00	Efisien	0,00
	y	Peningkatan kompetensi asn	0,00%	0,00%	-	1,00	Tidak Dilaksanakan	-
	z	Sosialisasi pengelolaan BMN	42,63%	100,00%	2,35	1,00	Efisien	1,35
	aa	Pembinaan Administrasi	66,46%	100,00%	1,50	1,00	Efisien	0,50
	ab	Jumlah ATK/cetakan/Terbitan/Penggunaan/Laminating	95,73%	100,00%	1,04	1,00	Efisien	0,04
	ac	Sewa Rumah Dinas	99,00%	100,00%	1,01	1,00	Efisien	0,01
	ad	Pemutakhiran data BMN	70,04%	100,00%	1,43	1,00	Efisien	0,43
	ae	Persiapan Penghapusan	44,65%	100,00%	2,24	1,00	Efisien	1,24
	af	Administrasi	90,48%	100,00%	1,11	1,00	Efisien	0,11
	ag	Bimtek penilaian BMN	100,00%	100,00%	1,00	1,00	Efisien	0,00
	ah	Sosialisasi pedoman tata	94,57%	100,00%	1,06	1,00	Efisien	0,06
	ai	Penggalangan komitmen terkait revolusi mental	0,00%	0,00%	-	1,00	Tidak Dilaksanakan	-
	aj	Pembinaan BPOM/BBPOM	82,94%	100,00%	1,21	1,00	Efisien	0,21

Sasaran	Kegiatan	Rata-Rata % Capaian Target Indikator		IE	SE	Kategori	TE	
		Input	Output					
	ak	Pelatihan eksternal	71,50%	100,00%	1,40	1,00	Efisien	0,40
	3.3	LAPORAN DUKUNGAN TEKNIS INVESTIGASI AWAL DAN PENYIDIKAN						
	a	Pemantapan operasional penyidikan obat dan makanan	96,07%	100,00%	1,04	1,00	Efisien	0,04
	b	Peningkatan kemampuan manajerial	99,86%	100,00%	1,00	1,00	Efisien	0,00
	c	Pertemuan Peningkatan Kinerja Profesionalisme dan	53,92%	100,00%	1,85	1,00	Efisien	0,85
	d	Pendidikan dan Pelatihan Intelijen di Bandung	93,71%	100,00%	1,07	1,00	Efisien	0,07
	e	Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan PPNS Badan POM	92,33%	100,04%	1,08	1,00	Efisien	0,08
	f	Peningkatan Kompetensi Penyidikan PPNS Balai Besar/Balai POM	0,00%	0,00%	-	1,00	Tidak Dilaksanakan	-
	g	Monitoring status PPNS ke BPOM pusat	99,86%	100,04%	1,00	1,00	Efisien	0,00
	h	Rapat koordinasi lintas sektor penegakan hukum	58,87%	133,33%	2,26	1,00	Efisien	1,26
	i	Peningkatan Kompetensi Dasar PPNS Balai	100,00%	100,00%	1,00	1,00	Efisien	0,00
	3.4	DOKUMEN DUKUNGAN TEKNIS DAN MANAJEMEN LABORATORIUM						
	a	Audit Internal Sistem Mutu	94,00%	100,00%	1,06	1,00	Efisien	0,06
	b	Kaji Ulang Sistem	56,29%	100,00%	1,78	1,00	Efisien	0,78
	c	Kalibrasi Alat Laboratorium	96,79%	100,00%	1,03	1,00	Efisien	0,03
	d	Pertemuan teknis	99,49%	100,00%	1,01	1,00	Efisien	0,01
	e	Pengelolaan Limbah dan	98,87%	100,00%	1,01	1,00	Efisien	0,01
	f	Reassessmen BB/BPOM dan	99,98%	100,00%	1,00	1,00	Efisien	0,00
	g	Perbaikan Hasil Suveilan	100,00%	100,00%	1,00	1,00	Efisien	0,00
	h	Re-Akreditasi Sistem Mutu	97,69%	100,00%	1,02	1,00	Efisien	0,02
	i	Validasi/revalidasi/	98,45%	100,00%	1,02	1,00	Efisien	0,02
	j	Uji profisiensi/uji	78,38%	100,00%	1,28	1,00	Efisien	0,28
	k	Forum Diskusi Peningkatan	94,99%	100,00%	1,05	1,00	Efisien	0,05
	l	Seminar Ilmiah dan Forum	98,98%	100,00%	1,01	1,00	Efisien	0,01
	m	Pengadaan bahan kimia	100,00%	100,00%	1,00	1,00	Efisien	0,00
	n	Pengadaan penunjang lab	97,44%	100,00%	1,03	1,00	Efisien	0,03
	o	Pengadaan Suku Cadang	98,42%	100,00%	1,02	1,00	Efisien	0,02
	p	Pengadaan buffer stok dan	97,29%	100,04%	1,03	1,00	Efisien	0,03
	q	Pelatihan analisis dengan	83,32%	100,00%	1,20	1,00	Efisien	0,20
	r	Pelatihan analisis dengan	88,49%	100,00%	1,13	1,00	Efisien	0,13
	s	Pelatihan analisis dengan	99,79%	100,00%	1,00	1,00	Efisien	0,00
	t	Pelatihan analisis dengan	100,00%	100,00%	1,00	1,00	Efisien	0,00
	u	Pelatihan analisis dengan	88,85%	100,00%	-	1,00	Efisien	-
	v	Pelatihan Internal Bidang Teranokoko (15 Peserta)	98,44%	100,00%	-	1,00	Efisien	-
	w	Pelatihan Internal Bidang	98,25%	100,00%	1,02	1,00	Efisien	0,02
	x	Pelatihan Internal	95,28%	100,00%	1,05	1,00	Efisien	0,05
	y	Magang di PPOM di Jakarta (90,68%	100,00%	1,10	1,00	Efisien	0,10
	z	National food reference	78,83%	100,00%	1,27	1,00	Efisien	0,27
	aa	Inhouse trinning sistem	87,02%	100,00%	1,15	1,00	Efisien	0,15
	ab	Pelatihan sistem manajemen	43,37%	100,00%	2,31	1,00	Efisien	1,31
	3.5	BANGUNAN/GEDUNG						
	a	Pemasangan instalasi gas	97,70%	100,00%	1,02	1,00	Efisien	0,02

**CAPAIAN KINERJA RENCANA KINERJA PEMERINTAH (RKP)
BALAI BESAR POM DI PALEMBANG
S/D TRIWULAN IV TAHUN 2017**

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	PEMBILANG	REALISASI s.d TW IV	PENYEBUT	REALISASI s.d TW IV	TARGET s.d TW IV	TARGET 2017	CAPAIAN s.d TW IV 12 = (7/9*100)	% CAPAIAN THD TARGET TW IV 13 = (12/10*100)	% CAPAIAN THD TARGET 2017 14 = (12/11*100)
3	Program Pengawasan Obat dan Makanan	Menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan	Persentase obat yang memenuhi syarat	a. obat yang mendapatkan NIE dari Badan POM. b. Yang dimaksud dengan obat adalah obat bebas, obat bebas terbatas, obat wajib apotek, obat keras, psikotropika dan narkotika (tidak termasuk OT) c. obat Memenuhi Syarat (MS) ditetapkan melalui uji laboratorium. d. Kategori obat yang disampling sesuai dengan pedoman sampling Obat dan Makanan. e. Jumlah produk obat TMS dihitung berdasarkan satuan bets	Produk obat yang MS pada tahun berjalan	501	Jumlah seluruh obat yang diuji dengan parameter kritis pada tahun berjalan (n)	516	97,23	97,23	97,09	99,86	99,86
			Persentase obat tradisional yang memenuhi syarat	a. Obat Tradisional yang mendapatkan NIE dari Badan POM. b. Obat Tradisional (OT) yang memenuhi syarat ditetapkan melalui pengujian laboratorium. c. Kategori Obat Tradisional yang diuji sesuai dengan pedoman sampling Obat dan Makanan.	Jumlah Obat Tradisional yang MS pada tahun berjalan	338	Total Obat Tradisional yang diuji dengan parameter kritis pada tahun berjalan (n)	392	89,49	89,49	86,22	96,35	96,35
			Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat	a. Kosmetik yang mendapatkan notifikasi dari BPOM b. Kosmetik yang memenuhi syarat ditetapkan melalui pengujian laboratorium. c. Kategori kosmetik yang diuji sesuai dengan pedoman sampling Obat dan Makanan.	Jumlah Kosmetik yang memenuhi syarat pada tahun berjalan	755	Total Kosmetik yang diuji dengan parameter kritis pada tahun berjalan (n)	784	98,85	98,85	96,30	97,42	97,42
			Persentase Suplemen kesehatan yang memenuhi syarat	a. Suplemen Kesehatan (SK) yang mendapatkan NIE dari BPOM. b. Suplemen Kesehatan (SK) yang memenuhi syarat ditetapkan melalui pengujian laboratorium. c. Kategori suplemen kesehatan yang diuji sesuai dengan pedoman sampling Obat dan Makanan.	Jumlah Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat pada tahun berjalan	128	Total Suplemen Kesehatan yang diuji dengan parameter kritis pada tahun berjalan (n)	131	98,40	98,40	97,71	99,30	99,30
			Persentase makanan yang memenuhi syarat	a. Makanan adalah pangan olahan yang mendapatkan NIE dari Badan POM. b. Makanan MS ditetapkan melalui uji laboratorium. c. Kategori pangan yang diuji sesuai dengan pedoman sampling Obat dan Makanan.	Makanan yang MS pada tahun berjalan pada tahun berjalan	522	Jumlah seluruh sampel Makanan yang diuji dengan parameter kritis pada tahun berjalan (n)	584	92,95	92,95	89,38	96,16	96,16
		Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat	Tingkat Kepuasan Masyarakat	a. Tingkat Kepuasan Masyarakat adalah tolok ukur untuk menilai kualitas pelayanan yang diperoleh dari hasil survei Kepuasan Masyarakat. b. Tata cara pelaksanaan survei mengacu pada pedoman yang disiapkan Inspektorat BPOM mengacu pada pedoman terkini (Saat ini PermenPAN No. 16 tahun 2014) c. Target dinyatakan dalam angka	Hasil Survei lapangan	86,18		86,18	84	84	86,18	102,60	102,60

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	PEMBILANG	REALISASI s.d TW IV	PENYEBUT	REALISASI s.d TW IV	TARGET s.d TW IV	TARGET 2017	CAPAIAN s.d TW IV 12 = (7/9*100)	% CAPAIAN THD TARGET TW IV 13 = (12/10*100)	% CAPAIAN THD TARGET 2017 14 = (12/11*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 = (7/9*100)	13 = (12/10*100)	14 = (12/11*100)
			Jumlah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan	Provinsi adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia yang dipimpin oleh Gubernur Kabupaten/ Kota adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia setelah provinsi yang dipimpin oleh Bupati/ Kota. Komitmen untuk pelaksanaan adalah perjanjian (keterikatan) Kota/ Kabupaten untuk melakukan pelaksanaan pengawasan obat, kosmetik, obat tradisional, pangan dan bahan berbahaya yang sering disalahgunakan dalam pangan, baik yang dilakukan secara mandiri dan atau terpadu melalui pengawasan/ pemeriksaan, advokasi/ penyuluhan, pembentukan tim terpadu, pertemuan dan kegiatan lainnya yang dapat memperkuat pengawasan. Alokasi anggaran adalah alokasi anggaran daerah baik yang berupa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota dan lain-lain sumber pendapatan yang sah dan tidak mengikat, yang dikelola oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait.	hasil rekapitulasi matriks pemantauan pengalokasian anggaran Pemda untuk Pengawasan Obat dan Makanan	17		17	17	17	17	100	100,00
		Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan BPOM	Nilai SAKIP Balai POM	Nilai SAKIP diukur berdasarkan hasil penilaian SAKIP yang dilakukan oleh APIP Badan POM	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Balai yang dilakukan oleh APIP Badan POM	BB		BB	BB				
3.1	Pengawasan Obat dan Makanan di 33 Balai Besar/Balai POM	Meningkatnya kinerja pengawasan obat dan makanan di seluruh Indonesia	Jumlah sampel Obat KB yang diuji menggunakan parameter kritis	a. Parameter kritis adalah parameter uji yang bersifat sebagai penentu terhadap jaminan keamanan, manfaat, dan mutu produk yang diuji b. Parameter kritis ditetapkan dalam pedoman sampling Obat dan Makanan (juga menjelaskan "penentu" terhadap jaminan keamanan, manfaat, dan mutu produk yang diuji)	Jumlah sampel yang diuji menggunakan parameter kritis	32	-	32	31	31	32	103,23	103,23
			Jumlah sampel Obat yang diuji menggunakan parameter kritis	a. Parameter kritis adalah parameter uji yang bersifat sebagai penentu terhadap jaminan keamanan, manfaat, dan mutu produk yang diuji b. Parameter kritis ditetapkan dalam pedoman sampling Obat dan Makanan (juga menjelaskan "penentu" terhadap jaminan keamanan, manfaat, dan mutu produk yang diuji)	Jumlah sampel yang diuji menggunakan parameter kritis	1795	-	1795	1.796	1.796	1795	99,94	99,94

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	PEMBILANG	REALISASI s.d TW IV	PENYEBUT	REALISASI s.d TW IV	TARGET s.d TW IV	TARGET 2017	CAPAIAN s.d TW IV 12 = (7/9*100)	% CAPAIAN THD TARGET TW IV 13 = (12/10*100)	% CAPAIAN THD TARGET 2017 14 = (12/11*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 = (7/9*100)	13 = (12/10*100)	14 = (12/11*100)
			Jumlah sampel Makanan yang diuji menggunakan parameter kritis	a. Parameter kritis adalah parameter uji yang bersifat sebagai penentu terhadap jaminan keamanan, manfaat, dan mutu produk yang diuji b. Parameter kritis ditetapkan dalam pedoman sampling Obat dan Makanan (juga menjelaskan "penentu" terhadap jaminan keamanan, manfaat, dan mutu produk yang diuji)	Jumlah sampel yang diuji menggunakan parameter kritis	780	-	780	780	780	780	100,00	100,00
			Pemenuhan target sampling produk Obat di sektor publik (Instalasi Farmasi Kabupaten)	a. Diukur berdasarkan jumlah sampel yang diambil pada IFK (termasuk gudang obat KB) dibandingkan dengan target sampel yang harus disampling di IFK (termasuk gudang obat KB) di masing-masing balai. b. Target sampel yang harus disampling di sarana sektor publik untuk masing-masing balai ditetapkan dalam Pedoman Sampling.	Jumlah sampel yang diambil pada IFK dan gudang alokon KB	100	target sampel yang harus disampling di IFK dan gudang alokon KB di masing-masing Balai	100	100	100	100,00	100,00	100,00
			Persentase cakupan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan	a. Sarana produksi Obat dan Makanan adalah jumlah sarana industri Farmasi, Industri Rokok, Industri Obat Tradisional (IOT), Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT), Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT), Industri Kosmetika, Industri Pangan olahan MD, dan Industri Rumah Tangga Pangan. b. Sarana produksi yang diperiksa setiap tahun ditetapkan berdasarkan kriteria Pedoman Pengawasan Sarana Produksi Obat dan Makanan. c. Cakupan pengawasan sarana produksi pertahun dihitung dari jumlah sarana produksi yang diperiksa dibandingkan dengan jumlah sarana produksi yang ada di wilayah tersebut d. Untuk penetapan target sarana produksi pangan MD dan IRTP yang diperiksa mengikuti ketentuan: - untuk balai yang memiliki sarana produksi MD <51, target sarana produksi pangan MD diperiksa sebesar 100%, sisa target pemeriksaan diambil dari sarana produksi IRTP - untuk balai yang memiliki sarana produksi MD 51-100, target sarana produksi pangan MD diperiksa sebesar 90%, sisa target pemeriksaan diambil dari sarana produksi IRTP - untuk balai yang memiliki sarana produksi MD 101-150, target sarana produksi pangan	Jumlah sarana produksi yang diperiksa	184	Jumlah sarana produksi yang ada di wilayah tersebut	1254	13,40	13,40	14,67	109,50	109,50

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	PEMBILANG	REALISASI s.d TW IV	PENYEBUT	REALISASI s.d TW IV	TARGET s.d TW IV	TARGET 2017	CAPAIAN s.d TW IV 12 = (7/9*100)	% CAPAIAN THD TARGET TW IV 13 = (12/10*100)	% CAPAIAN THD TARGET 2017 14 = (12/11*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
			Persentase cakupan pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan	a. Sarana Distribusi Obat dan Makanan terdiri atas: Jumlah sarana distribusi Obat (PBF dan Instalasi Farmasi Pemerintah) dan sarana Pelayanan Kesehatan (Apotek, Toko Obat Berizin, Klinik, Instalasi Farmasi Rumah Sakit dan Puskesmas), klinik kecantikan, spa, salon, pengobat tradisional, toko jamu, depot jamu, stokis MLM, Toko Modern (Minimarket, Supermarket, Department Store, Hypermarket), Toko Grosir, Toko Tradisional (Toko P & D dan Kios), Importir (termasuk importir terdaftar bahan berbahaya), distributor dan pengecer yang memiliki SIUP-BZ, baik perusahaan induk maupun perusahaan cabang. b. Sarana yang diperiksa setiap tahun ditetapkan berdasarkan kriteria Pedoman Pengawasan Sarana Distribusi Obat dan Makanan serta Pedoman Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya. c. Jumlah Sarana distribusi yang diperiksa adalah sarana distribusi yang diperiksa dalam rangka pemeriksaan rutin.	Jumlah sarana distribusi yang diperiksa	1141	Jumlah sarana distribusi obat dan makanan	3056	33,19	33,19	37,34	112,49	112,49
			Jumlah perkara di bidang obat dan makanan	a. Perkara adalah kasus yang ditindaklanjuti secara pro justitia berdasarkan hasil gelar kasus. b. Jumlah perkara yang dihitung adalah perkara yang telah diterbitkan SPDP-nya <u>kenada Keajaaksanaan melalui Korwas PPNS</u>	Jumlah perkara yang ditangani dan telah diterbitkan SPDP	5	-	5	10	10	5	50,00	50,00
			Persentase pemenuhan sarana	a. Standar yang dimaksud adalah standar sarana prasarana kerja dan standar alat laboratorium (sesuai GLP) b. Pemenuhan sarana dan prasarana kerja	sarana dan prasarana yang diadakan Alat laboratorium yang dimiliki	x1 x2	standar yang ditetapkan standar yang ditetapkan	y1 y2	85 85	85 85	85	100,00	100,00

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	PEMBILANG	REALISASI s.d TW IV	PENYEBUT	REALISASI s.d TW IV	TARGET s.d TW IV	TARGET 2017	CAPAIAN s.d TW IV 12 = (7/9*100)	% CAPAIAN THD TARGET TW IV 13 = (12/10*100)	% CAPAIAN THD TARGET 2017 14 = (12/11*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 = (7/9*100)	13 = (12/10*100)	14 = (12/11*100)
			Jumlah layanan publik BB/BPOM	a. Layanan publik terdiri dari Layanan informasi, Layanan Sertifikasi, dan layanan pengujian pihak ketiga b. Layanan Informasi diukur berdasarkan jenis dan frekuensi layanan informasi dan tindaklanjut pengaduan yang dilakukan oleh Balai Besar/Balai POM baik penyuluhan langsung atau melalui media cetak/elektronik c. Jenis layanan Informasi antara lain: Talkshow, Pameran, Penyuluhan, Bimtek, Iklan layanan masyarakat, layanan informasi, tindaklanjut pengaduan, BB/BPOM sebagai Narasumber, d. Untuk Talkshow, Pameran, Penyuluhan, Bimtek, Iklan layanan masyarakat, layanan informasi targetnya frekuensi Untuk tindaklanjut pengaduan targetnya jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti e. Layanan Sertifikasi dihitung dari rekomendasi/surat hasil audit yang dikeluarkan atas permintaan pelaku usaha industri pangan MD; audit sertifikasi dalam rangka rekomendasi halal, pemenuhan pendirian PBF, IKOT, UMOT, Kosmetik; SKI/SKE yang diterbitkan f. Layanan pengujian sampel pihak ketiga dihitung dari Laporan Hasil Uji sampel pihak ketiga	Jumlah layanan publik BB/BPOM	356	-		310	310	356	114,84	114,84
			Jumlah Komunitas yang diberdayakan	a. Komunitas adalah gabungan dari kelompok orang di desa/sekolah dasar/kelurahan/pasar yang diberdayakan Program Pengawasan Obat dan Makanan. b. Satu desa/sekolah dasar/kelurahan/pasar dihitung sebagai satu komunitas c. Jenis pemberdayaan diatur dalam Pedoman/luknis terkait. Ctt: Untuk komunitas pasar: - Target komunitas pasar (Kumulatif) : 2016 (108); 2017 (139) ; 2018 (170); 2019 (201) - Baseline 2013 (62); 2014 (77); 2015 (77) - Target komunitas desa kumulatif	Jumlah kumulatif komunitas yang diberdayakan. Target komunitas kumulatif dari tahun sebelumnya.	21	-	21	17	17	21	123,53	123,53
			Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	Dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dihasilkan dan harus dilaporkan Balai, meliputi dokumen berikut: - Renstra/review renstra,* - Perjanjian Kinerja tahun berjalan (n), - RKAKL/DIPA tahun n+1 - Laporan Kinerja tahun n-1, - Laporan triwulanan I - Laporan triwulanan II - Laporan triwulanan III - Laptah tahun n-1, - Laporan keuangan tahun n-1, - Laporan Keuangan Semester 1 tahun n, Ket: *) hanya menjadi target pada tahun 2015, 2017, dan 2019 Renstra: 2015 Review Renstra: 2017 dan 2019	Jumlah dokumen yang dihasilkan dan dilaporkan Balai	10	-	10	10	10	10	100,00	100,00

